

ANALISIS WACANA KRITIS SEBUAH TEORI DAN IMPLEMENTASI

.....
DEWI RATNANINGSIH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Hak Cipta

Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72:

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2002)

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 20 (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dewi Ratnaningsih

**ANALISIS WACANA KRITIS
Sebuah Teori dan Implementasi**



**Penerbit
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
2019**

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Analisis Wacana Kirtis
Sebuah Teori dan Implementasi**

Penulis:

Dewi Ratnaningsih, S.Pd., M.Pd.

Editor:

Dr. Sumarno, M.Pd.

Dr. Sri Widayati, M.Hum

Desain Cover dan Tata Letak:

Hartono

ISBN:

978-602-60227-3-8

Cetakan, Agustus 2019

Penerbit:

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Alamat Redaksi:

Gedung C Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sindang Sari, Lampung Utara

E-mail : perpus@umko.ac.id

Website : www.umko.ac.id

PRAKATA

Alhamdulillah, merupakan sebuah kata yang harus selalu terucap tulus dari lisan kita, lisan umat Islam yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT. Nikmat iman, Islam, dan sehat merupakan nikmat luar biasa dari Sang Penguasa Jagat Raya. Lantunan solawat teriring salam tidak lupa harus kita sanung agungkan kepada Nabiallah, Muhammad SAW. Manusia luar biasa, suri tauladan kita dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini. Semoga kita mendapatkan *safaat*-nya di *yaumul akhir* kelak. Aamiin.

Buku ini berjudul “Analisis Wacana Kritis: Sebuah Teori dan Implementasi”. Tersusunnya buku ini merupakan suatu anugerah luar biasa bagi penulis. Anugerah ini hadir tidak semerta-merta tanpa dukungan beberapa pihak yang luar biasa pula. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: (1) Suami

tercinta, Hartono, S.Pd. suami luar biasa yang selalu memotivasi penulis untuk terus berkarya; (2) Kedua orang tua yang sangat luar biasa memberikan dukungan melalui kekuatan doanya; (3) Putri-putri cantik kesayangan, kebanggaan, dan rezeki luar biasa dari-Nya; (4) Dr. Sumarno, M.Pd., Dr. Armina, M.Pd., dan Dr. Sri Widayati, M.Hum. Mereka adalah inspirasi bagi penulis; dan (5) Rekan dan sahabat luar biasa lain yang tidak bisa disebut satu per satu.

Sebuah kebahagiaan bagi penulis untuk terus berkarya. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak di atas merupakan anugerah luar biasa bagi penulis. Akhir kata semoga buku ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia.

Kotabumi, 17 Agustus 2019

Dewi Ratnaningsih

DAFTAR ISI

PRAKATA DAFTAR ISI

BAB I

Pendahuluan	1
-------------	---

BAB II

Wacana, Analisis Wacana,	
1. Wacana	9
2. Analisis Wacana	14
3. Analisis Wacana Kritis	18

BAB III

Analisis Wacana Kritis Van Dijk	
1. Teks	23
a. Tema	25
b. Skema	26
c. Latar	28
d. Detil	29
e. Maksud	31
f. Praanggapan	32
g. Nominalisasi	32
h. Peningkaran	33
i. Bentuk Kalimat	34
j. Koherensi	35

k. Koherensi Kondisional	36
l. Koherensi Pembeda	37
m. Kata Ganti	38
n. Leksikon	39
o. Grafis	40
p. Metafora	40
2. Konteks	41
3. Kognisi Sosial	44

BAB IV

Analisis Wacana Kritis Dalam Situs Kompasiana.Com	46
--	----

BAB V

Implementasi Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Wacana Bertema Sertifikasi Guru	50
---	----

BAB VI

Implementasi Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Wacana Bertema Ujian Nasional	101
---	-----

BAB VII

Implementasi Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Wacana Bertema Kurikulum 2013	181
---	-----

DAFTAR RUJUKAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Wacana tidak hanya dipandang sebagai pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan, tetapi juga sebagai bentuk dari praktik sosial.

Dalam hal ini, wacana adalah alat yang dekat dan mampu berinteraksi secara eksplisit dan implisit dengan kehidupan masyarakat. Melalui keberagaman media yang dapat melingkupinya dan tingkatan kualitas komunikasi yang dapat dibangunnya, wacana dimanfaatkan sebagai gerakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pencapaian tujuan akan menciptakan dampak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis wacana tersebut.

Dengan segala dampak yang dapat diciptakannya, wacana tentunya bukan sekedar teks dengan tujuan penulisan tertentu. Eriyanto (2010: 8–13) menyebut wacana semacam ini dengan istilah wacana kritis. Dia mengatakan bahwa wacana kritis dipandang sebagai objek kajian berdimensi

yang terdiri atas beberapa aspek: tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Aspek-aspek tersebut merupakan karakteristik dari wacana kritis.

Wacana atau tulisan bernada kritis dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan dari penulisnya. Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan dan memahami keseluruhan makna dalam sebuah teks adalah dengan melakukan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah model analisis wacana yang dapat digunakan untuk menjawab apakah wacana yang diproduksi telah dipengaruhi oleh tujuan tertentu atau tidak, dan bagaimana dampak wacana tersebut terhadap masyarakat pembaca. Hal tersebut didukung oleh pendapat Van Dijk dalam Darma (2013:51) yang mengemukakan bahwa analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis di antaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lainnya.

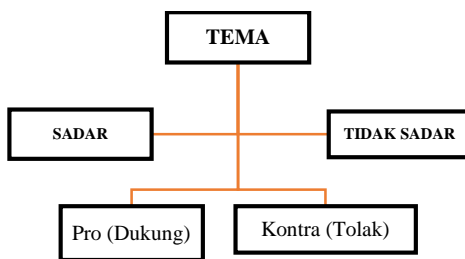
Kegiatan mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkritik sebuah tulisan atau teks dapat dilakukan melalui analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah upaya mendeskripsikan segala fenomena yang tertuang dalam tulisan atau teks. Kegiatan pendeskripsian dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang lengkap terkait fenomena masyarakat yang tertuang dalam sebuah teks. Kegiatan menganalisis diartikan sebagai kegiatan mengurai teks guna melihat apakah teks yang dihasilkan oleh pembuat teks dipengaruhi oleh kognisi dan lingkungan tertentu. Selain itu, kegiatan mengkritik adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian dan ketidakesesuaian teks terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakat.

Analisis wacana kritis setidaknya-tidaknya memandang wacana sebagai objek berdimensi yang terdiri atas tiga unsur: teks, kognisi sosial, dan konteks. Dimensi teks yang akan diteliti adalah struktur dari teks itu sendiri, di dalamnya terdapat analisis linguistik. Kognisi sosial merupakan dimensi untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi atau dibuat oleh penulis wacana. Konteks merupakan dimensi untuk melihat bagaimana teks dihubungkan dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Ketiga hal ini merupakan bagian integral yang harus dikaji bersama-sama untuk mendapatkan hasil analisis wacana secara utuh.

Setiap dimensi dalam wacana kritis tentunya mengangkat tema-tema tertentu, seperti pendidikan, politik, dan

kebijakan pemerintah. Tema adalah struktur wajib yang terdapat pada wacana. Tanpa adanya tema, wacana akan kehilangan tujuan, penguat antarkomponen, dan pengait antarstruktur. Dalam kaitannya dengan kemunculan tema tersebut, tema yang terdapat dalam suatu wacana dapat muncul secara sadar dan tidak sadar. Tema yang muncul secara sadar adalah tema yang dipilih berdasarkan hasil pemikiran, perumusan tujuan, atau penyimpulan suatu kajian. Sementara itu, tema yang muncul secara tidak sadar disebabkan adanya stimulus-stimulus tertentu (situasi politik, kebijakan pemerintah yang tidak adil, atau ancaman kesejahteraan) yang memengaruhi dan memicu motivasi memproduksi wacana. Tema yang muncul secara sadar dan tidak sadar tersebut dapat disikapi melalui dua pandangan: pro (dukung) dan kontra (tolak). Dengan demikian, satu tema dapat disikapi dengan kegiatan mendukung (pro) atau menolak (kontra), bahkan perlawanan.



Bagan 1. Posisi Tema dalam Wacana

Praktik pemilihan tema yang muncul secara sadar dan tidak sadar, lalu disikapi dengan kegiatan pro dan kontra dapat dilihat pada wacana-wacana kritis yang dipublikasikan melalui media massa: koran, televisi, atau internet. Beberapa media masa sering memilih satu tema yang memiliki kecenderungan pro dan kontra. Misalnya, tema pendidikan “kebijakan pemerintah yang menetapkan ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa” yang dituliskan koran ABC sebagai langkah tepat dan ideal, namun dituliskan oleh koran XYZ sebagai tindakan salah dan merugikan.

Fenomena seperti ini tidak terlepas dari fakta bahwa wacana kritis dipengaruhi oleh aspek kekuasaan dan ideologi. Wacana yang dipublikasikan oleh koran ABC mungkin saja bagian dari alat pendukung kebijakan penguasa, dan koran XYZ adalah media perlawanan yang diisi oleh pihak-pihak yang memiliki ideologi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa media massa memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu meskipun hampir semua media massa mengaku bahwa mereka pada posisi netral (tidak berpihak).

Media massa dan wacana adalah dua hal yang saling mendukung satu sama lain. Wacana kritis yang memiliki

kualitas konten baik sekalipun tidak akan mampu berdiri sendiri, wacana seperti ini memerlukan media massa yang melingkupinya.

Media massa sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis. Karakteristik media massa adalah: a) publisitas (disebarkan kepada publik/khalayak), b) universalitas (berisi informasi umum yang mencakup semua aspek kehidupan dan berbagai peristiwa di berbagai tempat), c) kontinuitas (disampaikan secara berkesinambungan), d) aktualitas (berisi hal-hal baru), dan e) periodisitas (disajikan secara tetap atau berkala). Menurut jenisnya, media massa dibagi menjadi tiga: media cetak, media elektronik, dan media siber (*online*).

Jika keberadaan wacana sangat bergantung pada media massa yang melingkupinya, media massa akan sangat bergantung pada penikmat atau penggunanya. Oleh karena itu, media massa yang ideal tidak hanya dilihat dari konten-konten yang diterbitkannya, tetapi juga kemudahan akses yang diberikannya kepada pengguna.

Untuk saat ini, media siber adalah media massa yang sangat populer dan diminati banyak golongan. Media jenis ini menjadi populer karena sangat mudah diakses oleh pengguna. Bahkan, pengguna bisa mencari berita-berita dengan kategori tertentu, sesuai kebutuhan informasi yang diinginkan oleh pengguna, tidak seperti media massa jenis lain yang cenderung lebih kaku. Media siber juga dapat diakses dimana dan kapan saja, hanya dengan alat komunikasi sehari-hari: telepon genggam atau telpon cerdas (*smartphone*).

Kemudahan akses informasi yang ditawarkan media massa jenis siber juga didukung dengan kemudahan interaksi antara pengguna dan media massa. Dalam konteks ini, media siber tidak hanya sarana berbagi informasi milik redaksi, tetapi juga sarana berbagi informasi antar pengguna. Melalui media siber besar seperti Kompas melalui *Kompasiana*, Detik melalui DetikForum dan BlogDetik, atau VivaNews melalui VivaForum, pengguna dapat mengirimkan tulisan untuk diterbitkan secara mudah, cepat, dan dapat dijangkau oleh banyak pihak. Kenyataan ini tentunya berbeda dengan media massa jenis cetak dan elektronik. Meskipun kedua jenis media massa ini juga melibatkan pengguna untuk

mengirimkan berita atau tulisannya, media massa jenis siber memberikan akses lebih mudah dan cepat. Dengan adanya peran pengguna untuk berbagi informasi atau berita, informasi yang dipublikasi akan lebih beragam dan mampu merepresentasikan informasi lebih objektif.

Keberadaan pengguna sebagai penyedia informasi dalam media massa siber akan memengaruhi variasi dan pilihan tema yang dipublikasi, diikuti dengan variasi dalam menyikapi tema. Dalam media massa siber, hampir semua informasi yang dipublikasi telah mewakili semua tema umum: pendidikan, pemerintahan, politik, budaya, sosial, kriminal, olahraga, teknologi, dan ekonomi. Kesemua tema tersebut juga disikapi dengan pandangan pro dan kontra.

BAB II WACANA, ANALISIS WACANA, AWK

1. Wacana

Wacana memiliki keragaman definisi. Keragaman ini muncul karena wacana digunakan pada banyak disiplin ilmu sehingga diartikan sesuai dengan disiplin ilmu yang melingkupinya. Dalam lingkup linguistik, beberapa ahli mengaitkan wacana dengan cabang-cabang linguistik, yang di dalamnya mencakup berbagai disiplin ilmu bahasa. Darma (2013: 1) mendefinisikan wacana sebagai tataran tertinggi, terbesar, dan terlengkap karena di dalam wacana terdapat unsur-unsur linguistik yang cukup kompleks seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan ditunjang oleh situasi pemakaian dalam masyarakat. Pendapat Darman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tarigan, namun Tarigan lebih menekankan pada ruang lingkup atau struktur wacana itu sendiri. Tarigan dalam Wijana dan Rohmadi (2010: 67)

mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap, tertinggi, dan terbesar. Wacana adalah produksi bahasa (lebih kompleks) karena berada di atas kalimat atau klausa. Wacana juga dilengkapi dengan unsur koherensi dan kohesi yang berkesinambungan. Kesenambungan yang dibentuk oleh unsur koherensi dan kohesi tersebut mampu membentuk awal dan akhir yang nyata, dan dapat disampaikan melalui ragam lisan maupun tulisan.

Selain kaitannya dengan linguistik dan cabang-cabang di dalamnya, wacana juga sangat terkait dengan masyarakat pemakainya. Wacana dipandang sebagai hasil produksi bahasa oleh seorang pengguna bahasa. Samsuri dalam Darma (2013: 2) mengatakan bahwa wacana memiliki kaitan yang erat dengan bahasa pemakainya. Tidak hanya terkait dengan pemakainya, beberapa ahli berikutnya mengatakan bahwa wacana adalah bagian dari komunikasi. Hawthorn dalam Eriyanto (2008: 2) mendefinisikan wacana sebagai komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar. Komunikasi tersebut disebut sebagai sebuah aktivitas personal yang bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya (tujuan komunikasinya).

Pendapat yang melibatkan wacana dengan proses komunikasi juga disampaikan oleh Sobur Alex, Sobur Alex dalam Darma (2013: 3) mengungkapkan bahwa wacana adalah proses komunikasi yang menggunakan simbol-simbol, dan berkaitan dengan interpretasi atas peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas.

Hal ini menunjukkan bahwa wacana adalah bagian yang tidak terlepas dari tujuan berbahasa, yaitu melakukan komunikasi. Wijana dan Rohmadi (2010: 70) mengungkapkan wacana merupakan rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan linguistik, wacana disebut juga sebagai tataran tertinggi, terbesar, dan terlengkap dalam bahasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, wacana didefinisikan menjadi dua bagian: sebagai tataran terbesar, tertinggi, dan terlengkap (linguistik) dan sebagai bagian dari komunikasi. Oleh karena itu, Samsuri dalam Rusminto (2012: 3) mengungkapkan bahwa wacana merupakan rekaman kebahasaan (unsur-unsur linguistik) yang utuh tentang peristiwa komunikasi, baik lisan maupun tulisan.

Badudu dalam Eriyanto (2008: 2) mendefinisikan wacana secara kompleks dan lebih spesifik. Pendapat Badudu juga masih memiliki kesinambungan dengan pendapat ahli sebelumnya.

Ia mengatakan dengan tegas bahwa “wacana adalah 1) rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan sehingga terbentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu; 2) kesatuan bahasa yang terlengkap dan terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang berkesinambungan, yang mampu memunyai awal dan akhir yang nyata, di sampaikan secara lisan maupun tulisan.”

Vass dalam Titscher dkk (2009: 42) menjelaskan makna wacana sebagai berikut:

1. (secara umum): tuturan, percakapan, diskusi;
2. penyajian diskursif sederet pemikiran dengan menggunakan serangkaian pernyataan;
3. serangkaian pernyataan, ujaran, sederet pernyataan;
4. bentuk rangkaian pernyataan atau ungkapan: dapat berupa wacana imiah, puitis, dan religi;

5. perilaku yang diatur kaidah yang mengiringi ke arah lahirnya serangkaian atau sistem pernyataan-pernyataan yang saling terkait;
6. bahasa sebagai sesuatu yang dipraktikkan: bahasa tutur;
7. bahasa sebagai suatu totalitas: seluruh bidang linguistik;
8. mendiskusikan dan mempertanyakan kriteria validitas dengan tujuan menghasilkan konsesus di antara peserta wacana.

Penjelasan Vass di atas mengindikasikan bahwa kajian wacana dapat di lihat dari seluruh lingkup linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan ditunjang oleh situasi pemakaian dalam masyarakat. Selain itu kajian wacana juga terkait dengan konteks yang melingkupinya, baik dalam bentuk lisan (tuturan) maupun tulisan.

Semua definisi wacana yang diungkapkan oleh para ahli di atas setidaknya-tidaknya memberikan tiga kesimpulan mendasar: 1) dalam kaitannya dengan linguistik atau kebahasaan, wacana adalah tataran tertinggi, terbesar, dan terlengkap; 2) wacana memiliki unsur kohesi dan koherensi

di dalamnya; 3) wacana adalah bagian dari proses komunikasi, dan 4) wacana adalah salah satu produksi bahasa yang dapat diungkapkan melalui ragam lisan dan tulisan.

2. Analisis Wacana

Yule (2006: 143) mengatakan analisis wacana merupakan kajian atau penyelidikan tentang ruang lingkup yang jauh lebih luas dari bentuk dan fungsi dari apa yang dikatakan dan dituliskan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa analisis wacana akan mengaji bahasa secara lengkap dan luas. Hal ini berarti analisis wacana tidak hanya mengaji bahasa berdasarkan teks tetapi juga konteks yang melingkupinya.

Kartomihardjo dalam Wijana dan Rohmadi (2010: 71) mengatakan bahwa analisis wacana merupakan cabang ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat, menggunakan metode yang menginterpretasikan ujaran yang sama dengan menghubungkannya pada konteks tempat terjadinya ujaran, orang-orang yang terlibat dalam interaksi, pengetahuan umum, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku di tempat

tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut analisis wacana akan melihat proses berbahasa yang didasarkan pada pendekatan pragmatik.

Wahab dalam Rusminto (2012: 5) mengemukakan bahwa analisis wacana adalah kegiatan analisis bahasa dalam penggunaan yang sebenarnya. Pendapat dia menunjukkan bahwa proses analisis wacana adalah proses untuk memahami tujuan penggunaan bahasa, memahaminya secara tepat dan sesuai sasaran. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Stubbs. Stubbs dalam Darma (2013: 15) mengemukakan analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa secara alamiah, baik dalam bentuk lisan dan tulisan.

Pada dasarnya, analisis wacana adalah kegiatan untuk memahami wacana secara komprehensif dan representatif. Komprehensif berarti bahwa wacana harus dipahami secara tepat dan sesuai sasaran, dan representatif berarti bahwa wacana yang diproduksi harus mewakili tujuan dari pemroduksian wacana tersebut. Wacana adalah bagian dari proses komunikasi yang dapat diungkapkan melalui ragam lisan dan tulisan. Proses komunikasi mensyaratkan

pemahaman oleh pelaku komunikasi sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai. Pada kenyataannya, perkembangan produksi bahasa semakin pesat, kompleks, dan meluas sehingga menimbulkan beberapa kekeliruan dalam memahami komunikasi yang telah dibangun dalam suatu percakapan atau dialog.

Di samping terjadinya perkembangan produksi bahasa yang begitu cepat, adanya perbedaan pengetahuan dan kemampuan kebahasaan juga memengaruhi terjadinya kekeliruan tersebut. Dalam kasus ini, meskipun tujuan analisis wacana tidak hanya untuk memelajari dan memahami bahasa lebih mendalam, analisis wacana adalah alternatif solusi untuk meminimalisasi terjadinya kekeliruan dan memfasilitasi berbagai pembuat kebijakan bahasa dalam mengimplementasikan kebijakan bahasa.

Eriyanto (2008: 4) mengatakan bahwa analisis wacana berhubungan dengan studi mengenali bahasa/ pemakaian bahasa. Brown dan Yule dalam Rusminto (2012: 6) mengemukakan bahwa analisis wacana merupakan kajian bahasa yang dilakukan untuk mengamati bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi,

khususnya bagaimana para pembicara menyusun pesan linguistik untuk kawan bicara dan bagaimana kawan bicara menggarap pesan linguistik untuk ditafsirkan. Pendapat dia didukung oleh Kartomiharjo, Kartomiharjo dalam Darma (2013: 15) mengungkap bahwa analisis wacana merupakan cabang ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar dari pada kalimat.

Sementara itu, Syamsudin memaparkan analisis wacana menjadi beberapa bagian. Syamsudin dalam Darma (2013: 15 – 16) mengemukakan analisis wacana adalah sebagai berikut: a) analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat (*rule of use-* menurut Widdowson); 2) analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi (Firth); 3) analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik (Beller); 4) Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa (*what is said from what is done-* menurut Labov); 5) Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional (*functional use of language-* menurut Coulthard).

Van Dijk (1985: 4) mengatakan bahwa *the discourse analysis has levels and dimentions. These levels and dimentions makes the analysis become wide, from structural description to functional analysis.* Pernyataan Van Dijk berarti bahwa analisis wacana memunyai tingkatan-tingkatan dan dimensi-dimensi. Tingkatan dan dimensi tersebut membuat proses analisis tersebut menjadi lebih meluas, dari analisis tingkatan deskripsi struktur menjadi analisis fungsional. Pandangan ini menegaskan bahwa wacana tidak hanya dipandang sebagai teks semata, sebagai hasil produksi bahasa tetapi juga sebagai objek yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu.

3. Analisis Wacana Kritis

Fairclough (2013: 15) menjelaskan bahwa *the critical discourse analysis (CDA) is not just analysis of discourse, it is part of some form of systematic transdisciplinary analysis of relation between discourse and other element of the social process. It is not just general commentary on discourse, it includes some form of systematic analysis of teks. It is not just descriptive, it is also not normative.* Hal ini berarti bahwa analisis wacana kritis tidak hanya sekedar analisis teks semata, tetapi juga analisis bentuk-bentuk sistematis dari hubungan antar elemen-elemen pada

proses sosial. Analisis wacana kritis bukanlah aktivitas yang hanya berupa pemberian komentar pada wacana, analisis wacana kritis juga melibatkan analisis sistematis dari teks (tidak hanya deskriptif tetapi juga naratif).

Analisis wacana secara umum bertujuan untuk memahami wacana secara komprehensif dan representatif, namun, pada kenyataannya implementasi dan produksi wacana semakin kompleks dan variatif. Wacana saat ini tidak hanya dipandang sebagai teks semata. Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto (2008: 7) mengatakan bahwa wacana adalah pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan—sebagai bentuk dari praktik sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa wacana telah diimplementasikan lebih kompleks dan variatif, dipandang sebagai praktik, bukan teks semata. Wacana jenis seperti ini disebut sebagai wacana kritis.

Eriyanto (2008: 7–13) membagi karakteristik wacana kritis menjadi lima karakteristik. Kelima karakteristik tersebut adalah tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Tindakan berarti bahwa wacana diproduksi sebagai tindakan yang memiliki tujuan-tujuan tertentu: membujuk, mengkritik, menolak, atau mengajak, dan wacana diproduksi atas

kesadaran pemproduksi wacana. Konteks berarti bahwa wacana diproduksi dengan dipengaruhi konteks: untuk siapa wacana itu diproduksi, lingkungan apa saja yang memengaruhi wacana, dan dimana wacana itu diproduksi. Historis berarti bahwa produksi wacana tidak akan terlepas dari rentang waktu diproduksinya wacana. Faktor historis dapat memengaruhi konten wacana yang diproduksi. Pada karakteristik kekuasaan, wacana dipandang sebagai alat dari kekuasaan: untuk memperluas cakupan kekuasaan, menyudutkan kekuatan lawan, dan alat untuk mengimplementasikan kebijakan penguasa sedangkan karakteristik ideologi berkaitan dengan keyakinan atau paham-paham, yang biasanya muncul dari kaum minoritas. Wacana digunakan sebagai alat untuk mempropagandakan suatu keyakinan atau paham tertentu dan membuat kaum minoritas diterima oleh khalayak ramai.

Darma (2013: 49) mengemukakan bahwa “analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya memunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkannya.”

Wijana dan Rohmadi (2010: 72) mengungkapkan analisis wacana kritis selalu mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, dan kondisi. Latar, situasi, dan kondisi akan melibatkan *siapa* yang mengkomunikasikan dengan *siapa* dan *mengapa*; dalam *jenis khalayak* dan *situasi apa*; melalui *medium apa*; *bagaimana perbedaan tipe* perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis wacana kritis adalah upaya atau kegiatan untuk memahami wacana lebih mendalam, tidak hanya memandang wacana sebagai teks semata. Dalam analisis wacana kritis, wacana dipandang sebagai praktik sosial, yang pemroduksiannya memiliki tujuan atau maksud tertentu. Analisis wacana kritis setidaknya memandang wacana sebagai objek berdimensi yang terdiri atas tiga unsur: teks, kognisi sosial dan konteks.

BAB III

ANALISIS WACANA KRITIS VAN DIJK

Van Dijk (2011:3) memaparkan beberapa anggapan/karakteristik mengenai wacana: wacana sebagai interaksi sosial, wacana sebagai kekuasaan dan dominasi, wacana sebagai komunikasi, wacana sebagai situasi kontekstual, wacana sebagai semiotik sosial, wacana sebagai bahasa murni, wacana sebagai pembentuk lapisan dan kompleksitas. Anggapan inilah yang menjadi asumsi mendasar dalam melakukan analisis wacana kritis.

Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para ahli, model van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Hal ini karena van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga dapat didayagunakan dan dipakai secara praktis. Dimensi dalam model van Dijk digambarkan dalam tiga dimensi: teks, konteks, dan kognisi sosial.

1. Teks

Van Dijk dalam Eriyanto (2008: 225) mengatakan bahwa teks terdiri atas beberapa tingkatan (struktur) yang saling melengkapi. Dia menyatakan bahwa terdapat tiga tingkatan yang terdapat dalam suatu wacana. Tingkatan yang pertama adalah struktur makro. Struktur makro adalah struktur atau bagian global dari suatu teks, pandangan umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang ditekankan dalam suatu teks.

Tingkatan selanjutnya adalah superstruktur, terkait dengan kerangka suatu teks, superstruktur adalah tingkatan yang menggambarkan bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Selanjutnya, struktur mikro adalah wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks yakni, kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar.

Dalam analisis wacana kritis milik Van Dijk, setiap kata, frase, klausa, dan kalimat serta gaya penyusunannya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari cara berkomunikasi tetapi juga dipandang sebagai politik komunikasi.

Menurut Van Dijk dalam Eriyanto (2008:226), ketiga elemen yang memiliki ruang yang berbeda-beda di atas merupakan tiga elemen yang merupakan satu kesatuan. Teks merupakan suatu objek yang memiliki skema tertentu. Dengan menggunakan skema ini, teks dapat dianalisis secara lengkap, tidak hanya berfokus pada struktur internal seperti kata, kalimat, dan paragraf saja. Struktur teks, dalam konteks ini, terdiri atas tiga bagian: struktur mikro, superstruktur, dan struktur mikro.

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN
Struktur Makro	Tema	Topik
Superstruktur	Skema	Skema
Struktur Mikro	Semantik	Latar, detil, maksud, pra anggapan, nominalisasi
Struktur Mikro	Sintaksis	Bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti
Struktur Mikro	Stilistik	Leksikon
Struktur Mikro	Retoris	Grafis atau Ekspresi, Metafora

a. Tema

Tema adalah ruang yang melingkupi keseluruhan teks. Tema merupakan gagasan inti, ringkasan, atau hal-hal yang paling ditegaskan dalam suatu teks. Tema sangat dekat kaitannya dengan topik. Topik merupakan gambaran umum mengenai keseluruhan, suatu objek yang ingin digambarkan oleh pewacana dalam wacananya.

Salah satu kekhasan Van Dijk adalah teks tidak hanya dipandang sebagai pencerminan pandangan atau topik tertentu, tetapi suatu pandangan yang koheren. Topik merupakan batas-batas yang digunakan oleh pewacana untuk menyusun teksnya. Topik akan didukung oleh subtopik-subtopik, disertai fakta yang mendukung keberadaan topik umum. Melalui keberadaan topik umum, wacana yang dianalisis benar-benar dapat menggambarkan bagaimana wacana disusun, ditampilkan, dan dikonsumsi. Misalnya ada sebuah teks dengan tema demonstrasi mahasiswa berlangsung secara brutal. Subtema/subtopik dari teks tersebut adalah mahasiswa melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan, mahasiswa membawa peralatan yang membahayakan, mahasiswa melakukan pembakaran ban dan seterusnya.

Tema umum	Demonstrasi mahasiswa berlangsung secara brutal
Subtema	<ol style="list-style-type: none"> 1. mahasiswa melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan 2. mahasiswa membawa peralatan yang membahayakan 3. mahasiswa melakukan pembakaran ban

b. Skema

Skema, secara singkat, diartikan sebagai alur. Dalam teks, alur adalah susunan yang membentuk teks secara utuh. Alur erat kaitannya dengan bagaimana seorang menyusun tulisannya, dan membawa pembacanya pada tiap detail. Tidak hanya diartikan sebagai alur atau susunan, skema juga diartikan sebagai bagian-bagian dalam teks yang mendukung setiap komponen di dalamnya.

Pada suatu berita, secara umum, terdapat dua kategori skema: *summary* (ringkasan) dan *story* (cerita). *Summary*/ringkasan terdiri atas dua elemen: judul dan lead. Judul adalah tulisan singkat tentang isi/gambaran berita sedangkan lead adalah pengantar ringkasan. Kategori kedua adalah *story*/cerita. cerita adalah isi berita secara keseluruhan. Dalam konteks ini, isi berita memiliki dua bagian: situasi

(jalannya peristiwa) dan komentar (yang ditampilkan dalam tulisan).

Skema juga merupakan tata letak penulisan informasi oleh pembuat wacana. Dengan adanya skema pembuat wacana akan menampilkan informasi yang menguntungkan dibagian awal. Misalnya ketika pembuat wacana ingin menyampaikan informasi terkait prosedur sertifikasi, maka informasi terkait bagaimana prosedur sertifikasi akan diletakan diawal sehingga tulisan yang dibuatnya akan terfokus pada bagaimana prosedural sertifikasi.

Skema	
<i>Summary</i>	Judul: Prosedur sertifikasi yang rumit
	Lead: Apa itu setifikasi, bagaimana prosedurnya
<i>Story</i>	Situasi: 1. Prosedur sertifikasi 2. Ketentuan untuk memperoleh sertifikasi 3. Kehadiran guru bersertifikasi
	Komentar: sebaiknya prosedur sertifikasi dikembalikan seperti dahulu sehingga tidak rumit

c. Latar

Latar merupakan motivasi, hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk menuliskan tulisannya. Latar akan menentukan bagaimana pandangan khalayak akan dibawa. Latar dapat juga menjadi pembenar gagasan yang ingin ditekankan dalam suatu teks. Oleh karena itu, latar dapat menjadi pertimbangan dalam menacaritahu maksud yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis.

Latar yang ditampilkan dan bagaimana latar itu ditampilkan sangat terkait dengan tujuan penulisan suatu teks. Misalnya, latar peristiwa, terkait dengan arah yang ingin dibangun dan memengaruhi khalayak. Latar merupakan dasar yang diambil oleh penulis, secara individual dan sosial, untuk membangun suatu opini.

Bagi pembuat wacana yang setuju akan demonstrasi yang dilakukan buruh, latar yang digunakan adalah keberhasilan buruh dalam melakukan perubahan. Sebaliknya jika pembuat wacana tidak setuju dengan apa yang dilakukan buruh, latar yang digunakan adalah penjabaran terkait hal-hal merugikan terkait demonstrasi yang dilakukan buruh.

Tanpa latar	Buruh melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR.
Latar	Buruh melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR. Gerakan buruh ini merupakan bentuk protes terhadap gaji yang tak kunjung naik. Buruh yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah berupaya memperjuangkan haknya agar tidak semakin menderita.
Latar	Buruh melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR. Aksi yang dilakukan buruh ini membuat jalanan menjadi macet sehingga banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas mereka.

d. Detil

Dalam suatu teks, terdapat batasan-batasan berupa informasi yang dijadikan dasar pengembangan suatu teks. Batasan-batasan tersebut berupa detil, kontrol informasi yang ingin ditampilkan. Detil biasanya terkait dengan kecenderungan penulis teks, penulis teks akan menampilkan hal-hal atau detil beragam dan tegas jika detil tersebut menguntungkan dirinya dan mendukung opini-opini (komentar) yang disampaikannya.

Sebaliknya, penulis suatu teks cenderung menghaluskan atau bahkan menyembunyikan hal-hal atau detil informasi yang

tidak memihak kepadanya. Bahkan, detil dapat berupa bantahan terhadap pihak oposisi. Dalam detil, terdapat elemen yang digunakan sebagai strategi untuk mengekspresikan sikap secara implisit. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis detil, setiap masalah yang diangkat harus dipandang dari keseluruhan dimensi, tidak satu dimensi saja.

Detil merupakan strategi bagaimana pembuat wacana mengekspresikan sikapnya secara implisit. Detil akan menjelaskan fenomena secara lengkap dan jelas. Misalnya pembuat wacana memaparkan teks mengenai demonstrasi mahasiswa menentang RUU berlangsung ricuh. Detil yang dipaparkan adalah terjadi bentrok antara mahasiswa dan aparat, mahasiswa membawa ketapel, kayu dan bom molotov kemudian melemparkannya ke pihak aparat dan seterusnya.

Tanpa detil	Mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menentang RUU. Demonstrasi tersebut awalnya berjalan tertib namun lama-kelamaan menjadi ricuh.
Detil	Mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menentang RUU. Demonstrasi tersebut awalnya berjalan tertib namun lama-kelamaan menjadi ricuh. Terjadi bentrok

	anatar mahasiswa dengan aparat kepolisian. Mahasiswa membawa ketapel, kayu, dan bom molotov untuk menyerang pihak aparat.
--	---

e. Maksud

Seperti yang telah disampaikan pada penjelasan di atas, penulis teks memiliki kecenderungan ketika menulis, kecenderungan ini sebenarnya merupakan maksud, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam tulisannya. Maksud dalam suatu teks dapat dianalisis melalui bagaimana cara penulis menyampaikan tulisannya. Informasi yang menguntungkan dan memihak akan dijabarkan secara eksplisit dan tegas, sedangkan informasi yang merugikan akan disamarkan atau bahkan dibantah menggunakan fakta-fakta dan opini berlawanan.

Maksud terkait erat dengan sisi implisit dan eksplisit. Untuk melakukan analisis maksud, suatu teks harus dipandang secara implisit dan eksplisit. Melalui cara ini, maksud penulis yang disampaikan dalam teksnya dapat terlihat secara jelas.

f. Praanggapan

Elemen wacana praanggapan adalah elemen wacana yang digunakan untuk mendukung suatu fakta atau pendapat menggunakan fakta lain, yang terjadi sebagai akibat dari anggapan atau pernyataan sebelumnya. Praanggapan adalah stimulus yang diberikan oleh penulis kepada pembacanya. Stimulus ini dapat menimbulkan penguatan dan perluasan ketercapaian makna. Elemen praanggapan menjadi bagian dari analisis wacana kritis karena berkaitan langsung dengan kekuatan teks sebagai pemberi informasi.

Tanpa praanggapan	Pemerintah mengusulkan menaikkan harga BBM
Praanggapan	Pemerintah mengusulkan menaikkan harga BBM. Kalau usulnya diterima, rakyat pasti akan unjuk rasa.

g. Nominalisasi

Nominalisasi merupakan proses perubahan kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya dilakukan dengan memberikan imbuhan 'pe-an'. Nominalisasi dapat menghilangkan subjek dalam suatu wacana (Karomani, 2008:73). Melalui strategi ini pembuat wacana dapat menghilangkan subjek dengan menggunakan nominalisasi

jika informasi itu menguntungkan. Misalnya kata ‘menembak’, dalam sebuah kalimat, kata ‘menembak; selalu memerlukan subjek siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal tersebut harus ada dalam kalimat agar memunyai arti. Sebaliknya, kata benda tidak memerlukan subjek karena ia hadir mandiri dalam sebuah kalimat. Kata ‘penembakan’ tidak memerlukan kehadiran subjek.

Verba	Polisi menembak seorang mahasiswa yang sedang berdemo di depan gedung DPR/MPR
Nominalisasi	Seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi di depan gedung DPR/MPR

h. Peningkaran

Van Dijk dalam Eriyanto (2008:249) mengatakan elemen wacana peningkaran adalah bentuk praktik wacana yang menggambarkan bagaimana penulis menyembunyikan apa yang ingin diekspresikan secara implisit. Dapat dikatakan bahwa peningkaran merupakan bentuk strategi dari penulis untuk tidak secara langsung memberikan pendapatnya. Hal yang disembunyikan oleh penulis seolah menyetujui pendapat, padahal yang diingnkannya adalah hal sebaliknya.

Melalui pengingkaran, analisis akan melihat bagaimana sikap penulis yang sebenarnya. Pengingkaran dalam wacana akan menggunakan kata ‘tetapi’. Contoh: pertambangan di Indonesia saat ini sedang terjatuh, tetapi suatu saat dapat jaya kembali. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat pengingkaran.

Tanpa pengingkaran	pertambangan di Indonesia saat ini sedang terjatuh.
Pengingkaran	pertambangan di Indonesia saat ini sedang terjatuh, tetapi suatu saat dapat jaya kembali.

i. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas (Eriyanto, 2008: 251). Bentuk kalimat akan terkait dengan susunan penempatan subjek dan predikat. Subjek merupakan posisi sentral dalam sebuah kalimat, penempatan subjek akan membuat penafsiran kalimat terfokus pada posisi subjek tersebut. Struktur kalimat dapat dibuat secara aktif atau pasif. Hal ini bergantung pada titik tekan yang ingin disampaikan oleh penulis sehingga ini akan menjadi alasan penentuan subjek dalam kalimat.

Aktif	Aparat melakukan pembantaian terhadap mahasiswa
Pasif	Mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi dibantai oleh aparat

j. Koherensi

Koherensi merupakan kepaduan makna. Kepaduan makna tersusun melalui jalinan kata antarkata, kalimat antarkalimat, dan paragraf antarparagraf. Koherensi menjadi salah satu elemen yang dianalisis dalam teks karena koherensi berkaitan dengan bagaimana suatu teks dihubungkan atau dipisahkan.

Keputusan untuk menghubungkan atau memisahkan sepenuhnya berada pada penulis teks. Penghubungan antara dua elemen yang sebenarnya berbeda mungkin saja dilakukan guna memenuhi maksud-maksud tertentu. Koherensi merupakan bagian dari kecenderungan penulis, erat kaitannya dengan maksud. Elemen koherensi biasanya menggunakan kata hubung 'dan' dan kata hubung 'akibat'. Misalnya dalam kalimat 'demonstrasi yang dilakukan warga' dan kalimat 'nilai tukar rupiah melemah'. Kedua kalimat ini akan berhubungan ketika digunakan kata hubung akibat.

Kedua kalimat tersebut menjadi demonstrasi yang dilakukan warga mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Kedua kalimat tersebut tidak akan berhubungan ketika menggunakan kata hubung 'dan'.

Kata hubung 'dan'	Demonstrasi yang dilakukan warga banyak terjadi dan nilai tukar rupiah melemah. Warga masyarakat turun ke jalan untuk berdemo. Tadi siang nilai tukar rupiah melemah.
Kata hubung 'akibat'	Banyaknya demonstrasi yang dilakukan warga masyarakat mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Kemarin nilai tukar rupiah melemah sampai 14.000 per US\$.

k. Koherensi Kondisional

Koherensi kondisional ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Sebagai penjelas, keberadaan anak kalimat tidak memengaruhi arti yang disampaikan oleh kalimat. Keberadaan anak kalimat mengindikasikan bahwa penulis teks tersebut mencurahkan gagasan yang lebih pada detail-detail atau elemen informasi yang ingin disampaikannya.

Koherensi kondisional biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan wartawan untuk menekankan suatu informasi, membangun pemahaman dengan pembaca, dan membentuk suatu pandangan.

Selain itu, penjelas atau anak kalimat mampu membentuk pandangan positif dan negatif ketika kalimat penjelas berupa penjelas positif dan negatif. Misalnya sebuah kalimat: Indonesia yang selalu kalah dalam pertandingan sepakbola tidak masuk dalam piala dunia. Kalimat ‘yang selalu kalah dalam pertandingan sepakbola merupakan kalimat penjelas.

Tanpa koherensi kondisional	Indonesia tidak masuk piala dunia.
Koherensi kondisional	Indonesia yang selalu kalah dalam pertandingan sepakbola, tidak masuk dalam piala dunia.

1. Koherensi Pembeda

Koherensi pembeda digunakan untuk memperjelas dan menekankan bagaimana dua peristiwa atau fakta dibedakan. Dua peristiwa dapat disusun dan dibentuk seolah-olah saling bertentangan. Dampak dari penggunaan koherensi berbeda sangat bervariasi. Melalui koherensi pembeda, analisis dapat

menggambarkan bagian mana yang dibandingkan dan cara apa yang digunakan penulis untuk melakukan perbandingan.

Koherensi pembeda akan membedakan dua informasi yang berbeda. Contohnya: dibanding pemerintahan Soeharto, kebebasan pers di era SBY mengalami peningkatan. Contoh kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang di dalamnya mengandung koherensi pembeda, di dalamnya membedakan dua informasi.

Tanpa koherensi pembeda	Pada masa Soeharto kebebasan pers dibatasi.
Koherensi pembeda	Dibanding pemerintahan Soeharto, kebebasan pers di era SBY mengalami peningkatan.

m. Kata Ganti

Kata ganti merupakan alat yang dipakai oleh penulis untuk menunjukkan dimana posisinya. Kata ganti digunakan dalam mengungkapkan sikapnya. Kata ganti 'saya' atau 'kami' merupakan sikap resmi dari seorang penulis. Akan tetapi, ketika memakai kata ganti 'kita', penulis berupa untuk menjadikan sikap tersebut sebagai sikap bersama antara

penulis dan pembacanya. Pemakaian kata ganti 'kita' atau 'kami' akan menumbuhkan solidaritas, aliansi, dan perhatian publik.

Kata ganti 'saya'	Saya menginginkan prosedur sertifikasi diubah
Kata ganti 'kita'	Kita menginginkan prosedur sertifikasi diubah
Kata ganti 'kami'	Kami menginginkan prosedur sertifikasi diubah
Kata ganti 'mereka'	Mereka menginginkan prosedur sertifikasi diubah

n. Leksikon

Leksikon terkait dengan bagaimana seseorang memilih kata dari berbagai kemungkinan kata yang dapat digunakan. Kata 'melakukan kekerasan' dapat diganti dengan menggunakan kata lain seperti membantai, membunuh, mengeroyok, dan sebagainya. Pemilihan kata akan menimbulkan nilai rasa yang berbeda. Pilihan kata yang dipakai akan menunjukkan sikap dan ideologi tertentu.

Gerombolan mahasiswa melempari aparat dengan bom molotov
--

Kelompok mahasiswa melempari aparat dengan bom molotov
--

Rombongan mahasiswa melempari aparat dengan bom molotov

o. Grafis

Grafis erat kaitannya dengan penggunaan unsur pendukung teks. Grafis biasanya digunakan sebagai pembeda teks, penguatan kata-kata tertentu, mengarahkan pada pertanyaan, dan pemberian ilustrasi yang menguatkan isi teks. Grafis juga dapat mengandung maksud, baik implisit maupun eksplisit. Grafis adalah cara efektif untuk mendukung gagasan atau bagian-bagian tertentu yang ingin ditekankan dalam teks.

p. Metafora

Winarto (2007: 22) mengatakan bahwa metafora adalah tulang punggung dalam penulisan ilmu sosial yang berfungsi menyangga beban, memungkinkan gerakan, serta mempertautkan bagian-bagian secara bersama-saa untuk membangun keseluruhan yang koheren dan fungsional. Ia menambahkan bahwa metafora berada pada tingkat konsep

dan penilaian mengenai nilai kebenaran dari teks ilmu sosial. Metafora tidak berhenti ditingkat filosofis, tetapi memasuki tiap tingkatan nalar ilmiah sosial.

Metafora sering digunakan oleh penulis agar teks terlihat menarik untuk dibaca. Penggunaan metafora ternyata tidak hanya sebagai pendukung nilai kemenarikan tulisan, metafora bahkan bisa menjadi petunjuk utama untuk memahami makna teks.

2. Konteks

Wacana kritis dipandang sebagai praktik sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa wacana sangat berperan pada lingkup sosial. Wacana bergerak dan berkembang sebagai alat pemicu fenomena-fenomena sosial. Yuwono (2008: 1 – 2) mengatakan bahwa analisis wacana kritis membagi premis-premis yang lebih bersifat sosial. Junaiyah dan Arifin (2013: 15) mengatakan bahwa suatu wacana memiliki aspek-aspek yang memengaruhinya: hubungan antara memproduksi wacana dan penerima wacana, peristiwa yang melatarinya, dan bentuk interaksi tertentu. Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan konteks dari suatu wacana.

Konteks dalam analisis wacana kritis, diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis melalui konteks tertentu. Oleh karena itu, konteks merupakan bagian dari elemen yang akan dianalisis dalam wacana kritis. Melalui konteks, hal-hal yang memengaruhi pewacana dalam memproduksi wacana akan tergambar secara jelas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Van Dijk (1992: 228) yang mengatakan bahwa konteks adalah sesuatu yang melingkupi teks sehingga teks tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

Menurut Cook, analisis wacana juga mengaitkan konteks dari komunikasi: siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dan perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak. Tiga hal sentralnya adalah teks, konteks, dan wacana. Teks, dalam hal ini, adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi semua jenis ekspresi komunikasi. Konteks memasukan semua jenis situasi dan hal yang berada diluar teks dan memengaruhi pemakaian bahasa, situasi dimana teks itu diproduksi serta

fungsi yang dimaksudkan. Wacana dimaknai sebagai konteks dan teks secara bersama. Titik perhatiannya adalah analisis wacana menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam proses komunikasi. Berdasar pada titik tolak dari analisis wacana, bahasa tidak bisa dimengerti sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, bukan suatu objek yang diisolasi dalam ruang tertutup. Bahasa, dalam analisis wacana kritis, dipahami dalam konteks secara keseluruhan.

Terdapat beberapa konteks penting yang berpengaruh pada produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Misalnya, seseorang berbicara dalam pandangan tertentu karena ia laki-laki, atau karena ia berpendidikan. Kedua, *setting* sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Misalnya, pembicaraan di tempat kuliah berbeda dengan di jalan. *Setting*, seperti tempat itu privat atau publik, dalam suasana formal atau informal, atau pada ruang tertentu memberikan wacana tertentu pula.

Berbicara di ruang kelas berbeda dengan berbicara di rumah dan juga di pasar, karena situasi sosial atau aturan yang melingkupinya berbeda, menyebabkan partisipan komunikasi harus menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Oleh karena itu, wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya.

3. Kognisi Sosial

Analisis wacana kritis yang disampaikan oleh Van Dijk yang ketiga adalah kognisi sosial, kognisi sosial merupakan proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari penulis (pembuat wacana). Analisis terhadap kognisi pembuat wacana dalam proses pembentukan wacana juga melibatkan analisis kebahasaan secara mendalam untuk membongkar relasi kuasa dan dominasi yang diproduksi pada wacana. Analisis kognisi sosial dilakukan melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada pembuat wacana sehingga hasilnya akan lebih memperjelas bagaimana wacana diproduksi dan konteks apa yang memengaruhinya.

Menurut Van Dijk, struktur wacana menunjukkan dan menandakan adanya sejumlah makna, pendapat, dan

ideologi. Oleh karena itu, analisis wacana tidak hanya dibatasi pada struktur teks. Pendekatan kognitif berdasar pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, dan makna diberikan oleh kesadaran mental pengguna bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap teks dihasilkan melalui kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa.

Kognisi sosial atau kemampuan untuk memproduksi suatu wacana terkait erat dengan struktur mental. Setiap wacana diproduksi melalui skema atau model yang memengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu objek. Dalam skema tersebut, pewacana akan melakukan seleksi dan proses informasi yang datang dari pengalaman dan sosialisasi. Dalam analisis wacana kritis, skema inilah yang akan menjadi fokus, terkait bagaimana suatu wacana diproduksi oleh pewacana.

BAB IV ANALISIS WACANA KRITIS DALAM SITUS KOMPASIANA.COM

Eriyanto (2002: 19) menuliskan bahwa fakta atau peristiwa yang terdapat dalam sebuah media massa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, relitas itu bersifat subjektif sehingga informasi atau berita yang disampaikan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektivitas. Hamad (2004: 15) juga menegaskan bahwa media massa adalah alat konstruksi realitas. Hal ini berarti bahwa media massa merupakan alat yang dapat digunakan untuk membentuk opini masyarakat.

Hal senada disampaikan oleh Sudiby (2001:7) yang mengatakan bahwa apa yang disajikan media adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam: faktor individual, rutinitas media, organisasi, dan ekstramedia. Media massa berjenis siber seperti *Kompasiana* adalah media massa yang melibatkan penulis dari latar belakang, kelas sosial, tingkat

pendidikan, dan ideologi yang berbeda-beda. Hal ini tentunya dapat memengaruhi apa yang ingin Kompasianer sampaikan.

Dalam situs Wikipedia, *Kompasiana* diartikan sebagai blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga (*citizen media*). *Kompasiana* memfasilitasi setiap orang untuk mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. *Kompasiana* adalah situs yang menerima beragam konten dari seluruh lapisan masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang, pendidikan, hobi, dan pekerjaan.

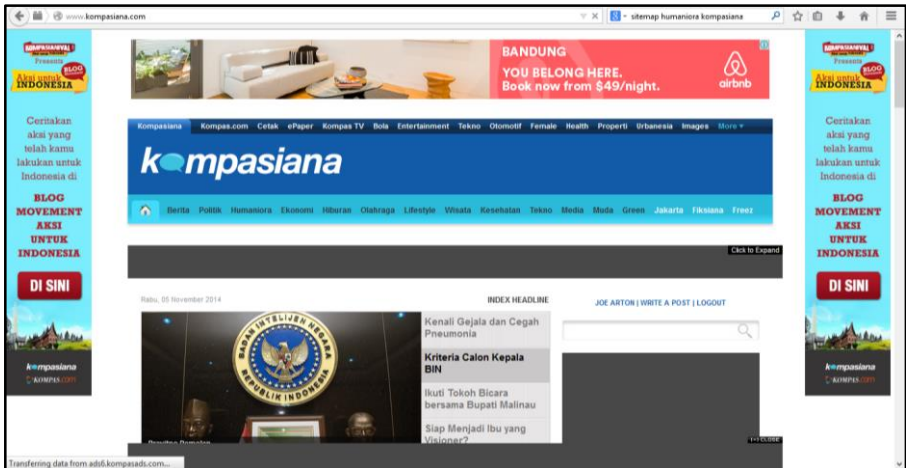
Nama *Kompasiana* muncul dari ide seorang wartawan senior Kompas yang bernama Budiarto Shambazy. Pada awal berdirinya, *Kompasiana* dapat disebut sebagai media belajar bagi jurnalistik Kompas: belajar menulis, membuat *blog*, memberitakan liputan, dan menyampaikan pendapat atau pandangan melalui media *online*. Berdasarkan jenisnya, *Kompasiana* dikategorikan sebagai situs berita atau *blog (social blog)*. Di dalam situs ini, Kompasianer dapat menuliskan

banyak jenis tulisan: berita, pandangan, puisi, dan bahkan cerpen.

Kompasiana memiliki kanal atau kategori konten yang membuat konten tersusun secara rapi berdasarkan kategorinya. Selain itu, *Kompasiana* juga memfasilitasi penggunaannya untuk melakukan pencarian tulisan sehingga pengguna dapat menemukan berita sesuai keinginan. Kategori konten yang terdapat pada situs *Kompasiana* adalah berita, politik, humaniora, ekonomi, hiburan, olahraga, gaya hidup, wisata, kesehatan, tekno, media, muda, dan *green*. Selain kategori konten, *Kompasiana* juga memiliki sub kategori konten yang merupakan cabang dari kategori konten.

Wacana bertema pendidikan pada situs *Kompasiana* dapat ditemukan pada ketegori Humaniora dan terkadang Politik. Subkategori pendidikan berada pada kategori Humaniora dengan nama sub kategori "Edukasi". Sub kategori ini dapat diakses melalui domain: <http://edukasi.kompasiana.com/>. Pada sub kategori Edukasi, Kompasianer menuliskan banyak wacana bertema pendidikan. Dalam hal ini, Wacana bertema

pendidikan yang menjadi bahasan Kompasianer biasanya adalah mengenai perkembangan dan kebijakan pendidikan.



Gambar 1: Tampilan awal Kompasiana

Sebagai *social blog*, *Kompasiana* tidak hanya memfasilitasi Kompasianer untuk menulis dan mempublikasikan tulisannya, tetapi juga memfasilitasi Kompasianer untuk berinteraksi dan saling memberikan komentar. Tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan pada situs *Kompasiana* dapat ditanggapi melalui komentar sehingga Kompasianer dapat saling berdiskusi dan berbagi informasi.

BAB V

IMPLEMENTASI ANALISIS WACANA KRITIS VAN DJIK DALAM WACANA BERTEMA SERTIFIKASI GURU

Aspek yang akan dibahas meliputi aspek teks, konteks, dan kognisi sosial. Kajian dalam aspek teks terdiri atas tema, skema, latar, detil, maksud, nominalisasi, koherensi, koherensi kondisional, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, praanggapan, grafis, dan metafora. Selanjutnya memberdayakan konteks. Konteks dalam analisis wacana kritis, diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Terakhir, menganalisis bagaimana suatu teks diproduksi. Kognisi sosial dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai hubungan lebih jauh terkait struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Perhatikan wacana bertema sertifikasi di bawah ini.

Wacana 1a

Sertifikasi Guru: Prosedur Rumit, namun Dianggap dan Dipahami Mudah

Penulis: Blasius Mengkaka

Sumber: Kompasiana.com

Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit. Melalui serangkaian tahap demi tahap, mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP, mulailah proses Sertifikasi itu. Penilaian demi penilaian terhadap Portofolio guru menghasilkan penentuan lulus atau tidak lulus yang bersumber pada pencapaian nilai berdasarkan penilaian Portofolio yang dikumpulkan guru yang selanjutnya diikuti oleh tahapan penilaian oleh Team Assesor LPMP NTT dalam hal ini Team Penyelenggara Sertifikasi Rayon NTT. Maka beruntunglah bagi guru yang langsung lulus dalam Portofolio itu sebab mereka tidak perlu mengikuti Pendidikan Profesi selama 8 hari di LPMP Propinsi oleh Universitas Penyelenggara Sertifikasi Rayon.

Sedangkan bagi yang belum lulus ialah kelompok guru yang mengantongi nilai di bawah batas minimum untuk lulus. Kelompok guru yang nilai Portofolionya tidak mencapai syarat kelulusan harus mengikuti pendidikan Profesi yang lamanya 8 hari penuh di LPMP Provinsi. Pendidikan profesi diselenggarakan oleh oleh Team Assesor Universitas Penyelenggara Sertifikasi Rayon.

Antara bulan Pebruari- Maret 2008, saya bersama kelompok guru di NTT menjadi salah satu kelompok guru yang mengikuti Pendidikan Profesi atau PPLG di LPMP Propinsi NTT. Kami mengikuti Pendidikan Profesi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru.

Sedangkan bagi para guru yang sudah lulus langsung Portofolio, kelompok guru itu tidak perlu lagi mengikuti tahapan Pendidikan Profesi di LPMP Propinsi NTT, seperti halnya kami ketika itu. Pada bulan Maret 2008, kami lulus Pendidikan Profesi Guru dan selanjutnya bersama kelompok guru yang telah lulus langsung pada Penilaian Portofolio guru, kami menerima Sertifikat Pendidik yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu di Aula SMA Katolik Surya Atambua, NTT, Indonesia. Penantian panjangpun tuntas sudah. Selanjutnya kami harus melampirkan Sertifikat Pendidik itu untuk melamar ke salah satu bagian Dikbud Pusat, untuk selanjutnya mendapatkan SK Dirjen PMPTK tentang besarnya dana Sertifikasi.

Hingga kami menerima SK dari Dirjen PMTK, kami melalui sebuah prosedural yang cukup rumit, berbelit-belit dan penuh kesabaran. Saya bersama kawan-kawan guru yang tamat S1 di bawah tahun 2002, tak mengalami persoalan berarti karena masa kerja dan tahun Ijazah Sarjana memungkinkan proses Sertifikasi itu. Namun ini sangat membebankan bagi para guru yang memiliki masa kerja hingga 20-30 tahun namun mereka belum memiliki Ijazah S1. Pemerintah akhirnya menyetujui proses Sertifikasi itu berlaku juga bagi guru yang belum S1 namun memiliki masa kerja 30 tahun lebih atau telah berumur di

atas 50 tahun. Ada catatan khusus untuk guru-guru demikian yakni bahwa perolehan Sertifikat Pendidik bagi mereka hanyalah sebagai penghormatan atas jasa-jasanya sebagai Pendidik puluhan tahun. Saya pikir ini sebuah kebijaksanaan yang sangat bertoleransi, ada penghargaan bagi seorang guru di balik ijinan untuk proses Sertifikasi itu sendiri.

Sesungguhnya nilai sebuah Sertifikat Pendidik disinyalir sangat tinggi sebab Sertifikat Pendidik itu memiliki nilai yang terus berjalan setiap bulan selama para guru pemilikinya dapat melakukan aktivitas profesi sesuai dengan persyaratannya. Sesungguhnya pula bahwa para pemilik Sertifikasi itu telah menjelma menjadi guru era baru di mana sebelumnya ia dianggap bekerja sebagai guru, namun kini ia berprofesi sebagai guru oleh sertifikat Pendidik itu. Secara hakiki ada perbedaan antara pekerjaan dan profesi.

Pekerjaan lebih kepada pekerjaan kasar atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih besar, sedangkan profesi tidak merupakan Pekerjaan. Profesi berhubungan dengan keprofesionalan, keahlian, tampilan fisik, dll. Dalam hal ini para Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik ialah para profesional yang berkarya dalam gaya baru yang bermartabat dari bentuk karya sebelumnya. Dengan kata lain, ada perubahan baru dalam cara dan penampilannya berkarya.

Namun sayangnya pengharusan untuk bekerja 24 jam/minggu masih menjadi kendala agar para Pendidik itu mampu berprofesi sebaik-baiknya. Jumlah 24 jam masih sangat membebankan, sementara itu banyak guru baru

hasil Pendidikan PTpun setiap tahun mulai diproduksi. Akibatnya ada semacam kelebihan beban mengajar yang menimpah para guru sertifikasi namun ada kehilangan jam-jam mengajar pada para guru muda.

Berbagai persaingan dan kesulitan dalam pemahaman itu mengakibatkan kurangnya pemahaman yang seimbang terhadap kehadiran para guru Sertifikasi pada setiap sekolah. Krisis kepercayaanpun mulai menyeruak. Malahan para guru Sertifikasi telah dinilai kurang bagus bekerja. Inilah pemahaman yang salah yang kemudian berakibat pada ancaman pemberhentian TPP, dan ancaman penundaan pembayaran TPP sebagai akibat dari jumlah guru penerima TPP di Indonesia sangat banyak. Mudah-mudahan makin lama waktu berjalan ada penerimaan terhadap kehadiran para guru Sertifikasi yang diikuti dengan pemahaman yang benar atasnya. Dengan pemahaman yang benar maka muncul penghormatan yang wajar, yang kemudian berimbas pada kelancaran pembayaran TPP. Semoga!

1. Teks

Teks dalam analisis wacana kritis merupakan bentuk kesatuan antara struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Hal yang diamati dalam struktur makro adalah tema/topik, hal yang diamati dalam superstruktur adalah skema sedangkan hal yang diamati dalam struktur mikro adalah latar, detil, maksud, koherensi, koherensi kondisional,

koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, praanggapan, grafis, dan metafora.

a. Tema

Tema dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai suatu gambaran umum dari sebuah teks atau wacana. Tema dapat juga dikatakan gagasan pokok atau inti dari sebuah wacana. Pencarian tema dalam wacana dilakukan dengan membaca wacana secara keseluruhan. Tema dalam sebuah wacana akan didukung oleh subtema-subtema yang bersifat mendukung tema.

Tema Wacana 1a

Tema: Sertifikasi Guru Merupakan Kegiatan Penting namun Berprosedur Rumit

Tema umum dari wacana *1a* adalah serfitikasi guru, dahulu prosesnya mudah sekarang rumit. Tema tersebut menjadi tema yang bersifat umum karena didukung oleh subtema. Subtema yang mendukung tema umum menyatakan tentang bagaimana prosedural sertifikasi yang dahulu sangat mudah namun kini menjadi sangat rumit. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Dahulu proses sertifikasi guru hanya melalui pemberkasaan tanpa melakukan uji kompetensi guru. Namun sekarang proses sertifikasi telah melalui serangkaian yang rumit. Mulai dari mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, dan Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP. Penilaian demi penilaian terhadap Portofolio guru menghasilkan penentuan lulus atau tidak lulus yang bersumber pada pencapaian nilai berdasarkan penilaian Portofolio yang dikumpulkan guru yang selanjutnya diikuti oleh tahapan penilaian oleh Team Assesor LPMP NTT dalam hal ini Team Penyelenggara Sertifikasi Rayon NTT.

Tema	
Tema umum	Sertifikasi Guru Merupakan Kegiatan Penting namun Berprosedur Rumit
Subtema	Bagaimana prosedural sertifikasi yang dahulu sangat mudah namun kini menjadi sangat rumit

b. Skema

Skema merupakan alur yang disusun oleh pembuat wacana sehingga wacana yang ditulisnya memunyai kesatuan arti. Skema dapat juga dikatakan urutan dalam penyampaian ide dari pembuat wacana. Melalui skema, pembuat wacana akan memberikan tekanan bagian mana yang akan didahulukan dan bagian mana yang kemudian digunakan untuk

menyembunyikan informasi penting yang tidak didukungnya. Penyembunyian informasi penting biasanya dilakukan dengan cara menuliskannya di bagian akhir sehingga terkesan kurang menonjol.

Skema Wacana 1a

Skema dalam wacana 1a diawali dengan pemaparan *summary* yang terdiri atas judul dan lead. Judul dalam wacana ini adalah Sertifikasi Guru: Prosedur rumit, namun Dianggap dan Dipahami mudah. Lead dalam wacana ini ditandai dengan pemaparan terkait prosedur sertifikasi yang antara tahun 2007–2010 yang masih relatif mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya pemaparan *story* yang terdiri atas situasi dan komentar. Situasi atau jalannya peristiwa memaparkan hal terkait rumitnya prosedur untuk mendapatkan sertifikasi guru kemudian diikuti pemaparan terkait pengharusan bagi guru bersertifikasi mengajar selama 24 jam/minggu. Kemudian pemaparan komentar oleh pembuat wacana terkait pengharusan guru bersertifikasi mengajar 24 jam/minggu mengakibatkan kurangnya pemahaman yang seimbang terhadap kehadiran guru bersertifikasi pada setiap sekolah.

Penentuan tata letak informasi terkait rumitnya prosedur pengurusan sertifikasi merupakan suatu fenomena yang ingin ditonjolkan oleh pembuat wacana. Oleh karena itu, dia meletakkan informasi terkait rumitnya prosedur sertifikasi di bagian awal. Hal ini bertujuan untuk menjaring opini pembaca agar terfokus pada permasalahan rumitnya prosedur pengurusan sertifikasi guru.

Skema		
<i>Summary</i>	Judul	Prosedur rumit, namun Dianggap dan Dipahami mudah
	Lead	Pemaparan terkait prosedur sertifikasi yang antara tahun 2007 – 2010 yang masih relatif mudah untuk dilaksanakan
<i>Story</i>	Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. rumitnya prosedur untuk mendapatkan sertifikasi guru 2. pemaparan terkait pengharusan bagi guru bersertifikasi mengajar selama 24 jam/ minggu
	Komentar	Pengharusan guru bersertifikasi mengajar 24 jam/minggu mengakibatkan kurangnya pemahaman yang seimbang terhadap kehadiran guru bersertifikasi pada setiap sekolah

c. Latar

Latar merupakan suatu penggambaran ke arah mana wacana akan dibawa oleh pembuat wacana. Latar akan memengaruhi pandangan khalayak pembaca terhadap wacana. Hal ini merupakan cerminan ideologis yang coba disajikan oleh pembuat wacana. Misalnya wacana berisi tentang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, ketika pembuat wacana setuju dengan perbuatan mahasiswa, maka yang akan dipaparkan dalam wacana tersebut adalah keberhasilan demonstrasi mahasiswa dalam membuat perubahan.

Latar Wacana 1a

Hal yang melatari pembuat wacana dalam wacana *1a* adalah tentang ketidaksetujuan pembuat wacana terhadap penerapan prosedur sertifikasi. Pemaparan ketidaksetujuan pembuat wacana terlihat pada pemaparan rumitnya prosedur untuk mendapatkan sertifikasi guru. Pemaparan terkait rumitnya prosedur sertifikasi guru yang terdapat dalam wacana ditandai oleh pemaparan kalimat seperti: melalui serangkaian tahap demi tahap, mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, dan Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP. Pemberian latar

semacam ini akan membentuk opini khalayak/pembaca bahwa ada sebuah sistem yang kurang baik dalam proses pengajuan sertifikasi guru. Pemberian latar tersebut merupakan bentuk cerminan ideologis pembuat wacana yang notabene pernah merasa kesulitan dalam mengajukan sertifikasi. Oleh karena itu, pemberian latar dengan pemaparan terkait rumitnya prosedur sertifikasi menjadi sesuai dengan ideologis pembuat wacana. Berikut merupakan kutipan latar dalam wacana *la*.

Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit. Melalui serangkaian tahap demi tahap, mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP, mulailah proses Sertifikasi itu.

Hal yang Melatari Pembuat Wacana Menulis	Ketidaksetujuan pembuat wacana terhadap penerapan prosedur sertifikasi
Latar	Kegiatan sertifikasi merupakan kegiatan yang ditempuh oleh guru. Rumitnya prosedur untuk mendapatkan sertifikasi guru menjadi halangan ketika mendapatkannya, kegiatan sertifikasi harus melalui beberapa

	tahap mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, dan Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP
Tanpa latar	Kegiatan sertifikasi merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh guru

d. Detil

Detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh pembuat wacana. Dengan adanya detil, pembuat wacana akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dan menampilkan informasi yang sedikit jika hal itu merugikan. Detil yang panjang merupakan strategi penonjolan informasi yang dilakukan pembuat wacana untuk menciptakan citra tertentu terhadap khalayak/pembaca.

Detil Wacana 1a

Detil yang panjang terkait rumitnya prosedur pengajuan sertifikasi merupakan informasi penting yang menguntungkan pembuat wacana. Oleh karena itu, pengungkapan detil terkait rumitnya prosedur pengajuan

sertifikasi menjadi titik tekan yang dilakukan oleh pembuat wacana. Kalimat detil tersebut seperti: melalui serangkaian tahap demi tahap, mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, Penilaian oleh Team Asesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Asesor LPMP, mulailah proses Sertifikasi itu.

Penilaian demi penilaian terhadap Portofolio guru menghasilkan penentuan lulus atau tidak lulus yang bersumber pada pencapaian nilai berdasarkan penilaian Portofolio yang dikumpulkan guru yang selanjutnya diikuti oleh tahapan penilaian oleh Team Asesor LPMP NTT dalam hal ini Team Penyelenggara Sertifikasi Rayon NTT. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat informasi yang menguntungkan bagi pembuat wacana sehingga dipaparkan secara panjang. Informasi yang tidak menguntungkan juga ditulis oleh pembuat wacana namun dengan porsi yang sedikit. Kalimat tersebut seperti: maka beruntunglah bagi guru yang langsung lulus dalam Portofolio itu sebab mereka tidak perlu mengikuiti Pendidikan Profesi selama 8 hari di LPMP Propinsi oleh Universitas Penyelenggara Sertifikasi Rayon. Berikut merupakan kutipan detil yang terdapat dalam wacana *1a*.

Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit. Melalui serangkaian tahap demi tahap, mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP, mulailah proses Sertifikasi itu. Penilaian demi penilaian terhadap Portofolio guru menghasilkan penentuan lulus atau tidak lulus yang bersumber pada pencapaian nilai berdasarkan penilaian Portofolio yang dikumpulkan guru yang selanjutnya diikuti oleh tahapan penilaian oleh Team Assesor LPMP NTT dalam hal ini Team Penyelenggara Sertifikasi Rayon NTT. Maka beruntunglah bagi guru yang langsung lulus dalam Portofolio itu sebab mereka tidak perlu mengikuit Pendidikan Profesi selama 8 hari di LPMP Propinsi oleh Universitas Penyelenggara Sertifikasi Rayon.

Detil	Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit. Melalui serangkaian tahap demi tahap, mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP, mulailah proses Sertifikasi itu.
Tanpa detil	Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji

	Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit.
--	---

e. Maksud

Elemen maksud dalam wacana merupakan cara penyajian informasi yang dilakukan oleh pembuat wacana. Informasi yang menguntungkan diuraikan secara eksplisit atau jelas sedangkan informasi yang merugikan diuraikan secara implisit atau tersembunyi.

Maksud Wacana 1a

Penulis wacana *1a* menyampaikan maksud penulisannya dengan memaparkan kesulitan-kesulitan prosedur yang dialami oleh guru dalam proses pengajuan sertifikasi guru. Penyampaian kesulitan-kesulitan prosedur sertifikasi selalu disandingkan atau diawali dengan argumen-argumen yang menguatkan bahwa sertifikasi adalah kegiatan penting demi membentuk guru yang profesional. Penyampaian kesulitan-kesulitan prosedur sertifikasi dilakukan secara tersurat atau eksplisit. Tujuan penyampaian secara eksplisit seperti ini dalam tulisan dilakukan agar pembaca menyimpulkan dan terjebak pada pandangan kerumitan prosedur sertifikasi

guru yang menjadi tujuan penulisan wacana tersebut. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit. Melalui serangkaian tahap demi tahap, mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP, mulailah proses Sertifikasi itu.

Pemaparan informasi berdasarkan kutipan di atas merupakan pemaparan informasi secara tersurat atau eksplisit. Pembuat wacana mengungkapkan secara jelas bahwa antara tahun 2007 – 2010 ketika pengajuan sertifikasi bukan melalui jalur uji kompetensi guru seperti sekarang, prosedur sertifikasi melalui serangkaian prosedur yang rumit. Pembuat wacana juga memaparkan tahapan-tahapan yang banyak terkait prosedur sertifikasi.

Implisit	Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit.
Eksplisit	Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses

	Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit. Melalui serangkaian tahap demi tahap, mulai dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan Portofolio, Penilaian oleh Team Assesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga Team Assesor LPMP, mulailah proses Sertifikasi itu.
--	--

f. Praanggapan

Praanggapan merupakan upaya mendukung pendapat dengan menggunakan premis yang dapat dipercaya. Praaangapan hadir dengan pernyataan yang dapat dipercaya dengan tujuan agar pernyataan tidak perlu dipertanyakan.

Praanggapan Wacana 1a

Berikut merupakan contoh penggunaan praanggapan dalam wacana 1a.

Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit.

Kalimat di atas merupakan kalimat yang menggunakan praanggapan. Penggunaan praanggapan dapat dilihat pada penggunaan fakta ‘proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit’. Pengungkapan

premis tersebut merupakan fakta yang telah terjadi dan dialami oleh pembuat wacana. Penggunaan premis bertujuan untuk mendukung gagasan terkait rumitnya mengurus sertifikasi guru.

Praanggapan	Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit.
Tanpa Praanggapan	Antara tahun 2007-2010, penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru.

g. Nominalisasi

Nominalisasi merupakan proses perubahan kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya dilakukan dengan memberikan imbuhan ‘pe-an’. Nominalisasi dapat menghilangkan subjek dalam suatu wacana. Melalui strategi ini pembuat wacana dapat menghilangkan subjek dengan menggunakan nominalisasi jika informasi itu menguntungkan. Misalnya kata ‘menembak’, dalam sebuah kalimat, kata ‘menembak; selalu memerlukan subjek siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal

tersebut harus ada dalam kalimat agar memunyai arti. Sebaliknya, kata benda tidak memerlukan subjek karena ia hadir mandiri dalam sebuah kalimat. Kata 'penembakan' tidak memerlukan kehadiran subjek.

Nominalisasi Wacana 1a

Nominalisasi dalam wacana 1a terdapat dalam paragraf pertama. Ketika memulai menuangkan ide-ide kritisnya, pembuat wacana 1a mengungkapkan mengenai penilaian sertifikasi guru tanpa melalui jalur uji kompetensi guru masih dianggap mudah. Namun, sekarang prosedur tersebut menjadi sangat rumit. Penyampaian ide atau gagasan pembuat wacana mengenai hal tersebut menggunakan nominalisasi. Didalamnya tidak ditemukan subjek atau aktor yang harus bertanggungjawab atas fenomena atau kejadian tersebut. Nominalisasi terlihat pada penggunaan kata 'penilaian' (nomina), yang bentuk verbanya adalah 'menilai'. Penggunaan kata 'menilai' akan memerlukan subjek, oleh karena pembuat wacana tidak menunjuk seseorang atau aktor yang harus bertanggungjawab maka ia menggunakan kata 'penilaian'

untuk membuat wacana. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan.

Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit.

h. Peningkaran

Peningkaran merupakan cara pembuat wacana menyembunyikan apa yang ingin diungkapkannya. Pembuat wacana seolah-olah menyetujui sesuatu, padahal ia tidak setuju dengan jalan memberikan argumen atau fakta untuk penyangkalan. Peningkaran akan ditandai dengan penggunaan kata 'tetapi' atau 'namun' setelah sebuah pernyataan dibuat.

Peningkaran Wacana 1a

Berikut merupakan contoh peningkaran yang terdapat dalam wacana 1a.

Saya bersama kawan-kawan guru yang tamat S1 di bawah tahun 2002, tak mengalami persoalan berarti karena masa kerja dan tahun Ijazah Sarjana memungkinkan proses Sertifikasi itu. Namun ini sangat membebankan bagi para guru yang memiliki masa kerja hingga 20-30 tahun namun mereka belum memiliki Ijazah S1.

Pengingkaran dalam wacana di atas, terlihat pada penggunaan kata namun. Pada pernyataan sebelumnya pembuat wacana menyatakan tidak terbebani dengan proses sertifikasi yang harus dilalui guru tetapi pada pernyataan berikutnya pembuat wacana membuat sebuah pengingkaran dengan memberikan fakta untuk menyangkal pernyataan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa pembuat wacana sebenarnya ingin menyatakan hal yang sebaliknya dari pernyataan sebelumnya.

Pengingkaran	Saya bersama kawan-kawan guru yang tamat S1 di bawah tahun 2002, tak mengalami persoalan berarti karena masa kerja dan tahun Ijazah Sarjana memungkinkan proses Sertifikasi itu. Namun ini sangat membebani bagi para guru yang memiliki masa kerja hingga 20-30 tahun namun mereka belum memiliki Ijazah S1.
Tanpa Pengingkaran	Saya bersama kawan-kawan guru yang tamat S1 di bawah tahun 2002, tak mengalami persoalan berarti karena masa kerja dan tahun Ijazah Sarjana memungkinkan proses Sertifikasi itu.

i. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat akan terkait dengan penggunaan struktur bahasa oleh pembuat wacana. Penggunaan kalimat berstruktur aktif akan berbeda makna atau tujuan penulisan dengan penggunaan kalimat berstruktur pasif. Bentuk kalimat aktif akan menonjolkan seseorang sebagai subjek pernyataan sedangkan bentuk kalimat pasif akan menonjolkan peristiwa dalam pernyataan.

Bentuk Kalimat Wacana 1a

Bentuk kalimat pada wacana 1a banyak menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif umumnya digunakan agar seseorang menjadi subjek dari tanggapannya. Dalam wacana 1a kalimat banyak menempatkan subjek sebagai hal yang ingin ditonjolkan. Hal ini menunjukkan bahwa guru merupakan seseorang yang dianggap paling merasakan kesulitan ketika mengajukan sertifikasi. Berikut merupakan kutipan bentuk kalimat dalam wacana 1a.

Kelompok guru yang nilai Portofolionya tidak mencapai syarat kelulusan harus mengikuti pendidikan Profesi yang lamanya 8 hari penuh di LPMP Provinsi.

Kami mengikuti Pendidikan Profesi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru.

Kami lulus Pendidikan Profesi Guru dan selanjutnya bersama kelompok guru yang telah lulus langsung pada Penilaian Portofolio guru, kami menerima Sertifikat Pendidik yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu di Aula SMA Katolik Surya Atambua, NTT, Indonesia.

Bentuk Kalimat	
Aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok guru yang nilai Portofolionya tidak mencapai syarat kelulusan harus <i>mengikuti</i> pendidikan Profesi yang lamanya 8 hari penuh di LPMP Provinsi. 2. Kami <i>mengikuti</i> Pendidikan Profesi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru
Pasif	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan Profesi yang lamanya 8 hari penuh di LPMP Provinsi harus <i>diikuti</i> Kelompok guru yang nilai Portofolionya tidak mencapai syarat kelulusan 2. Pendidikan Profesi <i>diikuti</i> oleh kami yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru

Bentuk lain adalah dengan pemakaian urutan kata-kata dalam sebuah wacana. Bentuk lain ini dapat berupa

penggunaan bentuk kalimat deduktif atau induktif. Deduktif merupakan bentuk kalimat di mana inti kalimat diletakkan di awal kemudian diikuti keterangan tambahan. Wacana Ia menggunakan bentuk kalimat induktif, seperti dalam contoh berikut.

Hingga kami menerima SK dari Dirjen PMTK, kami melalui sebuah prosedural yang cukup rumit, berbelit-belit dan penuh kesabaran. Saya bersama kawan-kawan guru yang tamat S1 di bawah tahun 2002, tak mengalami persoalan berarti karena masa kerja dan tahun Ijazah Sarjana memungkinkan proses Sertifikasi itu. Namun ini sangat membebankan bagi para guru yang memiliki masa kerja hingga 20-30 tahun namun mereka belum memiliki Ijazah S1. Pemerintah akhirnya menyetujui proses Sertifikasi itu berlaku juga bagi guru yang belum S1 namun memiliki masa kerja 30 tahun lebih atau telah berumur di atas 50 tahun. Ada catatan khusus untuk guru-guru demikian yakni bahwa perolehan Sertifikat Pendidik bagi mereka hanyalah sebagai penghormatan atas jasa-jasanya sebagai Pendidik puluhan tahun. Saya pikir ini sebuah kebijaksanaan yang sangat bertoleransi, ada penghargaan bagi seorang guru di balik ijinan untuk proses Sertifikasi itu sendiri.

Dari contoh di atas, diketahui bahwa bentuk kalimat yang digunakan adalah bentuk kalimat deduktif. Pembuat wacana meletakkan inti kalimat (kami melalui sebuah prosedural yang cukup rumit, berbelit-belit dan penuh kesabaran) di awal

kalimat. Tujuan yang ingin disampaikan oleh pembuat wacana adalah berusaha untuk menyampaikan secara tegas apa yang ingin disampaikannya, yakni rumitnya prosedur sertifikasi guru.

j. Koherensi

Koherensi merupakan pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam sebuah teks. Pertalian atau jalinan antarkata atau kalimat dalam sebuah teks dapat terbentuk melalui penggunaan kata hubung. Kata hubung yang digunakan dalam koherensi adalah kata hubung 'dan' dan kata hubung 'akibat'. Kata hubung tersebut yang akan menentukan bagaimana dua buah kalimat yang menggambarkan fakta dihubungkan.

Koherensi Wacana 1a

Koherensi dalam wacana 1a terdapat dalam kutipan sebagai berikut.

Maka beruntunglah bagi guru yang langsung lulus dalam Portofolio itu sebab mereka tidak perlu mengikuit Pendidikan Profesi selama 8 hari di LPMP Propinsi oleh Universitas Penyelenggara Sertifikasi Rayon.

Kedua kalimat di atas, dihubungkan dengan kata hubung sebab. Kata hubung sebab mengindikasikan bahwa kedua kalimat tersebut memunyai hubungan sebab akibat. Kalimat ‘Maka beruntunglah bagi guru yang langsung lulus dalam Portofolio itu’ merupakan kalimat yang menyatakan sebab dan kalimat ‘mereka tidak perlu mengikuit Pendidikan Profesi selama 8 hari di LPMP Propinsi oleh Universitas Penyelenggara Sertifikasi Rayon’ merupakan akibat. Oleh karena itu kata hubung sebab digunakan untuk menghubungkan kedua kalimat. Kedua kalimat tersebut menjadi tidak berhubungan ketika digunakan kata hubung ‘dan’.

Koherensi	
Kata hubung ‘sebab’	Maka beruntunglah bagi guru yang langsung lulus dalam Portofolio itu sebab mereka tidak perlu mengikuit Pendidikan Profesi selama 8 hari di LPMP Propinsi oleh Universitas Penyelenggara Sertifikasi Rayon

k. Koherensi Kondisional

Penggunaan koherensi kondisional ditandai dengan adanya kalimat penjelas. Koherensi kondisional akan ditandai dengan penggunaan kata hubung ‘yang’ dan ‘dimana’.

Kalimat kedua akan berfungsi sebagai kalimat penjelas (anak Kalimat) sehingga ada atau tidaknya anak kalimat tersebut tidak akan memengaruhi arti kalimat.

Koherensi Kondisional Wacana 1a

Koherensi kondisional dalam wacana 1a terdapat dalam kutipan kalimat berikut.

Dalam hal ini para pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik ialah para profesional, yang berkarya dalam gaya baru yang bermartabat dari bentuk karya sebelumnya.

Koherensi kondisional dalam kutipan di atas terlihat pada penggunaan kata 'yang'. Kalimat 'yang berkarya dalam gaya baru yang bermartabat dari bentuk karya sebelumnya' merupakan kalimat penjelas dari kalimat 'pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik ialah para profesional'.

Koherensi Kondisional	Dalam hal ini para Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik ialah para profesional, yang berkarya dalam gaya baru yang bermartabat dari bentuk karya sebelumnya.
Tanpa Koherensi Kondisional	Dalam hal ini para Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik ialah para profesional

1. Koherensi Pembeda

Koherensi pembeda berhubungan dengan bagaimana dua peristiwa atau fakta itu dibedakan. Dua buah peristiwa atau fakta akan dibuat seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan dengan menggunakan koherensi ini.

Koherensi Pembeda Wacana 1a

Berikut merupakan contoh koherensi pembeda yang terdapat dalam wacana 1a.

Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit.

Kutipan teks di atas merupakan kutipan teks yang di dalamnya terdapat koherensi pembeda. Koherensi pembeda dalam kutipan di atas terlihat pada penjabaran fenomena atau peristiwa yakni antara tahun 2007–2010 ketika penilaian sertifikasi guru bukan melalui jalur Uji Kompetensi Guru prosesnya masih sangat mudah. Namun ketika pada saat penilaian sertifikasi guru melalui jalur Uji Kompetensi Guru, prosedural serfitikasi menjadi cukup rumit. Fenomena yang dibedakan adalah prosedural penilaian sertifikasi guru.

Koherensi Pembeda	Antara tahun 2007-2010, ketika penilaian Sertifikasi guru bukan
-------------------	---

	melalui jalur Uji Kompetensi Guru seperti sekarang, proses Sertifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit
Tanpa Pembeda	Antara tahun 2007-2010, penilaian Sertifikasi guru bukan lagi melalui jalur Uji Kompetensi Guru

m. Kata Ganti

Kata ganti merupakan alat yang digunakan oleh pembuat wacana untuk menunjukkan dimana posisi ia dalam sebuah wacana. Dalam mengungkapkan sikap seseorang dapat menggunakan kata ganti 'saya', 'kami', atau 'kita'. Penggunaan kata ganti 'saya' atau 'kami' akan menunjukkan sikap resmi pembuat wacana sedangkan kata ganti 'kita' akan menunjukkan sikap bersama dalam suatu komunitas.

Kata Ganti Wacana 1a

Kata ganti yang digunakan dalam wacana 1a banyak menggunakan kata ganti 'kami'. Kata ganti ini digunakan untuk menunjukkan sikap resmi pembuat wacana. Penyajian kalimat dengan kata ganti 'kami' sangat wajar digunakan

oleh pembuat wacana mengingat ia merupakan salah satu guru yang mengalami kesulitan dalam mengajukan sertifikasi guru. Berikut merupakan contoh penggunaan kata ganti 'kami'.

Kami mengikuti Pendidikan Profesi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru.

Kami lulus Pendidikan Profesi Guru dan selanjutnya bersama kelompok guru yang telah lulus langsung pada Penilaian Portofolio guru, kami menerima Sertifikat Pendidik yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu di Aula SMA Katolik Surya Atambua, NTT, Indonesia. Penantian panjangpun tuntas sudah.

Kami harus melampirkan Sertifikat Pendidik itu untuk melamar ke salah satu bagian Dikbud Pusat, untuk selanjutnya mendapatkan SK Dirjen PMPTK tentang besarnya dana Sertifikasi.

Hingga kami menerima SK dari Dirjen PMTK, kami melalui sebuah prosedural yang cukup rumit, berbelit-belit dan penuh kesabaran. Saya bersama kawan-kawan guru yang tamat S1 di bawah tahun 2002, tak mengalami persoalan berarti karena masa kerja dan tahun Ijazah Sarjana memungkinkan proses Sertifikasi itu.

Kata ganti 'kami'	Kami mengikuti Pendidikan Profesi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan
-------------------	--

	untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru.
--	---

n. Leksikon

Leksikon merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh pembuat wacana. Pilihan kata yang digunakan oleh pembuat wacana akan menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa yang sama akan dapat disajikan dengan penggunaan kata-kata yang berbeda.

Leksikon Wacana 1a

Berikut merupakan leksikon yang digunakan dalam wacana 1a.

Kami mengikuti Pendidikan Profesi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru.

Kalimat di atas menggunakan kata 'tidak memenuhi persyaratan'. Pilihan kata-kata tersebut dirasa masih lebih halus dibandingkan dengan penggunaan kata 'gagal' atau 'mendapat nilai jelek'. Penggunaan kata 'tidak memenuhi persyaratan' merupakan kata yang dipilih oleh pembuat wacana karena pembuat wacana merupakan subjek yang

dibicarakan dalam kalimat tersebut sehingga wajar ia memilih kata yang lebih halus dalam kalimatnya.

Leksikon	
Tidak memenuhi persyaratan	Kami mengikuti Pendidikan Profesi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru.
Gagal	Kami mengikuti Pendidikan Profesi karena dinyatakan gagal untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru.
Mendapatkan nilai jelek	Kami mengikuti Pendidikan Profesi karena mendapat nilai jelek untuk Lulus langsung dalam Penilaian Portofolio guru.

o. Grafis

Grafis merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pembuat wacana dalam menonjolkan atau menekankan suatu pandangan. Garfis dalam wacana biasanya muncul dengan pemakaian huruf tebal, huruf miring, garis bawah, ukuran huruf lebih besar, grafik, gambar, dan tabel.

Grafis Wacana 1a

Penggunaan grafis dalam wacana *1a* hanya muncul dalam pemakaian huruf tebal dan ukuran huruf yang lebih besar.

Penggunaan huruf tebal dan ukuran huruf lebih besar hanya terdapat pada judul wacana.

Grafis	
Penggunaan huruf tebal	Prosedur Rumit, Namun Dianggap dan Dipahami Mudah
Ukuran huruf lebih besar	Prosedur Rumit, Namun Dianggap dan Dipahami Mudah

p. Metafora

Metafora merupakan kiasan atau ornamen dalam sebuah kalimat. Penggunaan metafora dapat berupa penggunaan ungkapan, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, atau bahkan ungkapan yang diambil dari ayat-ayat suci.

Metafora Wacana 1a

Dalam wacana 1a tidak ditemukan metafora.

2. Konteks

Konteks dalam analisis wacana kritis, diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis melalui konteks tertentu. Konteks terkait dengan siapa yang

mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dan perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak.

Terdapat beberapa konteks penting yang berpengaruh pada produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Misalnya, seseorang berbicara dalam pandangan tertentu karena ia laki-laki, atau karena ia berpendidikan. Kedua, *setting* sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Misalnya, pembicaraan di tempat kuliah berbeda dengan di jalan. Setting, seperti tempat itu privat atau publik, dalam suasana formal atau informal, atau pada ruang tertentu memberikan wacana tertentu pula. Berbicara di ruang kelas berbeda dengan berbicara di rumah dan juga di pasar, karena situasi sosial atau aturan yang melingkupinya berbeda, menyebabkan partisipan komunikasi harus menyesuaikan diri dengan konteks yang

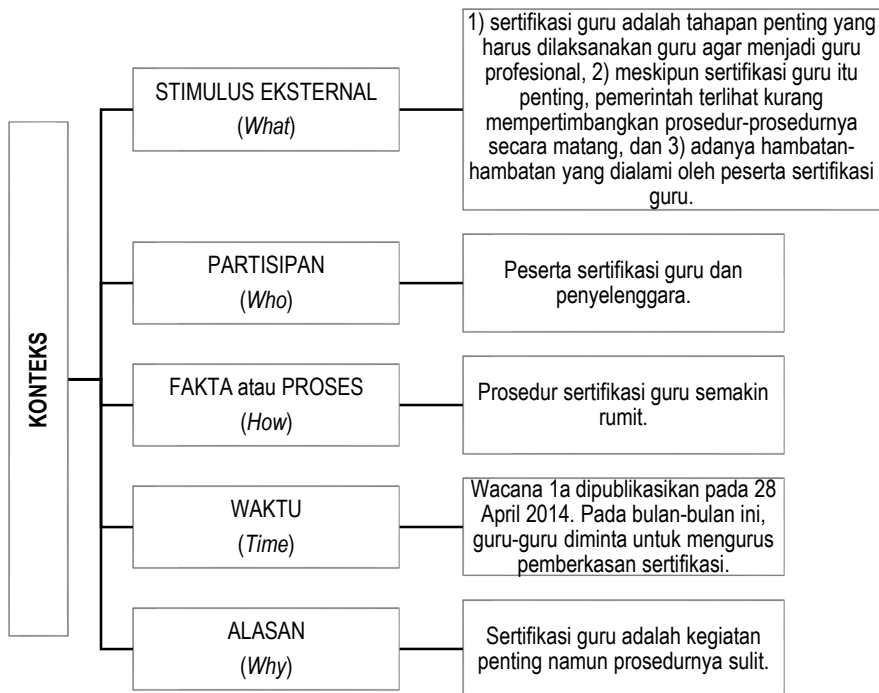
ada. Oleh karena itu, wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya.

Konteks yang Melatari Wacana 1a

Wacana 1a berisi tentang prosedur pelaksanaan sertifikasi guru yang semakin rumit. Sertifikasi adalah tahapan penting bagi guru namun prosedurnya tidak dibuat mudah. Pada wacana 1a, pembuat wacana menyampaikan bagaimana pelaksanaan sertifikasi guru saat ini yang justru semakin rumit dan sulit. Selain itu, sebagai penekanan, wacana 1a memaparkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta sertifikasi dalam mengikuti prosedur-prosedur yang terkesan kurang pertimbangan.

Secara konteks, hal yang melatarbelakangi pembuat wacana untuk menghasilkan atau memproduksi wacana bertema sertifikasi tersebut adalah 1) sertifikasi guru adalah tahapan penting yang harus dilaksanakan guru agar menjadi guru profesional, 2) meskipun sertifikasi guru itu penting, pemerintah terlihat kurang mempertimbangkan prosedur-prosedurnya secara matang, dan 3) adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta sertifikasi guru.

Berdasarkan waktu terbitnya, wacana *1a* dipublikasikan pada 28 April 2014. Berdasarkan pencarian kejadian-kejadian pada tanggal dipublikasinya wacana, setiap guru pada bulan Maret dan April ternyata diharuskan mengurus atau mengumpulkan berkas-berkas sertifikasinya. Selain itu, beberapa guru yang belum mengurus sertifikasi diminta untuk segera melakukan pemberkasan. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi atau situasi pada masa itu telah memengaruhi penulis untuk memproduksi wacana *1a*. Selain itu, fakta ini juga mengindikasikan bahwa publikasi wacana *1a* didasari oleh penyampaian informasi dan sikap atas peserta sertifikasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi guru. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan konteks wacana *1a*.



3. Kognisi Sosial

Kognisi sosial merupakan proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari penulis (pembuat wacana). Analisis terhadap kognisi pembuat wacana dalam proses pembentukan wacana juga melibatkan analisis kebahasaan secara mendalam untuk membongkar relasi kuasa dan dominasi yang diproduksi pada wacana. Analisis kognisi sosial dilakukan melalui daftar pernyataan yang diajukan kepada pembuat wacana sehingga hasilnya akan lebih

memperjelas bagaimana wacana diproduksi dan konteks apa yang memengaruhinya.

Kognisi sosial atau kemampuan untuk memproduksi suatu wacana terkait erat dengan struktur mental. Setiap wacana diproduksi melalui skema atau model yang memengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu objek. Dalam skema tersebut, pewacana akan melakukan seleksi dan proses informasi yang datang dari pengalaman dan sosialisasi. Dalam analisis wacana kritis, skema inilah yang akan menjadi fokus, terkait bagaimana suatu wacana diproduksi oleh pewacana.

Kognisi Sosial Pembuat Wacana *1a*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber pembuat wacana. Pembuat wacana *1a* adalah laki-laki bernama Blasius Mengkaka. *1a* adalah sarjana filsafat lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero-Flores Nusa Tenggara Timur (NTT). Penulis wacana *1a* ini tinggal di Halibaures Desa Natimu Tasifeto Barat-Belu-NTT. Blasius Mengkaka saat ini bekerja sebagai guru di SMA Kristen Atambua NTT.

Berdasarkan wawancara pada penulis wacana, wacana *1a* dipengaruhi oleh pengalamannya sebagai guru profesional yang telah mengikuti sertifikasi sejak 2008. Ia mendukung sertifikasi guru yang bertujuan untuk membentuk guru yang profesional, namun mengeluhkan beberapa prosedur sertifikasi yang dinilai cukup rumit. Kerumitan ini, menurutnya, menyebabkan peserta sertifikasi atau guru mengalami kesulitan dalam mengikuti sertifikasi guru.

Penulis wacana *1a* adalah seorang yang sudah lama bekerja sebagai guru. Ia telah menjalani beragam proses sertifikasi guru dan sangat memahami bagaimana prosedur-prosedur sertifikasi kian berubah-ubah seiring waktu. Dalam jawaban wawancaranya, Ia mengaku bahwa Ia telah memiliki pengalaman cukup banyak menjadi seorang guru. Wacana *1a* diproduksinya sebagai umpan balik atau refleksi atas pengalamannya selama ini menjadi guru yang telah mengikuti sertifikasi guru sejak lama. Pengalaman inilah yang kemudian memotivasinya untuk menuliskan wacana *1a* dalam situs *Kompasiana*.

Motivasi pembuat wacana dalam memproduksi wacana ini adalah 1) adanya mengemukakan pandangan kritis dan

rasional mengenai sertifikasi yang sedang dan sudah dilakukan demi mendapatkan pencerahan dan meningkatkan ilmu pengetahuan; 2) menyampaikan pengetahuan kritis mengenai sertifikasi guru kepada khalayak pembaca; 3) tujuan profesi (tulisan direncanakan akan dibukukan untuk pengembangan karir dan kinerja guru sesuai dengan tuntutan Penilaian Berlanjut Guru).

EVALUASI

Berdasarkan contoh analisis di atas, buatlah analisis dari wacana di bawah ini!

Sisi Balik Sertifikasi Guru Terhadap Pendidikan kaum Tertindas

Penulis: Raja Mataniari
Sumber: Kompasiana.com

Sedikit pengantar tentang kondisi pendidikan saat ini terutama tenaga pendidik yang terombang-ambing dalam ketidakberpihakan politik Indonesia kepada kelas marjinal. Pada tahun 2014 ini yang ramai memperbincangkan situasi perpolitikan Indonesia dari sabang sampai Merauke, juga hinggap di daerah dengan banyak ragam persoalan yang menjadi isu hangat pendamping pembicaraan teras politik saat ini. Berkaitan dengan tenaga pendidik isu sertifikasi menjadi isu yang acap kali mencadi perbincangan dikalangan Guru di Indonesia. Yang menjadi asal muasal keberpihakan kaum Guru kepada salah satu calon

presiden. Kalangan Prabowo Subianto - Hatta Radjasa yang mendukung perbaikan pendidikan terutama instrument guru yang akan tetap dijawab kebutuhannya dengan melanjutkan program Sertifikasi Guru (PLPG) dan Jokowi - Jusuf Kalla yang mengadakan perombakan birokrasi pendidikan terutama guru dengan memberikan lelang jabatan dan remunerasi. Akan tetapi penulis berharap pembaca artikel sederhana ini tidak terbawa kepada isu yang tidak esensial dari persoalan pokok pendidikan saat ini. Karena dalam kajian kali ini penulis akan mencoba mendekonstruksi bagaimana peran guru dalam pendidikan dengan kebijakan Sertifikasi Guru yang dicanangkan pemerintah.

1.Sertifikasi Guru : Cacat Bawaan System Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional RI saat ini mengacu kepada kebijakan perundang-undangan dalam *Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional* dan Proses sertifikasi Guru juga mengacu kepada UU ini dan berbagai undang-undang lainnya antara lain ; *Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Pendidik; Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: I.Um.01.02.253; Permendiknas No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Dan Permendiknas No. 40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. Dengan tujuan; Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran; Meningkatkan profesionalisme guru ;*

Meningkatkan proses dan hasil pendidikan; Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Secara harfiah sertifikasi menurut KBBI adalah satu usaha memberikan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dr orang yg berwenang yg dapat digunakan sbg bukti pemilikan atau suatu kejadian, dan menurut saya beberapa pemikir terdahulu latah dalam melihat sertifikasi sebagai satu asosiasi yang terikat dalam pendidikan dan di jadikan atribut yang tidak terlepas dalam arti keprofesionalan seperti ; Menurut Samani (2006) bahwa, "Sertifikat pendidik adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru." Sedangkan menurut Trianto dan Tutik (2007) bahwa :

Sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.

Sedangkan menurut Mulyasa (2009) bahwa :

Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Dalam hal ini saya cukup miris melihat bahwa filosofi Guru atau tenaga pendidik telah dikerdilkan sedemikian rupa oleh para intelektual tua terdahulu, bagaimana mungkin satu usaha memberikan pemahaman harus dilabeli oleh satu buah bukti kemampuan secara kuantitas, sedangkan yang akan ditaburi adalah bentuk kualitas.

Disinilah kita dapat melihat efek domino kesesatan orientasi pendidikan Indonesia, makna guru yang dahulu dikenal suci dengan slogan "**Pahlawan Tanpa Tanda Jasa**", dan makna harfiah dari bahasa Sangsekerta yang berarti *Berat, Utama*, yang menjadi sumber Ilmu Pengetahuan, telah menjadi kajian teoritis yang hanya ada didalam buku-buku dan diktat-diktat kaum intelektual, sekedar mempelajarinya akan mendapat cemoohan "SOK IDEALIS" dari kaum pragmatis.

Pola pendidikan yang cenderung dogmatis yang akan kita bahas pada sub judul berikutnya menjadi momok yang menghabisi organisme pendidikan Indonesia, yang dibangun oleh bapak pendidikan Indonesia Suwardi Suryadiningrat atau lebih dikenal dengan sapaan Ki Hajar Dewantara dengan falsafah *Tut Wuri Handayani* (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan), *Ing Madya Mangun Karsa* (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan *Ing Ngarsa Sung Tuladan* (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), adalah satu bentuk kongkreet dari ideology pendidikan Indonesia. Namun hal ini tidak tampak dalam regulasi dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari pendidikan

Indonesia. Yang terbentuk adalah corak pendidikan dogmatis-feodalistik.

Jika kita jeli melihat persoalan sertifikasi adalah satu soal yang menjadi persoalan bersama rakyat Indonesia bukan saja kaum Guru, sehingga harus dengan iming-iming gaji yang berlimpah ruah baru berbondong-bondong masyarakat ingin menjadi guru, walaupun harus memberikan pengorbanan materil dan non-materil yang tidak sedikit. Disinilah sekali lagi kegagalan system pendidikan nasional kita yang terjebak dalam kualifikasi sertifikasi yang kebablasan, trend peningkatan guru di Indonesia yang bertambah sejak era 1990-an hingga sekarang mencapai 2,92 juta orang. Jumlah ini dinilai berlebihan karena membuat rasio guru murid menjadi 1:14, artinya satu guru mengajar 14 murid. Dan 900 ribu merupakan guru tenaga honorer. Disinilah kita melihat pola berfikir Indonesia masih jauh dari kata merdeka dalam berfikir karena masih terhambat berbagai factor, seperti ekonomi, politik, adat, budaya yang mencengkram kebebasan berfikir manusia Indonesia.

Harapannya satu bentuk pendidikan karakter tidak saja berkuat pada hal moralitas, namun ideologisasi pendidikan harus segera ditanamkan dalam dunia pendidikan, yang menjadi pertanyaan kemudian apakah pendidikan kita untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kebodohan, atau malah pendidikan Indonesia menjadi alat penindasan dengan mempertahankan budaya pembodohan yang selama ini berakar dalam pendidikan kita ?

2. Apakah sertifikasi dibutuhkan ?

Pertanyaan diatas menjadi hal mendasar pada tema kita kali ini, apakah Sertifikasi guru dalam bentuk pelatihan kilat ala Pelatihan dan latihan profesi guru atau sertifikasi profesi guru yang akan di uji coba menjadi solusi akan kualitas pendidikan Indonesia saat ini ?

Kalau melihat pola pendidikan sertifikasi Guru yang dilaksanakan di LPTK Wilayah I Disumut, maka saya secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa program ini hanya formalitas dan pembuangan anggaran secara tak bertanggung jawab. Karena dalam hal pendidikan yang dilaksanakan dalam 2 minggu yang mayoritas diikuti oleh Guru Senior (Umur sudah tua) harus dipaksa mengikuti pendidikan kilat dari pagi hari hingga sore hari, bahkan sampai ada yang sakit-sakitan karena mengikuti agenda ini, apakah menjadi hal yang masuk akal bahwa pendidikan yang mereka jalani dapat mereka rekam dan tanggap dalam fikiran mereka yang memiliki berbagai persoalan kehidupan. Saya bukan bermaksud mengkerdilkan daya tangkap guru-guru saya itu, akan tetapi dalam hal meng-upgrade pendidikan nasional, bukan persoalan mencangkokkan metode baru kepada guru-guru lama yang menjadi hal yang fundamental, akan tetapi paradigma pendidik generasi barulah yang harus dipersiapkan untuk siap merelakan setengah kenyamanan mereka untuk membongkar pola pendidikan lama agar menjadikan pendidikan yang lebih manusiawi.

Karena motivasi sertifikasi acapkali dijadikan ajang perbaikan ekonomi oleh guru PNS dan Honorer agar dapat memiliki penghasilan yang lebih baik, dan ini di aminkan oleh praktek pemerintah yang melihat bahwa guru harus diberikan kesejahteraan lebih agar dapat secara maksimal

memberikan pendidikannya kepada murid atau siswanya. Inilah yang tadi diawal saya sampaikan bagaimana guru melihat calon pemimpin sesuai dengan kondisi ekonomis mereka. Sehingga tidak dapat dibedakan mana kepentingan politis dan ekonomis.

Target kemampuan professional pendidik yang termaktub dalam 4 komponen kompetensi yaitu; kompetensi paedagogi, kompetensi professional, kompetensi personal atau kepribadian dan kompetensi social, hanya di bentuk dalam pendidikan kilat yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Padahal dalam prakteknya kemudian dapat dikatakan bahwa program ini bermasalah, mulai dari ancaman kepada guru honorer yang terancam tidak akan dipakai oleh sekolah swasta yang merupakan tempat bekerja guru honorer karena sekolah akan lebih senang memakai guru yang menjalani wajib kerja sabagai syarat sertifikasi tanpa digaji, kemudian persoalan macetnya pembayaran dana sertifikasi kepada guru, kemudian persoalan tidak disiplinnya praktek sertifikasi yang dikerjakan, sehingga sering kali tidak ada perbedaan cara mengajar guru sebelum dan sesudah sertifikasi.

Sehingga saya dapat melihat bahwa sertifikasi ini sebenarnya dapat dikatakan program bodong untuk pendidikan Indonesia, karena dalih penjaminan mutu,

dalih peningkatan sumber daya manusia tidak akan dapat diukur dengan selembar kertas sertifikat berlabel *LULUS SERTIFIKASI*, namun adalah pola pendidikan yang ilmiah dan orientasi pendidikan yang berkerakyatan harus dijadikan ideology pendidikan sebagai alat melepas belenggu kebodohan dan penuntun manusia sesuai keinginan bapak Ki Hajar Dewantara.

3.Pendidikan Sosial; Alternatif Pendidikan Kaum Tertindas.

Berbagai persoalan pendidikan saat ini, termasuk persoalan sertifikasi haruslah kiranya dimaknai sebagai satu soal yang kausalnya adalah system ekonomi politik yang di anut oleh Negara Ini. Corak pendidikan yang melahirkan sekolah yang tak ubahnya sebuah lembaga bank jika mengacu kepada konsep pendidikan Gaya Bank Paulo Freire,dalam bukunya (2008) yang melahirkan sosok-sosok manusia yang individualis, pragmatis, oportunistis, karena guru menjadi pusat ilmu pengetahuan itu dan miskin moral social Secara sederhana Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan “gaya bank” itu sebagai berikut ;

1. Guru mengajar, murid belajar
2. Guru tahu segalanya, murid tak tahu apa-apa
3. Guru berfikir, murid di fikirkan
4. Guru berbicara, murid mendengarkan
5. Guru mengatur, murud di atur
6. Guru memilih dan melaksanakan pilihannya, murid menuruti

7. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya
8. Guru memilih apa yang akan di ajrakan, murid menyesuaikan diri
9. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid
10. Guru adalah subjek proses belajar, murid objeknya.

Hal inilah yang menjadikan personal dalam *Kebudayaan Bisu* yaitu suatu kondisi di mana masyarakat di buat tunduk dan taat sedemikian rupa oleh penguasa sehingga masyarakat tidak bisa atau berani mempertanyakan keberadaannya, dan pada akhirnya cenderung menerima keadaan itu secara fatalistic yang sekali menurut paolo Fraire menjadi kebudayaan baku ekonomi politik saat ini.

Pendidikan adalah hasil peradaban, pendidikan akan mencetak kebudayaan, maka dapatlah kita lihat bagaimana watak inlander masih berdiri kokoh dalam alam bawah sadar masyarakat Indonesia, secara umum dikenal dalam wawasan rakyat saat ini pendidikan adalah satu gerbong rel yang efektif digunakan untuk dapat mencapai stasiun kesejahteraan. Dengan modal yang seadanya untuk dapat duduk dibangku sekolah, maka tiket akan didapatkan siswa-siswa sekolah setiap jenjang untuk dapat melangkah kejenjang berikutnya hingga memiliki batas minimal memperoleh pekerjaan yang seadanya pula.

Begitulah dapat dianalogikan kondisi pendidikan kita saat ini, para guru dan pendidik adalah mereka yang lahir dari pendidikan yang sesat ini. Sehingga warisan kesesatan pendidikan itu terus mengalir bagai siklus ekosistem yang saling memangsa.

Persoalan yang dialami rakyat Indonesia saat ini adalah satu dampak dari tidak adanya ideology yang jelas dalam pendidikan di Indonesia, ideology yang dapat menuntun arah pendidikan kita kearah yang lebih progressive dan humanis. Persoalan sertifikasi misalnya adalah satu turunan dari kesepakatan internasional dalam National Commission on Educational Services (NCES) yang menyebutkan "*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*". Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik.

Persyaratan kualifikasi akademik minimal dan sertifikasi bagi pendidik yang mengacu atau meniru pada apa yang telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki undang-undang guru tahun 1993, dan peraturan pemerintah yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi

bagi guru. Dan ini semakin dikuatkan oleh Nota perjanjian GATs (Government Agreement Trade and Service) pada tahun tahun 2005 yang meliberalkan atau melepaskan kewajiban Negara untuk memfasilitasi pendidikan di Indonesia. Kaitan antara GATs dengan Nota Lembaga Kualifikasi Guru tersebut adalah pola komersialisasi pendidikan yang telah dpraktekkan di Indonesia dengan melabelkan guru dan pendidikan sebagai komoditi atau barang dan siswa sebagai pembeli atau Costumersnya. Disinilah mulai kita lihat ketidakberdayaan pendidikan kita ketika tidak memiliki ideology yang berorientasi kepada rakyat dengan sifat ilmiah dan demokratisnya.

Hingga secara umum system pendidikan indonesialah yang harus dibenahi dan pendidikan social atau pola pendidikan Hadap Masalah paolo fraire (*Problem Posing*) yang menjawab hakikat kesadaran, yakni *Intensionalitas*, akan menolak pernyataan-pernyataan serta mewujudkan komunikasi. Konsep ini mewakili sifat khas dari kesadaran: yakni sadar akan, tidak saja terhadap objek-objek tetapi juga berbalik kepada dirinya sendiri, sehingga terbelah dalam pengertian Jaspers, yakni, kesadaran sebagai kesadaran atas kesadaran, adalah satu solusi yang efektif bagi pendidikan Indonesia saat ini dan kedepannya. Karena peradabaan kolektif hanya akan dapat dicapai jika pendidikan dan seluruh insturmen kebudayaannya telah dapat berjalan secara kolektif. Karena pendidikan tidak akan dapat dipisahkan geraknya dengan gerak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap kebutuhan haruslah terpenuhi dengan pendidikan yang dijalani oleh setiap anggota masyarakat. Kanan-kiri gerak masyarakat akan mempengaruhi kanan-kiri gerak pendidikan pula,

oleh karena itu diperlukan konsep pendidikan social yang sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia.

Harapannya kedepan pendidikan Indonesia tidak lagi sekedar komoditi yang berjalan secara kaku dan formalis sehingga melahirkan generasi yang A-Patis-Historis-Politis yang hanya akan menghancurkan rakyat Indonesia kedepannya, dan kepada Generasi Baru guru Kedepannya harapannya kendala ekonomis dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi social-ekonomi-politik Negara kita saat ini, sehingga moralitas guru benar-benar dapat kita amalkan sesuai dengan cita-cita Founding Father NKRI dan tanggung jawab historis kita sebagai SOKOGURU perjuangan Bangsa Ini kedepannya. Sehingga kita tidak lagi terjebak pada alunan politik borjuasi yang menyesatkan kita dengan iming-iming kesejahteraan semu. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu membakar semangat kita untuk membebaskan Indonesia dari Imperialisme, karena Hampir 69 Tahun Proklamasi 17 agustus 1945 Indonesia Belum Merdeka 100%.

BAB VI IMPLEMENTASI ANALISIS WACANA KRITIS VAN DIJK DALAM WACANA BERTEMA UJIAN NASIONAL

Seperti halnya pada bab sebelumnya, aspek yang akan dibahas meliputi aspek teks, konteks, dan kognisi sosial. Kajian dalam aspek teks terdiri atas tema, skema, latar, detil, maksud, nominalisasi, koherensi, koherensi kondisional, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, praanggapan, grafis, dan metafora. Selanjutnya memberdayakan konteks. Konteks dalam analisis wacana kritis, diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Terakhir, menganalisis bagaimana suatu teks diproduksi. Kognisi sosial dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai hubungan lebih jauh terkait struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Perhatikan wacana bertema sertifikasi di bawah ini.

Wacana 2a

Bukan UN yang Salah, Kinerja Kemendikbud yang Perlu Diubah

Penulis: Faisal Machmud Al-Rasyid

Sumber: Kompasiana.com

Terlepas dari persoalan penting tidak penting tentang keberadaan Ujian Nasional (UN) mungkin tak salah kita bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN?

Tentu bukan pemerintah -terutama kemendikbud- yang paling bertanggung jawab, melainkan dari siswa sendiri hingga orang tua, guru dan pemerintah bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya UN.

Tolok ukur atau fokus sukses UN itu sendiri juga berbeda persepsinya. Ada merasa kalau sudah ikut UN itu sudah sukses. Sebagian lagi mengira bahwa jika sudah terlaksana UN itu berarti sudah sukses dan sebagian lainnya menilai jika anaknya sudah mendapat nilai bagus itu sebuah sukses yang luar biasa.

Kisruh tentang keberadaan UN itu sendiri kini mencuat kembali hingga silang pendapat tentang keberadaan UN dipertahankan atau dihapuskan itu merebak dimanamana. Situs berita online hingga media massa cetak dan elektronik menyorot habis tentang keberadaan UN dari berbagai dimensi sosial dan pendidikan seperti yang dilansir dari kompas.com

Tapi tahukah kita bahwa pelaksanaan UN kali ini adalah yang TERBURUK dalam sepuluh tahun terakhir? Satu dekade lalu saat lahirnya istilah UN pada 2003 lalu (sebelumnya masih ada sebutan UAN dan EBTANAS) tujuan dan pelaksanaan UN masih dikelola penuh semangat dan cita-cita yang sangat mulia oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun sebelum 2003 pun terdapat pro dan kontra tentang UN dan EBTANAS.

Mengapa tahun ini lebih buruk dan mungkin terburuk pelaksanaannya dalam sejarah UN yang baru seumur jagung?

Lihatlah pada sistem pelaksanaan UN itu. Lihat juga pada aroma politik yang memayungi kemendikbud, lihat juga pada aparatur yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN. Sudah rapikah mereka semua bekerja? Adakah proyek atau bisnis dibalik upaya menggelontorkan semangat UN terutama pada tahun ini?

Mengapa terjadi keterlambatan teramat parah pelaksanaan UN di 11 provinsi bagian timur Indonesia? Mengapa Lembaran Jawaban Komputer (LJK) teramat tipis dan berpotensi merusak LJK tersebut sehingga berdampak pada ketidak mampuan scanner membaca data pada LJK yang rusak.

Mudah ditebak apa dampak scanner tidak dapat membaca LJK yang rusak, nilai akan sangat buruk dan merugikan siswa atau akan terjadi upaya memberi nilai secara manual yang berarti nilai akan sangat luar biasa indahnya.

Kedua prediksi yang mungkin terjadi di atas sama dampaknya yaitu membuat mutu siswa anjlok sedalam-dalamnya.

Bayangkan, orang tua yang memiliki siswa bagus kualitasnya berhadapan dengan LJK yang rusak harus merasakan kegetiran yang amat sangat saat melihat nilai buah hatinya sangat buruk. Orang tua yang mempunyai segudang harapan terenyuh perasaannya melihat kenyataan buah hatinya hanya mendapat nilai 2 atau 3. Siapa yang bertanggung jawab?

Bayangkan juga, siswa satu kabupaten atau satu provinsi tiba tiba nilainya melejit memperoleh angka 9 semua mata pelajaran yang diuji karena terpaksa diisi nilai manual (scanner tak bisa baca LJK), apa kata dunia? Orang tua yang mengetahui kemampuan belajar anaknya pun rasa-rasanya kurang yakin dengan kondisi yang luar biasa dan tiba-tiba berubah fantastis seperti ini.

Sekali lagi, siapa yang salah?

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang merasa paling pintar dan jagonya mengurus pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.

UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional. Sebut saja yang terdekat, Malaysia ada sejenis UN disebut dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada penilaian tahap satu (PTS).

Tahun 2001 telah diganti dengan Ujian Prestasi sekolah dasar.

Singapore ada pelaksanaan UN disebut dengan Primary School Leaving Examination (PLSE). Ada empat mata pelajaran yang diuji untuk siswa SD sebelum mereka lulus dari sekolah dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi.

Inggris ada pelaksanaan ujian sejenis UN misalnya untuk jenjang SMP disebut dengan General Certificate of Secondary Education atau CGSE yang diikuti oleh siswa setingkat SMP. Hebatnya lagi, di Inggris ada dua kantor yang mengawasi mutu pendidikan mereka yaitu dari lembaga pemerintah disebut ditunjuk Kantor Standard Pendidikan, sedangkan dari pihak swasta ditunjuk Inspektorat Sekolah Independen.

Begitu dengan RRC, menurut informasi di negara ini terdapat 400 ribuan SD dengan jumlah siswa mencapai 120 jutaan, melebihi jumlah siswa dan SD di negara kita, akan tetapi pemerintahnya mampu melaksanakan UN dengan baik dan kualitasnya diakui oleh dunia.

Benar di AS tidak ada ujian Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, akan tetapi setiap sekolah melaksanakan ujian sendiri dan setiap negara bagian (state) melaksanakan ujian nasional standard sendiri.

Begitu juga beberapa negara maju lainnya tidak mengadakan ujian nasional seperti Jerman, Australia, Findlandia dan Kanada, akan tetapi negara tersebut telah

mampu menyediakan standard pendidikan yang benar-benar terukur dan terkontrol yaitu :

- Menyediakan dan menyiapkan guru-guru yang profesional dan berkompeten di bidangnya.
- Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang membuat peserta didik belajar penuh riang gembira.
- Menyiapkan media belajar yang berlimpah sehingga peserta didik terbiasa dengan belajar sambil bereksperimen di sekolahnya masing-masing.
- Menyiapkan lembaga khusus yang terus menerus memantau secara simultan dan terukur progres kualitas di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah.

Dengan demikian artinya ujian nasional itu tetap sesuatu yang diperlukan oleh sebuah negara sesuai dengan pola, kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara.

Di negara kita sendiri ujian nasional ini telah ada sejak 1965 hingga sekarang (2013). Beberapa kali program ini telah bergonta ganti nama dan istilah, yaitu :

1. Tahun 1965 - 1971 disebut dengan "Ujian Negara."
2. Tahun 1972 - 1979 dikenal dengan sebutan "Ujian Sekolah."
3. Tahun 1980 - 2000 dikenal dengan sebutan "Evaluasi Belajar tahap Nasional" atau EBTANAS.
4. Tahun 2001 - 2002 berganti lagi nama menjadi "Ujian Akhir Nasional" atau UAN.

5. Tahun 2003 -kini (2013) dikenal dengan nama baru "Ujian Nasional" atau UN

Lihatlah, dari sisi pemberian nama saja dalam kurun waktu 48 tahun sudah berganti 5 nama dan julukan untuk memberi nama ujian tingkat nasional, tak kalah dengan gonta-ganti nama kementerian pendidikan yang telah berganti nama sebanyak 6 kali sejak terbentuk 1945 hingga sekarang.

Soal pergantian menteri pun memecahkan rekor dunia, dalam kurun waktu 68 tahun telah mencetak 26 menteri dengan lama menjabat rata-rata menteri adalah 2,6 tahun. Luar biasa bukan?

Harusnya dari sini kita semua berkaca, apakah dengan menghapus UN tidak akan ada jenis UN lainnya? Jangan-jangan tinggal cuma "ganti baju" saja misalnya MUN "Minimum Ujian Nasional (*bukan Muhammad Nuh* -red) atau nama lainnya.

Jika hanya berganti nama saja untuk apa UN dihapus, bukankah lebih bijaksana memperbaiki sistem dan aparatur pelaksanaannya saja? Atau mari kita tiru beberapa negara maju yang TIDAK melaksanakan UN di atas. Pertanyaannya : apakah kita sudah sampai pada taraf perekonomian seperti negara maju di atas?

Jika tidak ada jawaban atau solusinya apa lagi pilihan kita selain ribut-ribut soal UN..? Sebagian orang mungkin memberi jawaban atas pertanyaan ini "*inilah pertanyaan*

orang yang tidak menguasai bidangnya alias bukan ahlinya." He..he..he..he..

Salam Kompasiana

1. Teks

Teks dalam analisis wacana kritis merupakan bentuk kesatuan antara struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Hal yang diamati dalam struktur makro adalah tema/topik, hal yang diamati dalam superstruktur adalah skema sedangkan hal yang diamati dalam struktur mikro adalah latar, detil, maksud, koherensi, koherensi kondisional, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, praanggapan, grafis, dan metafora.

a. Tema

Tema dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai suatu gambaran umum dari sebuah teks atau wacana. Tema dapat juga dikatakan gagasan pokok atau inti dari sebuah wacana. Pencarian tema dalam wacana dilakukan dengan membaca wacana secara keseluruhan. Tema dalam sebuah wacana akan didukung oleh subtema-subtema yang bersifat mendukung tema.

Tema Wacana 2a

Tema: Ujian Nasional (UN) Harus Tetap Dilaksanakan
Karena Selama ini Permasalahan Terletak pada
Pelaksana

Tema umum dari wacana 2a adalah “ujian nasional harus tetap dilaksanakan karena selama ini permasalahan yang terjadi disebabkan oleh penyelenggara ujian nasional (Kemendikbud). Untuk mendukung dan memperkuat tema umum, pembuat wacana menyampaikan subtema yang disusun secara runtun dan tegas. Subtema pertama yang digunakan oleh pembuat wacana untuk mendukung tema umum diawali dengan pernyataan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan UN disebabkan oleh adanya kepentingan politik. Berikut kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Lihatlah pada sistem pelaksanaan UN itu. Lihat juga pada aroma politik yang memayungi kemendikbud, lihat juga pada aparatur yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN. Sudah rapikah mereka semua bekerja? Adakah proyek atau bisnis dibalik upaya menggelontorkan semangat UN terutama pada tahun ini?

Subtema kedua yang disampaikan penulis adalah bahwa Kemendikbud adalah pihak yang menyebabkan terjadinya banyak kesalahan pada pelaksanaan UN. Berikut kutipan yang mendukung subtema ini.

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang merasa paling pintar dan jagonya mengurus pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.

Subtema terakhir yang menjadi klimaks utama wacana *2a* adalah bahwa UN harus tetap dilaksanakan karena penghapusan UN hanya akan melahirkan “UN” lainnya dengan nama berbeda dan pada dasarnya UN juga dilaksanakan oleh banyak negara. Berikut kutipan yang mendukung subtema terakhir pada wacana *2a*.

UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional

Dengan demikian artinya ujian nasional itu tetap sesuatu yang diperlukan oleh sebuah negara sesuai dengan pola, kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara.

Tema	
Tema umum	Ujian Nasional (UN) harus tetap dilaksanakan karena selama ini permasalahan terletak pada pelaksana
Subtema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan UN disebabkan oleh adanya kepentingan politik 2. Kemendikbud adalah pihak yang menyebabkan terjadinya banyak kesalahan pada pelaksanaan UN 3. UN harus tetap dilaksanakan karena penghapusan UN hanya akan melahirkan "UN" lainnya dengan nama berbeda dan pada dasarnya UN juga dilaksanakan oleh banyak negara

b. Skema

Skema merupakan alur yang disusun oleh pembuat wacana sehingga wacana yang ditulisnya memunyai kesatuan arti. Skema dapat juga dikatakan urutan dalam penyampaian ide dari pembuat wacana. Melalui skema, pembuat wacana akan memberikan tekanan bagian mana yang akan didahulukan dan bagian mana yang kemudian digunakan untuk menyembunyikan informasi penting yang tidak didukungnya. Penyembunyian informasi penting biasanya

dilakukan dengan cara menuliskannya di bagian akhir sehingga terkesan kurang menonjol.

Skema Wacana 2a

Skema dalam wacana ini terbagi menjadi dua, *summary* dan *story*. *Summary* terbagi menjadi judul dan lead. Judul dalam wacana ini adalah Bukan UN yang Salah, Kinerja Kemendikbud yang Perlu Diubah. Sementara itu, lead dalam wacana ini memaparkan ringkasan terkait persoalan siapakah yang paling bertanggungjawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN. Pembuat wacana menyampaikan lead dengan menggunakan kalimat tanya mengenai penting atau tidaknya pelaksanaan UN? Terlepas dari penting atau tidaknya, pembuat wacana langsung memberikan pertanyaan selanjutnya mengenai sosok yang harus bertanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan UN. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Terlepas dari persoalan penting tidak penting tentang keberadaan Ujian Nasional (UN) mungkin tak salah kita bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN?

Selanjutnya pemaparan *story* dalam wacana juga dibagi menjadi dua, yaitu situasi dan komentar. Situasi atau

jalannya peristiwa merupakan pemaparan secara rinci terkait fenomena atau kejadian yang dipaparkan dalam wacana. Dalam hal ini pembuat wacana memaparkan hal terkait sistem pelaksanaan UN yang masih beraroma politik yang melingkupi Kemendikbud. Kemudian pembuat wacana juga memaparkan hal terkait bagaimana aparatur yang ditugasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN. Masih banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan UN di 11 provinsi bagian timur Indonesia, lembar jawaban komputer yang berkualitas rendah, bahkan lembar jawaban tidak mampu untuk dibaca *scanner*. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Lihatlah pada sistem pelaksanaan UN itu. Lihat juga pada aroma politik yang memayungi kemendikbud, lihat juga pada aparatur yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN. Sudah rapikah mereka semua bekerja? Adakah proyek atau bisnis dibalik upaya menggelontorkan semangat UN terutama pada tahun ini?

Mengapa terjadi keterlambatan teramat parah pelaksanaan UN di 11 provinsi bagian timur Indonesia? Mengapa Lembaran Jawaban Komputer (LJK) teramat tipis dan berpotensi merusak LJK tersebut

sehingga berdampak pada ketidak mampuan scanner membaca data pada LJK yang rusak.

Selain hal-hal di atas, pembuat wacana juga memaparkan situasi terkait fenomena pemberian hasil UN yang tidak sesuai dengan kualitas anak didik. Siswa yang mempunyai kualitas yang cukup baik bisa saja dirugikan karena kondisi lembar jawaban komputer yang tidak bisa dibaca oleh *scanner* atau kondisi sebaliknya. Siswa yang tidak mempunyai kualitas yang baik akan mendapatkan nilai yang fantastis karena lembar jawaban komputer tidak bisa dibaca oleh *scanner* dan akhirnya guru memberikan nilai secara manual. Fenomena-fenomena tersebut menjadi suatu yang menonjolkan oleh pembuat wacana untuk menyebut Kemendikbud sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena Kemendikbudlah pihak yang mempunyai wewenang terbesar untuk mengatur dunia pendidikan. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Bayangkan, siswa yang baik kualitasnya dan harus berhadapan dengan LJK yang rusak akan merasakan kegetiran yang amat sangat saat melihat nilai buah hatinya sangat buruk.

Bayangkan juga, siswa satu kabupaten atau satu provinsi tiba tiba nilainya melejit memperoleh angka 9

semua mata pelajaran yang diuji karena terpaksa diisi nilai manual (scanner tak bisa baca LJK), apa kata dunia?

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud.

Pemaparan terakhir adalah tentang komentar yang merupakan pendapat pribadi dari pembuat wacana. Dalam wacana ini pembuat wacana memberikan komentar mengenai UN tidak salah karena pelaksanaan UN juga dilakukan di beberapa negara lain. Hal ini berarti UN masih diperlukan, yang salah adalah pelaksanaannya yakni Kemendikbud. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional.

Dengan demikian artinya ujian nasional itu tetap sesuatu yang diperlukan oleh sebuah negara sesuai dengan pola, kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara.

Skema		
Summary	Judul	Bukan UN yang Salah, Kinerja Kemendikbud yang Perlu Diubah
	Lead	Memaparkan ringkasan terkait persoalan siapakah yang paling

		bertanggungjawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN
Story	Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaparkan hal terkait sistem pelaksanaan UN yang masih beraroma politik yang melingkupi Kemendikbud 2. Masih banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan UN di 11 provinsi bagian timur Indonesia, lembar jawaban komputer yang berkualitas rendah, bahkan lembar jawaban tidak mampu untuk dibaca scanner
	Komentar	Komentar mengenai UN tidak salah karena pelaksanaan UN juga dilakukan di beberapa negara lain. Hal ini berarti UN masih diperlukan, yang salah adalah pelaksanaannya yakni Kemendikbud

c. Latar

Latar merupakan suatu penggambaran ke arah mana wacana akan dibawa oleh pembuat wacana. Latar akan memengaruhi

pandangan khalayak pembaca terhadap wacana. Hal ini merupakan cerminan ideologis yang coba disajikan oleh pembuat wacana. Misalnya wacana berisi tentang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, ketika pembuat wacana setuju dengan perbuatan mahasiswa, maka yang akan dipaparkan dalam wacana tersebut adalah keberhasilan demonstrasi mahasiswa dalam membuat perubahan.

Latar Wacana 2a

Latar yang disampaikan oleh pembuat wacana 2a untuk menggiring pembaca pada pokok permasalahan cenderung disampaikan secara hati-hati. Langkah ini mungkin diambil agar pembaca berfokus pada pokok permasalahan yang ingin disampaikan dan untuk menghindari adanya perdebatan-perdebatan yang berada di luar pokok permasalahan. Selain itu, langkah seperti ini juga diambil agar pembaca menempatkan wacana 2a sebagai wacana yang telah mempertimbangkan setiap sudut dan cara pandang. Hal ini terlihat dari pemaparan tulisan pada awal-awal paragraf yang cenderung menunjukkan sikap netral, ketidakberpihakan, dan cara pandang yang proporsional. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan ini.

Terlepas dari persoalan penting tidak penting tentang keberadaan Ujian Nasional (UN) mungkin tak salah kita bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN?

Tentu bukan pemerintah -terutama kemendikbud- yang paling bertanggung jawab, melainkan dari siswa sendiri hingga orang tua, guru dan pemerintah bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya UN.

Tolok ukur atau fokus sukses UN itu sendiri juga berbeda persepsinya. Ada yang mungkin merasa kalau sudah ikut UN itu sudah sukses. Sebagian lagi mengira bahwa jika sudah terlaksana UN itu berarti sudah sukses tugasnya dan sebagian lainnya menilai jika anaknya sudah mendapat nilai bagus itu sebuah sukses yang luar biasa.

Wacana kemudian dilanjutkan dengan paragraf-paragraf yang memaparkan dan mengarahkan pada titik atau sudut pandang tertentu. Ini dilakukan untuk menggiring pembaca dalam menggunakan cara berpikir tertentu sebelum memasuki tujuan penulisan yang ingin dicapai. Berikut adalah kutipan pendukungnya.

Tapi tahukah kita bahwa pelaksanaan UN kali ini adalah yang TERBURUK dalam sepuluh tahun terakhir? Satu dekade lalu saat lahirnya istilah UN pada 2003 lalu (sebelumnya masih ada sebutan UN dan EBTANAS) tujuan dan pelaksanaan UN masih dikelola penuh semangat dan cita-cita yang sangat mulia oleh

seluruh lapisan masyarakat meskipun sebelum 2003 pun terdapat pro dan kontra tentang UN dan EBTANAS.

Mengapa tahun ini lebih buruk dan mungkin terburuk pelaksanaannya dalam sejarah UN yang baru seumur jagung?

Lihatlah pada sistem pelaksanaan UN itu. Lihat juga pada aroma politik yang memayungi kemendikbud, lihat juga pada aparatur yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN. Sudah rapikah mereka semua bekerja? Adakah proyek atau bisnis dibalik upaya menggelontorkan semangat UN terutama pada tahun ini?

Mengapa terjadi keterlambatan teramat parah pelaksanaan UN di 11 provinsi bagian timur Indonesia? Mengapa Lembaran Jawaban Komputer (LJK) teramat tipis dan berpotensi merusak LJK tersebut sehingga berdampak pada ketidak mampuan scanner membaca data pada LJK yang rusak.

Setelah wacana menciptakan sudut pandang tertentu, paragraf selanjutnya kemudian mengarah pada pokok permasalahan yang ingin disampaikan. Pada paragraf ini, pemaparan disampaikan lebih tegas dan berani. Bahkan, penulis wacana tidak segan-segan menyebutkan Kemendikbud sebagai penyebab permasalahan yang timbul pada pelaksanaan UN. Hal ini menunjukkan bahwa wacana

menggiring pembaca untuk memunyai dasar untuk melakukan pemvonisan terhadap penyebab permasalahan yang timbul pada pelaksanaan UN. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan ini.

Sekali lagi, siapa yang salah?

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang merasa paling pintar dan jagonya mengurus pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.

Penulisan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan fakta-fakta yang mendukung keberadaan UN. Penulis wacana menyampaikan bahwa UN juga dilaksanakan di banyak negara meskipun sebutannya berbeda-beda untuk tiap negara. Pada tahap ini, pembaca diarahkan oleh penulis agar setuju pada pernyataan dalam wacana 2a. Berikut ini beberapa kutipan pendukung pernyataan ini.

Singapore ada pelaksanaan UN disebut dengan Primary School Leaving Examination (PLSE). Ada empat mata pelajaran yang diuji untuk siswa SD sebelum mereka lulus dari sekolah dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi.

Inggris ada pelaksanaan ujian sejenis UN misalnya untuk jenjang SMP disebut dengan General Certificate of Secondary Education atau CGSE yang diikuti oleh siswa setingkat SMP. Hebatnya lagi, di Inggris ada dua kantor yang mengawasi mutu pendidikan mereka yaitu dari lembaga pemerintah disebut ditunjuk Kantor Standard Pendidikan, sedangkan dari pihak swasta ditunjuk Inspektorat Sekolah Independen.

Begitu dengan RRC, menurut informasi di negara ini terdapat 400 ribuan SD dengan jumlah siswa mencapai 120 jutaan, melebihi jumlah siswa dan SD di negara kita, akan tetapi pemerintahnya mampu melaksanakan UN dengan baik dan kualitasnya diakui oleh dunia.

Selanjutnya, pembaca diberikan pandangan bahwa penghapusan UN hanya akan memicu kemunculan ujian-ujian sejenis yang mungkin menimbulkan kerumitan masalah yang sama. Pada akhir wacana, penulis wacana kembali menunjukkan sikap yang seolah-olah netral atau tidak berpihak untuk menghindari adanya perdebatan-perdebatan yang tidak mengarah pada hal yang esensi. Ketidakberpihakan pembuat wacana ditunjukkan dengan pemberian pertanyaan diakhir wacana. Berikut kutipan yang mendukung pernyataan ini.

Harusnya dari sini kita semua berkaca, apakah dengan menghapus UN tidak akan ada jenis UN lainnya? Jangan-jangan tinggal cuma “ganti baju” saja misalnya

MUN “Minimum Ujian Nasional (bukan Muhammad Nuh -red) atau nama lainnya.

Jika hanya berganti nama saja untuk apa UN dihapus, bukankah lebih bijaksana memperbaiki sistem dan aparatur pelaksanaannya saja? Atau mari kita tiru beberapa negara maju yang TIDAK melaksanakan UN di atas. Pertanyaannya : apakah kita sudah sampai pada taraf perekonomian seperti negara maju di atas?

Jika tidak ada jawaban atau solusinya apa lagi pilihan kita selain ribut-ribut soal UN..? Sebagian orang mungkin memberi jawaban “inilah pertanyaan orang yang tidak menguasai bidangnya alias bukan ahlinya.” He..he..he..he..

Hal yang Melatari Pembuat Wacana Menulis	Sikap setuju pembuat wacana dalam pelaksanaan ujian nasional
Latar	Ujian nasional merupakan ujian akhir yang banyak dilakukan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Namun pelaksanaan ujian nasional di Indonesia setiap tahun mengalami penurunan kualitas. Pandangan bahwa penghapusan UN hanya akan memicu kemunculan ujian-ujian sejenis yang mungkin menimbulkan kerumitan masalah yang sama, untuk apa menghapus UN jika pada dasarnya hanya

	mengganti nama dari UN itu sendiri.
Tanpa latar	Ujian nasional merupakan ujian akhir yang banyak dilakukan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia.

d. Detil

Detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh pembuat wacana. Dengan adanya detil, pembuat wacana akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dan menampilkan informasi yang sedikit jika hal itu merugikan. Detil yang panjang merupakan strategi penonjolan informasi yang dilakukan pembuat wacana untuk menciptakan citra tertentu terhadap khalayak/pembaca.

Detil Wacana 2a

Wacana 2a setidaknya menampilkan dua detil penting dan utama: pemaparan bahwa permasalahan UN disebabkan oleh penyelenggara (Kemendikbud) dan penegasan mengenai pelaksanaan UN sejenis di negara lain. Wacana 2a memberikan informasi cukup panjang dan mendetil tentang

permasalahan-permasalahan pada UN yang disebabkan oleh penyelenggara. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada UN itu sendiri melainkan pada penyelenggaranya yang belum maksimal. Berikut adalah kutipan yang mendukung detail pertama ini.

Lihatlah pada sistem pelaksanaan UN itu. Lihat juga pada aroma politik yang memayungi kemendikbud, lihat juga pada aparatur yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN. Sudah rapikah mereka semua bekerja? Adakah proyek atau bisnis dibalik upaya menggelontorkan semangat UN terutama pada tahun ini?

Mengapa terjadi keterlambatan teramat parah pelaksanaan UN di 11 provinsi bagian timur Indonesia? Mengapa Lembaran Jawaban Komputer (LJK) teramat tipis dan berpotensi merusak LJK tersebut sehingga berdampak pada ketidak mampuan scanner membaca data pada LJK yang rusak.

Bayangkan, siswa yang baik kualitasnya dan harus berhadapan dengan LJK yang rusak akan merasakan kegetiran yang amat sangat saat melihat nilai buah hatinya sangat buruk. Orang tua yang mempunyai segudang harapan terenyuh perasaannya melihat kenyataan buah hati dan harapan masa depannya hanya mendapat nilai 2 atau 3. Siapa yang bertanggung jawab?

Detil mengenai penyelenggaraan UN yang bermasalah disampaikan secara informatif. Selain penyelenggaraan UN, detil yang disampaikan secara lengkap, panjang, dan tegas adalah keberadaan pelaksanaan ujian serupa UN pada banyak negara. Pembuat wacana menyampaikan informasi ini guna memperkuat tujuan penulisan (memengaruhi pembaca) dengan membandingkan pelaksanaan UN di Indonesia dengan di negara lain.

UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional. Sebut saja yang terdekat, Malaysia ada sejenis UN disebut dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada penilaian tahap satu (PTS). Tahun 2001 telah diganti dengan Ujian Prestasi sekolah dasar.

Singapore ada pelaksanaan UN disebut dengan Primary School Leaving Examination (PLSE). Ada empat mata pelajaran yang diuji untuk siswa SD sebelum mereka lulus dari sekolah dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi.

Inggris ada pelaksanaan ujian sejenis UN misalnya untuk jenjang SMP disebut dengan *General Certificate of Secondary Education* atau CGSE yang diikuti oleh siswa setingkat SMP. Hebatnya lagi, di Inggris ada dua kantor yang mengawasi mutu pendidikan mereka yaitu dari lembaga pemerintah disebut ditunjuk Kantor Standard Pendidikan, sedangkan dari pihak swasta ditunjuk Inspektorat Sekolah Independen.

Begitu dengan RRC, menurut informasi di negara ini terdapat 400 ribuan SD dengan jumlah siswa mencapai 120 jutaan, melebihi jumlah siswa dan SD di negara kita, akan tetapi pemerintahnya mampu melaksanakan UN dengan baik dan kualitasnya diakui oleh dunia.

Benar di AS tidak ada ujian Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, akan tetapi setiap sekolah melaksanakan ujian sendiri dan setiap negara bagian (state) melaksanakan ujian nasional standard sendiri.

Detil	Lihatlah pada sistem pelaksanaan UN itu. Lihat juga pada aroma politik yang memayungi kemendikbud, lihat juga pada aparatur yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN. Sudah rapikah mereka semua bekerja? Adakah proyek atau bisnis dibalik upaya menggelontorkan semangat UN terutama pada tahun ini?
Tanpa detil	Lihatlah pada sistem pelaksanaan UN itu.
Detil	UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional. Sebut saja yang terdekat, Malaysia ada sejenis UN disebut dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada penilaian tahap satu (PTS). Tahun 2001 telah diganti dengan Ujian Prestasi sekolah dasar. Singapore ada pelaksanaan UN disebut dengan Primary School Leaving Examination (PLSE). Ada empat mata

	pelajaran yang diuji untuk siswa SD sebelum mereka lulus dari sekolah dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Inggris ada pelaksanaan ujian sejenis UN misalnya untuk jenjang SMP disebut dengan General Certificate of Secondary Education atau CGSE yang diikuti oleh siswa setingkat SMP.
Tanpa detail	UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional.

e. Maksud

Elemen maksud dalam wacana merupakan cara penyajian informasi yang dilakukan oleh pembuat wacana. Informasi yang menguntungkan diuraikan secara eksplisit atau jelas sedangkan informasi yang merugikan diuraikan secara implisit atau tersembunyi.

Maksud Wacana 2a

Maksud dalam wacana *2a* disampaikan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sesuai dengan karakteristik unsur-unsur teks sebelumnya, tulisan wacana *2a* cenderung disampaikan secara hati-hati dan terkesan netral. Meskipun dalam bentuk kalimat pertanyaan atau dilakukan secara implisit, maksud disampaikan lebih tegas. Langkah ini mungkin adalah

langkah aman yang diambil untuk menghindari prasangka-prasangka pembaca terhadap tulisan. Berikut ini adalah kutipan yang mendukung pernyataan ini.

Terlepas dari persoalan penting tidak penting tentang keberadaan Ujian Nasional (UN) mungkin tak salah kita bertanya, **siapa yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN?**

Pada tulisan yang bercetak tebal di atas, maksud disampaikan untuk kemudian mempertanyakan sumber penyebab permasalahan UN, dan menggiring publik menuju inti dari tulisan, yaitu bahwa UN tidak salah, Mendikbud-lah yang salah. Selain penyampaian maksud dalam bentuk pertanyaan, maksud juga disampaikan dengan pemaparan data-data pendukung yang lebih banyak daripada data yang tidak mendukung. Pada tahapan ini, tulisan ditujukan untuk memperkuat asumsi-asumsi yang telah disampaikan sebelumnya dalam tulisan. Berikut ini adalah kutipan-kutipan yang mendukung.

Singapore ada pelaksanaan UN disebut dengan Primary School Leaving Examination (PLSE). Ada empat mata pelajaran yang diuji untuk siswa SD sebelum mereka lulus dari sekolah dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi.

Inggris ada pelaksanaan ujian sejenis UN misalnya untuk jenjang SMP disebut dengan General Certificate of Secondary Education atau CGSE yang diikuti oleh siswa setingkat SMP. Hebatnya lagi, di Inggris ada dua kantor yang mengawasi mutu pendidikan mereka yaitu dari lembaga pemerintah disebut ditunjuk Kantor Standard Pendidikan, sedangkan dari pihak swasta ditunjuk Inspektorat Sekolah Independen.

Begitu dengan RRC, menurut informasi di negara ini terdapat 400 ribuan SD dengan jumlah siswa mencapai 120 jutaan, melebihi jumlah siswa dan SD di negara kita, akan tetapi pemerintahnya mampu melaksanakan UN dengan baik dan kualitasnya diakui oleh dunia.

Pemaparan data pendukung yang disampaikan dalam jumlah lebih banyak dirasa belum cukup untuk memperkuat asumsi sehingga data pendukung selanjutnya mengambil contoh negara besar “Amerika Serikat”, untuk lebih mempertegas asumsi-asumsi sebelumnya yang telah dibangun. Pada tahapan ini, tulisan yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi data pendukung sebelumnya dibuat seolah-olah mendukung asumsi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya penyampaian informasi yang tidak menguntungkan secara implisit. Berikut ini adalah kutipan yang mendukung.

Benar di AS tidak ada ujian Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, akan tetapi setiap sekolah melaksanakan ujian sendiri dan setiap negara bagian (state) melaksanakan ujian nasional standard sendiri.

Maksud	
Eksplisit	Terlepas dari persoalan penting tidak penting tentang keberadaan Ujian Nasional (UN) mungkin tak salah kita bertanya, Kemendikbudlah paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN.
Implisit	Terlepas dari persoalan penting tidak penting tentang keberadaan Ujian Nasional (UN) mungkin tak salah kita bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN?

f. Praanggapan

Praanggapan merupakan upaya mendukung pendapat dengan menggunakan premis yang dapat dipercaya. Praaangapan hadir dengan pernyataan yang dapat dipercaya dengan tujuan agar pernyataan tidak perlu dipertanyakan.

Pranggapan Wacana 2a

Praanggapan pada wacana 2a tergambar pada paragraf terakhir. Paragraf tersebut memaparkan tentang anggapan dari pembuat wacana mengenai sikap setujunya terhadap pelaksanaan UN. Tidak tepat jika UN dihapus, menurut

pembuat wacana lebih baik melakukan perbaikan sistem dan aparaturnya saja. Pembuat wacana juga menawarkan pendapat sebaliknya, jika Indonesia memang ingin menghapus UN, sudah siapkah Indonesia menyediakan standar pendidikan yang terukur dan terkontrol seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Jika hanya berganti nama saja untuk apa UN dihapus, bukankah lebih bijaksana memperbaiki sistem dan aparaturnya saja? Atau mari kita tiru beberapa negara maju yang TIDAK melaksanakan UN di atas.

Praanggapan	Jika hanya berganti nama saja untuk apa UN dihapus, bukankah lebih bijaksana memperbaiki sistem dan aparaturnya saja? Atau mari kita tiru beberapa negara maju yang TIDAK melaksanakan UN di atas.
Tanpa Praanggapan	lebih bijaksana memperbaiki sistem dan aparaturnya saja.

g. Nominalisasi

Nominalisasi merupakan proses perubahan kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya dilakukan dengan memberikan imbuhan 'pe-an'. Nominalisasi dapat

menghilangkan subjek dalam suatu wacana. Melalui strategi ini pembuat wacana dapat menghilangkan subjek dengan menggunakan nominalisasi jika informasi itu menguntungkan. Misalnya kata 'menembak', dalam sebuah kalimat, kata 'menembak' selalu memerlukan subjek siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal tersebut harus ada dalam kalimat agar memunyai arti. Sebaliknya, kata benda tidak memerlukan subjek karena ia hadir mandiri dalam sebuah kalimat. Kata 'penembakan' tidak memerlukan kehadiran subjek.

Nominalisasi Wacana 2a

Tidak ditemukan nominalisasi dalam wacana 2a

h. Peningkaran

Peningkaran merupakan cara pembuat wacana menyembunyikan apa yang ingin diungkapkannya. Pembuat wacana seolah-olah menyetujui sesuatu, padahal ia tidak setuju dengan jalan memberikan argumen atau fakta untuk penyangkalan. Peningkaran akan ditandai dengan penggunaan kata 'tetapi' atau 'namun' setelah sebuah pernyataan dibuat.

Pengingkaran Wacana 2a

Dalam wacana kritis, pengingkaran dapat disebut sebagai cara aman untuk menyampaikan pernyataan kritis. Pengingkaran dilakukan untuk memperkecil asumsi-asumsi negatif pembaca ketika menyampaikan informasi yang sensitif. Pada wacana 2a, pengingkaran dilakukan antar paragraf. Artinya, pernyataan pada paragraf pertama kemudian diingkari pada pernyataan paragraf selanjutnya. Berikut ini adalah pernyataan pada kutipan yang pertama.

Tentu bukan pemerintah -terutama kemendikbud- yang paling bertanggung jawab, melainkan dari siswa sendiri hingga orang tua, guru dan pemerintah bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya UN.

Pada paragraf II, kutipan di atas, penulis menuliskan bahwa “Tentu bukan pemerintah -terutama kemendikbud- yang paling bertanggung jawab”. Ini menunjukkan bahwa Kemendikbud bukan pihak yang bersalah pada pelaksanaan UN. Namun pada paragraf XII, pernyataan pada paragraf II kemudian diingkari. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan ini.

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang merasa paling pintar dan jagonya mengurus pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan

program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.

Pengingakaran selanjutnya adalah ketika penulis menyampaikan bahwa UN sebenarnya dilaksanakan di banyak negara namun namanya saja yang berbeda. Kemudian, penulis menyampaikan bahwa ada beberapa negara yang tidak menyelenggarakan UN karena negara tersebut telah menyediakan standar pendidikan yang benar-benar terukur dan terkontrol. Berikut ini adalah kutipannya.

Begitu juga beberapa negara maju lainnya tidak mengadakan ujian nasional seperti Jerman, Australia, Finlandia dan Kanada, akan tetapi negara tersebut telah mampu menyediakan standard pendidikan yang benar-benar terukur dan terkontrol yaitu:

- Menyediakan dan menyiapkan guru-guru yang profesional dan berkompeten di bidangnya.
- Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang membuat peserta didik belajar penuh riang gembira.
- Menyiapkan media belajar yang berlimpah sehingga peserta didik terbiasa dengan belajar sambil bereksperimen di sekolahnya masing-masing.
- Menyiapkan lembaga khusus yang terus menerus memantau secara simultan dan terukur progres kualitas di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah.

Berdasarkan kutipan di atas, sudah tentu, keadaan pendidikan di Indonesia masih belum sesuai dengan keadaan yang digambarkan di atas. Artinya, Indonesia masih harus melaksanakan UN sebagai usaha untuk mengukur dan mengontrol mutu pendidikan di Indonesia. Peningkaran terjadi pada paragraf XXVI, penulis mengajak pembaca untuk tidak melaksanakan UN, yang kemudian ditutup dengan pertanyaan retorik. Berikut ini adalah pernyataan yang mendukung.

Jika hanya berganti nama saja untuk apa UN dihapus, bukankah lebih bijaksana memperbaiki sistem dan aparatur pelaksanaannya saja? Atau mari kita tiru beberapa negara maju yang TIDAK melaksanakan UN di atas. Pertanyaannya : apakah kita sudah sampai pada taraf perekonomian seperti negara maju di atas?

<p>Peningkaran antarparagraf</p>	<p>Tentu bukan pemerintah - terutama kemendikbud- yang paling bertanggung jawab, melainkan dari siswa sendiri hingga orang tua, guru dan pemerintah bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya UN.</p> <p>Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang</p>
----------------------------------	--

	<p>merasa paling pintar dan jagonya mengurus pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.</p>
Tanpa Peningkaran	<p>Tentu bukan pemerintah - terutama kemendikbud- yang paling bertanggung jawab, melainkan dari siswa sendiri hingga orang tua, guru dan pemerintah bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya UN.</p>
Peningkaran antarkalimat	<p>Begitu juga beberapa negara maju lainnya tidak mengadakan ujian nasional seperti Jerman, Australia, Findlandia dan Kanada, akan tetapi negara tersebut telah mampu menyediakan standard pendidikan yang benar-benar terukur dan terkontrol</p>
Tanpa Peningkaran	<p>Begitu juga beberapa negara maju lainnya tidak mengadakan ujian nasional seperti Jerman, Australia, Findlandia dan Kanada.</p>

i. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat akan terkait dengan penggunaan struktur bahasa oleh pembuat wacana. Penggunaan kalimat berstruktur aktif akan berbeda makna atau tujuan penulisan dengan penggunaan kalimat berstruktur pasif. Bentuk kalimat aktif akan menonjolkan seseorang sebagai subjek pernyataan sedangkan bentuk kalimat pasif akan menonjolkan peristiwa dalam pernyataan.

Bentuk Kalimat Wacana 2a

Bentuk kalimat pada wacana 2a banyak menggunakan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif pada wacana 2a menunjukkan bahwa tulisan berfokus pada pihak-pihak tertentu. Hal ini tentunya sesuai dengan judul yang digunakan oleh penulis dalam wacana 2a, yaitu “Bukan UN yang Salah, Kinerja Kemendikbud yang Perlu Diubah”. Pada beberapa paragraf dalam wacana 2a, fokus penulisan memang cenderung mengangkat Kemendikbud sebagai bahan pembicaraan. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang merasa paling pintar dan jagonya mengurus

pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.

UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional. Sebut saja yang terdekat, Malaysia ada sejenis UN disebut dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada penilaian tahap satu (PTS). Tahun 2001 telah diganti dengan Ujian Prestasi sekolah dasar.

Bentuk Kalimat	
Aktif	UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional.
Pasif	Ujian bertaraf nasioanal harus diikuti siswa.

j. Koherensi

Koherensi merupakan pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam sebuah teks. Pertalian atau jalinan antarkata atau kalimat dalam sebuah teks dapat terbentuk melalui penggunaan kata hubung. Kata hubung yang digunakan dalam koherensi adalah kata hubung 'dan' dan kata hubung 'akibat'. Kata hubung tersebut yang akan menentukan bagaimana dua buah kalimat yang menggambarkan fakta dihubungkan.

Koherensi Wacana 2a

Koherensi dalam wacana kritis adalah suatu cara untuk menyampaikan fakta dengan deret-deret penguatan sehingga fakta dapat tersampaikan secara representatif, dan mendukung asumsi-asumsi yang ingin dibentuk melalui tulisan. Pada wacana 2a, fakta disampaikan dan kemudian dihubungkan menggunakan lingkup-lingkup bahasan (melalui makna kata) yang memiliki keterkaitan makna. Keterkaitan makna tersebut dimanfaatkan untuk membentuk fakta-fakta yang mendukung wacana 2a. Berikut adalah kutipannya.

Bayangkan, siswa yang baik kualitasnya dan harus berhadapan dengan LJK yang rusak akan merasakan kegetiran yang amat sangat saat melihat nilai buah hatinya sangat buruk. Orang tua yang mempunyai segudang harapan terenyuh perasaannya melihat kenyataan buah hati dan harapan masa depannya hanya mendapat nilai 2 atau 3. Siapa yang bertanggung jawab?

Penggunaan koherensi pada wacana 2a selanjutnya terjadi pada kutipan di bawah ini. Pada kutipan tersebut, fakta pertama (*Un tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional*) dihubungkan dengan fakta kedua (*sebut saja yang terdekat, Malaysia ada sejenis UN*

disebut dengan *Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada penilaian tahap satu (PTS)*. Tahun 2001 telah diganti dengan *Ujian Prestasi sekolah dasar*. Koherensi memang tidak disampaikan menggunakan kata hubung yang eksplisit, koherensi pada kutipan wacana 2a di bawah ini cenderung terbentuk karena pertalian makna antarkalimat.

UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional. Sebut saja yang terdekat, Malaysia ada sejenis UN disebut dengan *Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada penilaian tahap satu (PTS)*. Tahun 2001 telah diganti dengan *Ujian Prestasi sekolah dasar*.

Koherensi	
Kata hubung 'dan;'	Bayangkan, siswa yang baik kualitasnya dan harus berhadapan dengan LJK yang rusak akan merasakan kegetiran yang amat sangat saat melihat nilai buah hatinya sangat buruk.
Pertalian makna	UN tidak salah karena di beberapa negara pun siswa harus mengikuti ujian bertaraf nasional. *Sebut saja yang terdekat, Malaysia ada sejenis UN disebut dengan <i>Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada penilaian tahap satu (PTS)</i> . Tahun 2001 telah diganti dengan <i>Ujian Prestasi sekolah dasar</i> .

k. Koherensi Kondisional

Penggunaan koherensi kondisional ditandai dengan adanya kalimat penjelas. Koherensi kondisional akan ditandai dengan penggunaan kata hubung 'yang' dan 'dimana'. Kalimat kedua akan berfungsi sebagai kalimat penjelas (anak kalimat) sehingga ada atau tidaknya anak kalimat tersebut tidak akan memengaruhi arti kalimat.

Koherensi Kondisional Wacana 2a

Koherensi kondisional wacana 2a setidaknya-tidaknya terdiri atas dua bentuk. Pertama, koherensi kondisional menggunakan kata hubung "yang" yang mengarah kepada penjelas pernyataan atau kata sebelumnya. Keberadaan penjelas ini sebenarnya tidak memengaruhi makna yang hendak disampaikan. Kedua, tanpa kata hubung, disampaikan melalui kalimat tambahan yang menjadi penjelas. Koherensi kondisional dibentuk setelah kalimat diakhiri oleh tanda titik. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Kedua prediksi yang mungkin terjadi di atas sama dampaknya yaitu membuat mutu siswa anjlok sedalam-dalamnya.

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang merasa paling pintar dan jagonya mengurus pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.

Koherensi Kondisional	Kedua prediksi <u>yang mungkin terjadi di atas</u> sama dampaknya yaitu membuat mutu siswa anjlok sedalam-dalamnya.
Tanpa Koherensi Kondisional	Kedua prediksi di atas sama dampaknya yaitu membuat mutu siswa anjlok sedalam-dalamnya.
Koherensi Kondisional	Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang merasa paling pintar dan jagonya mengurus pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.
Tanpa Koherensi Kondisional	Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud.

I. Koherensi Pembeda

Koherensi pembeda berhubungan dengan bagaimana dua peristiwa atau fakta itu dibedakan. Dua buah peristiwa atau fakta akan dibuat seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan dengan menggunakan koherensi ini.

Koherensi Pembeda Wacana 2a

Tidak ditemukan koherensi pembeda pada wacana 2a.

m. Kata Ganti

Kata ganti merupakan alat yang digunakan oleh pembuat wacana untuk menunjukkan dimana posisi ia dalam sebuah wacana. Dalam mengungkapkan sikap seseorang dapat menggunakan kata ganti 'saya', 'kami', atau 'kita'. Penggunaan kata ganti 'saya' atau 'kami' akan menunjukkan sikap resmi pembuat wacana sedangkan kata ganti 'kita' akan menunjukkan sikap bersama dalam suatu komunitas.

Kata Ganti Wacana 2a

Kata ganti yang digunakan pada wacana 2a adalah kata ganti *kita* dan *mereka*. Penggunaan kata ganti *kita* untuk membuat pembaca seolah-olah berada di pihak yang setuju dengan

pernyataan penulis. Sedangkan, penggunaan kata ganti *mereka* mengacu pada pemerintah dan Kemendikbud, dan kata *mereka* menempatkan pemerintah dan Kemendikbud sebagai pihak yang bertentangan atau berseberangan dengan penulis. Berikut ini adalah kutipan yang mendukung pernyataan di atas.

Di negara kita sendiri ujian nasional ini telah ada sejak 1965 hingga sekarang (2013). Beberapa kali program ini telah bergonta ganti nama dan istilah, yaitu:

Terlepas dari persoalan penting tidak penting tentang keberadaan Ujian Nasional (UN) mungkin tak salah kita bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN?

Tapi tahukah kita bahwa pelaksanaan UN kali ini adalah yang TERBURUK dalam sepuluh tahun terakhir? Satu dekade lalu saat lahirnya istilah UN pada 2003 lalu (sebelumnya masih ada sebutan UN dan EBTANAS) tujuan dan pelaksanaan UN masih dikelola penuh semangat dan cita-cita yang sangat mulia oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun sebelum 2003 pun terdapat pro dan kontra tentang UN dan EBTANAS.

Penggunaan kata ganti mereka:

Lihatlah pada sistem pelaksanaan UN itu. Lihat juga pada aroma politik yang memayungi kemendikbud, lihat juga pada aparatur yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN. Sudah

rapikah mereka semua bekerja? Adakah proyek atau bisnis dibalik upaya menggelontorkan semangat UN terutama pada tahun ini?

Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah kemendikbud. Sekelompok orang-orang yang merasa paling pintar dan jagonya mengurus pendidikan di negeri ini dengan segudang teori dan program-program beraroma politik telah merusak sistem pendidikan nasional. Merekalah yang harus bertanggung jawab.

Kata ganti 'kita'	Di negara <u>kita</u> sendiri ujian nasional ini telah ada sejak 1965 hingga sekarang (2013). Beberapa kali program ini telah bergonta ganti nama dan istilah
Kata ganti 'kita'	Terlepas dari persoalan penting tidak penting tentang keberadaan Ujian Nasional (UN) mungkin tak salah <u>kita</u> bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan UN?
Kata ganti 'mereka'	Sudah rapikah <u>mereka</u> semua bekerja? Adakah proyek atau bisnis dibalik upaya menggelontorkan semangat UN terutama pada tahun ini?

n. Leksikon

Leksikon merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh pembuat wacana. Pilihan kata yang digunakan oleh pembuat wacana akan menunjukkan sikap dan ideologi tertentu.

Peristiwa yang sama akan dapat disajikan dengan penggunaan kata-kata yang berbeda.

Leksikon Wacana 2a

Leksikon atau pemilihan kata pada suatu wacana adalah hal yang sederhana namun mampu memberikan dampak yang begitu besar. Pemilihan kata berbeda untuk mewakili suatu keadaan yang serupa bisa saja menimbulkan penafsiran yang berbeda pula bagi pembaca. Penggunaan leksikon pada wacana 2a dapat dilihat melalui kutipan di bawah ini:

Mudah ditebak apa dampak scanner tidak dapat membaca LJK yang rusak, nilai akan sangat buruk dan merugikan siswa atau akan terjadi upaya memberi nilai secara manual yang berarti nilai akan sangat luar biasa indahnya.

Kata rusak, pada dasarnya, bisa digantikan dengan kata *cacat* (rusak sebagian) atau bermasalah. Penggunaan kata *rusak* tentunya untuk menambah kualitas pemaknaan sehingga tulisan terlihat lebih tegas. Selain itu, penggunaan frase “*sangat buruk*” juga termasuk dalam penggunaan leksikon pada wacana 2a. Penambahan kata *sangat* adalah penambahan yang sengaja diselipkan untuk memberikan rasa yang berbeda kepada pembaca.

Leksikon	
Rusak	Mudah ditebak apa dampak scanner tidak dapat membaca LJK yang <u>rusak</u> , nilai akan <u>sangat buruk</u> dan merugikan siswa atau akan terjadi upaya memberi nilai secara manual yang berarti nilai akan sangat luar biasa indahny.
Cacat	Mudah ditebak apa dampak scanner tidak dapat membaca LJK yang <u>cacat</u> , nilai akan <u>sangat buruk</u> dan merugikan siswa atau akan terjadi upaya memberi nilai secara manual yang berarti nilai akan sangat luar biasa indahny.

o. Grafis

Grafis merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pembuat wacana dalam menonjoklan atau menekankan suatu pandangan. Garfis dalam wacana biasanya muncul dengan pemakaian huruf tebal, huruf miring, garis bawah, ukuran huruf lebih besar, grafik, gambar, dan tabel.

Grafis Wacana 2a

Grafis yang digunakan pada wacana 2a berkaitan dengan penggunaan huruf yang seluruhnya dikapitalkan (*Upper Case*). Penggunaan huruf kapital seluruh huruf pada kata-kata tertentu menunjukkan bahwa penulis ingin memberikan

penegasan pada kata tersebut. Kata-kata tersebut adalah kata TERBURUK pada paragraf V dan kata TIDAK pada paragraf XVII. Berikut ini adalah kutipan-kutipan yang mendukung keberadaan grafis pada wacana *2a* dalam situs *Kompasiana*.

Tapi tahukah kita bahwa pelaksanaan UN kali ini adalah yang TERBURUK dalam sepuluh tahun terakhir? Satu dekade lalu saat lahirnya istilah UN pada 2003 lalu (sebelumnya masih ada sebutan UN dan EBTANAS) tujuan dan pelaksanaan UN masih dikelola penuh semangat dan cita-cita yang sangat mulia oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun sebelum 2003 pun terdapat pro dan kontra tentang UN dan EBTANAS.

Jika hanya berganti nama saja untuk apa UN dihapus, bukankah lebih bijaksana memperbaiki sistem dan aparatur pelaksanaannya saja? Atau mari kita tiru beberapa negara maju yang TIDAK melaksanakan UN di atas. Pertanyaannya : apakah kita sudah sampai pada taraf perekonomian seperti negara maju di atas?

Grafis	
Ukuran huruf lebih besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tapi tahukah kita bahwa pelaksanaan UN kali ini adalah yang TERBURUK dalam sepuluh tahun terakhir? 2. Atau mari kita tiru beberapa negara maju yang TIDAK melaksanakan UN di atas.

p. Metafora

Metafora merupakan kiasan atau ornamen dalam sebuah kalimat. Penggunaan metafora dapat berupa penggunaan ungkapan, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, atau bahkan ungkapan yang diambil dari ayat-ayat suci.

Metafora Wacana 2a

Metafora yang terdapat dalam wacana 2a adalah penggunaan ungkapan atau istilah. Ungkapan atau istilah tersebut adalah 'silang pendapat', 'buah hati', 'berkaca', dan 'ganti baju'. Ungkapan 'silang pendapat' digunakan untuk mengungkapkan perdebatan yang terjadi terkait dipertahankan atau dihapuskannya UN. Ungkapan 'buah hati' diartikan sebagai anak yang sangat disayangi yang harus berhadapan dengan LJK yang rusak sementara anak tersebut memunyai kualitas yang baik. Sementara itu, ungkapan 'berkaca' digunakan pembuat wacana sebagai bentuk ekspresi agar semua pihak introspeksi diri terhadap kebijakan penghapusan UN. Ungkapan terakhir adalah 'ganti baju' ungkapan ini diartikan sebagai pergantian nama

semata. Meskipun UN dihapuskan bukankah akan ada jenis ujian yang lain? Hal ini merupakan hal yang diungkap oleh pembuat wacana bahwasannya dengan menghapus Un akan tetap ada ujian lain pengganti UN. Oleh karena itu, pembuat wacana berani mengatakan dengan tegas untuk apa menghapus UN? Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan.

Kisruh tentang keberadaan UN itu sendiri kini mencuat kembali hingga silang pendapat tentang keberadaan UN dipertahankan atau dihapuskan itu merebak dimana-mana.

Bayangkan, siswa yang baik kualitasnya dan harus berhadapan dengan LJK yang rusak akan merasakan kegetiran yang amat sangat saat melihat nilai buah hatinya sangat buruk.

Harusnya dari sini kita semua berkaca, apakah dengan menghapus UN tidak akan ada jenis UN lainnya? Jangan-jangan tinggal cuma “ganti baju” saja misalnya MUN “Minimum Ujian Nasional (*bukan Muhammad Nuh* -red) atau nama lainnya.

Metafora	
Silang pendapat	Kisruh tentang keberadaan UN itu sendiri kini mencuat kembali hingga silang pendapat tentang keberadaan UN dipertahankan atau dihapuskan itu merebak dimana-mana.

Ganti baju	Jangan-jangan tinggal cuma “ganti baju” saja misalnya MUN “Minimum Ujian Nasional (<i>bukan Muhammad Nuh - red</i>) atau nama lainnya.
Buah hati	Bayangkan, siswa yang baik kualitasnya dan harus berhadapan dengan LJK yang rusak akan merasakan kegetiran yang amat sangat saat melihat nilai buah hatinya sangat buruk.

2. Konteks

Konteks dalam analisis wacana kritis, diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis melalui konteks tertentu. Konteks terkait dengan siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dan perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak.

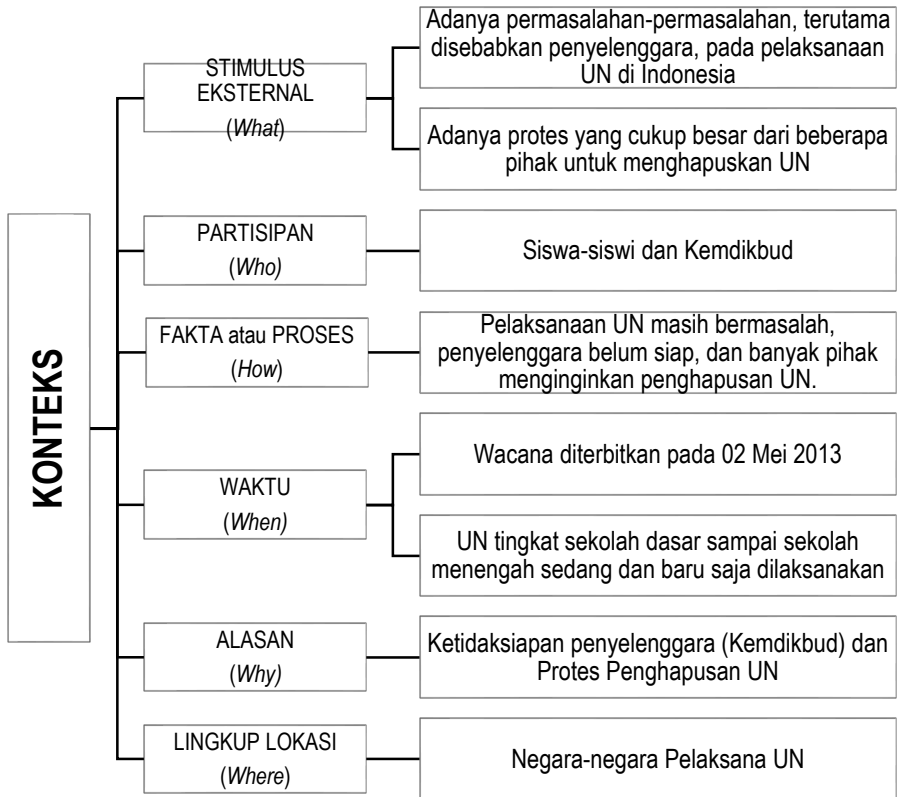
Terdapat beberapa konteks penting yang berpengaruh pada produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Misalnya, seseorang

berbicara dalam pandangan tertentu karena ia laki-laki, atau karena ia berpendidikan. Kedua, *setting* sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Misalnya, pembicaraan di tempat kuliah berbeda dengan di jalan. Setting, seperti tempat itu privat atau publik, dalam suasana formal atau informal, atau pada ruang tertentu memberikan wacana tertentu pula. Berbicara di ruang kelas berbeda dengan berbicara di rumah dan juga di pasar, karena situasi sosial atau aturan yang melingkupinya berbeda, menyebabkan partisipan komunikasi harus menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Oleh karena itu, wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya.

Konteks yang Melatari Wacana 2a

Wacana 2a, secara konteks, dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berada di luar teks dalam wacana. Wacana 2a bercerita mengenai pelaksanaan UN di Indonesia. Pembuat wacana ini mengatakan bahwa UN tidak perlu dihapus, cukup lakukan evaluasi saja karena penghapusan UN hanya akan menjadi pemicu munculnya ujian-ujian sejenis UN yang mungkin saja memiliki kerumitan masalah seperti halnya UN. Bahkan,

pembuat wacana *2a* menyimpulkan bahwa permasalahan pelaksanaan UN yang selama ini terjadi disebabkan oleh penyelenggaranya, terutama Kemendikbud.



Bagan 2 Konteks Wacana 2a

Secara konteks, wacana *2a* dilatarbelakangi oleh munculnya dua kejadian atau fenomena: 1) adanya permasalahan-permasalahan, terutama disebabkan penyelenggara, pada pelaksanaan UN di Indonesia dan 2) adanya protes yang

cukup besar dari beberapa pihak untuk menghapuskan UN. Seperti yang disampaikan oleh pembuat wacana, pelaksanaan UN selama ini disebabkan oleh ketidaksiapan Kemdikbud dalam menyelenggarakan UN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kemdikbud dinilai sebagai penyelenggara UN yang kurang melakukan pertimbangan dan persiapan matang. Pada akhirnya, permasalahan yang muncul pada pelaksanaan UN di Indonesia membuat beberapa pihak menginginkan UN dihentikan atau dihapuskan. Kedua kejadian ini melatarbelakangi pembuat wacana untuk menuliskan wacana 2a. Pada wacana 2a, pembuat wacana menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi pada UN selama ini tidak disebabkan oleh UN itu sendiri melainkan disebabkan oleh penyelenggara (Kemdikbud). Selain itu, penghapusan UN tidak akan menyelesaikan masalah, dan justru berpotensi memberikan permasalahan baru.

Dalam kaitannya dengan waktu penerbitan wacana 2a dalam situs *Kompasiana*, wacana 2a diterbitkan pada 2 Mei 2013. Waktu penerbitan wacana tentang UN pada bulan tersebut ternyata berkaitan dengan kejadian atau fenomena yang sedang terjadi pada masa itu. Pada bulan Mei 2013, tingkat

sekolah dasar sampai sekolah menengah sedang dan baru saja menyelenggarakan UN. Dalam hal ini, wacana *2a* dapat dikatakan sebagai respon atas penyelenggaraan UN yang sedang terjadi. Pada masa itu juga, terjadi banyak permasalahan pada pelaksanaan UN, dan banyak pihak melakukan protes untuk menghapuskan UN sebagai sistem kelulusan yang harus dilalui siswa-siswi.

Pelaksanaan UN tersebut menstimulus penulis untuk menuliskan pemikiran-pemikirannya mengenai UN dalam wacana *2a* pada situs *Kompasiana*. Wacana *2a* adalah wacana yang diproduksi oleh penulis dengan tujuan menginformasikan, memengaruhi, dan memberikan pandangan mengenai protes penghapusan UN.

3. Kognisi Sosial

Kognisi sosial merupakan proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari penulis (pembuat wacana). Analisis terhadap kognisi pembuat wacana dalam proses pembentukan wacana juga melibatkan analisis kebahasaan secara mendalam untuk membongkar relasi kuasa dan dominasi yang diproduksi pada wacana. Analisis kognisi sosial dilakukan melalui daftar pernyataan yang diajukan

kepada pembuat wacana sehingga hasilnya akan lebih memperjelas bagaimana wacana diproduksi dan konteks apa yang memengaruhinya.

Kognisi sosial atau kemampuan untuk memproduksi suatu wacana terkait erat dengan struktur mental. Setiap wacana diproduksi melalui skema atau model yang memengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu objek. Dalam skema tersebut, pewacana akan melakukan seleksi dan proses informasi yang datang dari pengalaman dan sosialisasi. Dalam analisis wacana kritis, skema inilah yang akan menjadi fokus, terkait bagaimana suatu wacana diproduksi oleh pewacana.

Kognisi Sosial Wacana 2a

Pembuat wacana 2a yang berjudul “Bukan UN yang Salah, Kinerja Kemendikbud yang Perlu Diubah” pada situs *Kompasiana* adalah Abangeutanyo. Ia memberikan nama pengguna atau akun *Kompasiana* ini karena beberapa peneliti yang pernah meneliti tulisannya juga menggunakan nama Abangeutanyo sebagai nama narasumber penelitian. Pendidikan terakhir narasumber adalah S1 Ekonomi

Manajemen di salah satu PTN di Medan. Ia saat ini tinggal di Aceh, dan tanggung jawab pekerjaan membuatnya harus berpindah-pindah tempat pada priode tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara melalui pos-el, narasumber saat ini bekerja pada salah satu perusahaan swasta nasional di Indonesia.

Narasumber menyampaikan bahwa motivasinya menuliskan wacana *2a* adalah menyalurkan hobinya untuk menulis, mempertajam ingatanm, menambah ilmu pengetahuan dalam menulis dan membaca aneka literature eksklusif, pendukung tulisan, menjalin persahabatan dan komunikasi positif, memberi masukan kepada pihak berkompeten tentang sebuah peristiwa dari dimensi lain yang tidak lazim dan terselubung, memberikan informasi pada pembaca sebuah Analisis Wacana Kritis dari katagori kalimat super struktur dengan membaca secara menyeluruh konten tulisan sehingga mendapat premes yang benar, dan menggalang ketahanan nasional untuk menjalin persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang kuat dan harmonis melalui tulisan dan gagasan.

Wacana *2a* dituliskan dan dipublikasikan berbarengan dengan pelaksanaan UN pada tahun itu. Permasalahan-permasalahan pelaksanaan UN disekitar narasumber menginspirasi narasumber untuk menghasilkan wacana mengenai UN pada situs *Kompasiana* tersebut. Meskipun narasumber bukan seseorang yang bekerja pada bidang pendidikan, beragam pengalaman dan pemikiran yang dimilikinya telah memengaruhinya dalam memproduksi wacana *2a* tersebut pada situs *Kompasiana*.

EVALUASI

Berdasarkan contoh analisis wacana kritis di atas, analisislah wacana di bawah ini!

**Ujian Nasional, Hanya Indonesia yang Bisa Begini...
Tragis!**

Penulis: Daniel H.T

Sumber: Kompasiana.com

Diduga karena frustrasi merasa tidak bisa mengerjakan soal Matematika Ujian Nasional (UN) SMP, Leony Alvionita (14), seorang siswi kelas III SMP Negeri 1 Tabanan, Bali, sepulang dari sekolahnya melakukan bunuh diri (gantung diri) di rumahnya pada Selasa, 6 Mei 2014.

Kisah tragis ini merupakan sebagian kecil saja dari berbagai masalah ruwet yang selalu ada saja di setiap

tahun penyelenggaraan UN. Kasus bunuh diri pelajar karena tak tahan menahan tekanan psikologis dalam mengikuti UN itu bukan baru pertama kali ini saja terjadi. Tetapi di UN-UN sebelumnya juga pernah beberap kali terjadi.

Sebagai contoh saja, pada 28 April 2010, Wahyu Ningsih (19), siswi sebuah SMKN di Muaro Jambi tewas bunuh diri dengan cara menelan racun jamur tanaman. Ironisnya dia adalah peraih nilai UN tertinggi di sekolahnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetapi, ketika mengetahui bahwa dia gagal di ujian Matematika, siswi itu syok, kemudian memutuskan bunuh diri (Kompas.com).

Pada 18 Mei 2013 Fanny Wijaya (16), siswi SMP PGRI Pondok Petir, Bojongsari, ditemukan ibunya tewas gantung diri di rumahnya, di Depok. Polisi menduga, korban gantung diri karena takut tak lulus UN (Tempo.co).

Pada 24 Mei 2013, seorang siswi SMA nekat bunuh diri dengan terjun ke Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Diduga kuat karena dia tidak lulus UN. Seorang laki-laki yang kebetulan lewat di sana bermaksud menolong siswi itu, ikut terbawa arus dan menghilang terbawa arus deras sungai (Rimanews.com).

Setiap tahun, UN selalu saja menjadi bahan kontroversi, perdebatan tak habis-habisnya antara pro-kontra keberadaannya, dan selalu saja disertai dengan berbagai masalah ruwet, mulai dari persoalan pendistribusian soal, materi soal, bocoran soal, kecurangan dalam pengerjaan soal, jual-beli soal dan kunci jawaban, peserta ujian yang

menderita stres, depresi, sampai kasus bunuh diri sebagaimana kasus terakhir di Tabanan, Bali itu.

Bagaimana para pelajar peserta UN itu tidak mengalami stres dan depresi kalau panitia penyelenggaranya saja sampai dengan Menteri Pendidikan dan kebudayaannya (Mendikbud) Muhammad Nuh sendiri malah menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Sudah lama yang kontra-UN menyatakan, UN itu tidak diperlukan. Alasannya, mengingat kualitas pendidikan nasional yang belum merata di seluruh Indonesia. Kualitas pendidikan di kota-kota besar, misalnya, yang sebagian besar terdapat di Pulau Jawa, jauh lebih tinggi daripada di daerah-daerah. Tetapi, pihak Kemendikbud-nya tetap bersikeras UN harus jalan terus. Bahkan standarnya ditingkatkan lagi, yang menurut Muhammad Nuh, soal-soal UN itu sudah bertaraf internasional, yang membuat peserta UN semakin tertekan. Setiap masalah yang ada selalu ditanggapi dengan berbagai alasan pembenaran untuk menghindari diri dari tanggung jawab.

Pernyataan Mendikbud bahwa dia akan bertanggung jawab jika penyelenggaraan UN bermasalah, atau berjanji suatu kasus tidak akan terulang lagi, hanya pemanis di bibir saja. Ketika masalah datang, misalnya ketika terjadi kekacauan pendistribusian soal-soal UN SMA yang lalu, dia malah menyalahkan anak buahnya. Begitu juga dalam kasus munculnya soal ujian Bahasa Indonesia di UN SMA yang ada soal mengenai Gubernur DKI Jakarta yang saat ini adalah juga calon presiden dari PDIP, Jokowi. Muhammad Nuh meminta maaf, dan berjanji di UN SMP tidak akan ada lagi soal serupa (tentang Jokowi). Kenyataannya, di UN SMP, soal ujian Bahasa Indonesia

tentang Jokowi muncul lagi. Tetapi, sang Menteri bersikap seolah-olah tidak pernah mengucapkan janjinya itu. Dia membiarkan masing-masing sekolah menyelesaikannya dengan cara-caranya masing-masing.

Akibat tidak adanya tindakan antisipatif tersebut, upaya-upaya “pembersihan” soal ujian tentang Jokowi yang sudah terlanjur tercetak itu justru membuat kekisruhan baru, yang ujung-ujungnya membuat siswa-siswi peserta UN SMP itu bertambah bingung dan stress. Menurut laporan dari Federasi Serikat Guru Indonesia, banyak keluhan dari berbagai daerah bahwa banyak anak dilaporkan sampai menangis seusai ujian (Majalah *Tempo*, 12-18 Mei 2014).

Tempo menulis, di Bandung, misalnya, untuk mengatasi kasus masih adanya soal tentang Jokowi itu, guru pengawas menggantinya dengan lembaran soal baru. Di Bengkulu, beberapa nomor soal diblok putih dan ditempel soal yang baru. Di Bogor, soal nomor 13 dan 14 lenyap, padahal di lembaran jawabannya ada nomor 13 dan 14.

Kekacauan lain, di Jakarta dan sekitarnya, petunjuk yang disodorkan ke siswa lebih runyam. Mereka diminta mengerjakan sejumlah soal dari naskah yang “tidak bersampul” dan nomor-nomor yang lain dari naskah “bersampul”. Perintah ini semakin sulit dimengerti dengan ketentuan bila ada nomor soal yang sama “antara naskah bercover dan naskah tidak bercover, maka yang dikerjakan hanya soal dari naskah yang tidak bersampul.” Satu lagi yang membingungkan: setelah selesai, peserta ujian diminta memasukkan naskah yang “bernomor” ke dalam naskah yang “tidak bernomor”.

Kelihatannya, yang menulis ketentuan itu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita, yang sudah dewasa saja, *puyeng* membaca ketentuan seperti ini. Entah apa maksudnya, dengan kalimat-kalimat petunjuk di atas, yang membedakan istilah “bercover/tidak bercover”, “bersampul/tidak bersampul”, “bernomor/tidak bernomor”. Apa bedanya antara “cover” dan “sampul”? Apakah “cover” itu bahasa Indonesia yang baku, jawabnya tentu, tidak, tetapi kenapa dipakai justru di ketentuan ujian Bahasa Indonesia?

Siswa tentu memerlukan penjelasannya, sementara itu pasti waktu ujian itu berjalan terus. Tidak heran mereka yang sudah mempersiapkan diri berbulan-bulan sebelumnya dengan perasaan tegang dan khawatir, menjadi semakin tertekan jiwanya, bagaimana bisa mengerjakan soal-soal ujiannya dengan penuh konsentrasi? Belum lagi, kalau mereka mengikuti berita-berita kesemrawutan UN di berbagai media massa. Orang dewasa saja bisa menangis, apalagi anak-anak seperti siswa-siswi SMP/SMA itu.

Maka itu, kita patut mempertanyakan, apa alasan substantif dari kekerasan hati pihak Kemendikbud dengan terus mempertahankan adanya UN ini, kalau hal itu malah menimbulkan kekisruhan, kesemrawutan dan menderitanya para pelajar kita? Dari UN ke UN setiap tahunnya, tidak kelihatan hal-hal positif yang lahir dari UN demi UN itu. Para siswa pun semakin merasa mereka ini seperti obyek dari suatu proyek dan ambisi seorang menteri dengan menjadikan mereka mereka sebagai kelinci percobaannya. Banyak sekali keluhan sudah disampaikan

para pelajar itu, tetapi masuk telinga kiri keluar telinga kanannya Pak Mendikbud-nya.



Surya H.A @uyasuur

22 jam

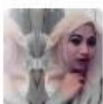
bukan ngeluh pak, kita usaha sih tetap usaha. tapi bapak harusnya mikir juga. gak semua anak punya otak olimpiade matematika @Mohammad_Nuh_



Gunggg's²⁴ @dewaagung_

23 jam

SD kami UN pertama kali SMP kami UN dgn 5 pkt SMA kami UN dgn 20 pkt standar internasional. Kita bkn kelinci percobaan pak!! @Mohammad_Nuh_



Sekarayu. @sekarasp

11 jam

Doain ya pak, kita bisa nglewatin soal yg ktnya internasional, Anak kelas 12 sebangsa mau ikut olimp inter nih. Smg puas:-) @Mohammad_Nuh_



Winda C. @windacml

17 jam

We're not your experimental rabbits! @Mohammad_Nuh_ @Kemdikbud_RI



Dheany R.A @Dhedheany

18 jam

Hai sir, National Examination it's looks likes final destination for student. How can we do the best when we afraid? @Mohammad_Nuh_



Firdaus Arsy R @ramadhanarsy

2 jam

@Mohammad_Nuh_ kami semua belajar tekun pak, Bapak tinggal mengaku salah apa susahnya? Jls2 soal diluar batas kemampuan siswa SMA indonesia

















Katanya soal-soal UN sekarang berstandar internasional, tetapi kenyataannya justru secara internasional pun mutu pendidikan Indonesia ternyata masih terus rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya di Asia Tenggara.

[The Learning Curve Pearson 2014](#), yaitu sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia, pada Selasa, 13 Mei 2014 lalu, merilis daftar peringkat mutu pendidikan dari berbagai negara di dunia. Di daftar itu, Indonesia lagi-lagi menduduki posisi “degradasi”





Indonesia menempati posisi ke-40 dengan indeks rangking dan nilai secara keseluruhan yakni minus 1,84. Sementara pada kategori kemampuan kognitif indeks rangking 2014 versus 2012, Indonesia diberi nilai -1,71.

Sedangkan untuk nilai pencapaian pendidikan yang dimiliki Indonesia, diberi skor -2,11. Posisi Indonesia ini menjadikan yang terburuk. Di mana Meksiko, Brasil, Argentina, Kolombia, dan Thailand, menjadi lima negara dengan rangking terbawah yang berada di atas Indonesia.

Index of cognitive skills and educational attainment

Index ranking 2014		Index heat map		Index ranking 2014 v 2012	
A to Z		Overall Index rank and score		Cognitive Skills rank and score	
 ITALY		[Rank 25]	0.11	[Rank 24]	0.20
 AUSTRIA		[Rank 26]	0.10	[Rank 22]	0.22
 SLOVAKIA		[Rank 27]	0.09	[Rank 29]	-0.14
 PORTUGAL		[Rank 28]	0.04	[Rank 26]	0.13
 SPAIN		[Rank 29]	-0.08	[Rank 28]	-0.09
 BULGARIA		[Rank 30]	-0.26	[Rank 30]	-0.39
 ROMANIA		[Rank 31]	-0.44	[Rank 31]	-0.62
 CHILE		[Rank 32]	-0.79	[Rank 34]	-1.06
 GREECE		[Rank 33]	-0.86	[Rank 33]	-0.83
 TURKEY		[Rank 34]	-0.94	[Rank 32]	-0.68
 THAILAND		[Rank 35]	-1.16	[Rank 35]	-1.09
 COLOMBIA		[Rank 36]	-1.25	[Rank 36]	-1.56
 ARGENTINA		[Rank 37]	-1.49	[Rank 40]	-2.14
 BRAZIL		[Rank 38]	-1.73	[Rank 39]	-2.06
 MEXICO		[Rank 39]	-1.76	[Rank 38]	-1.78
 INDONESIA		[Rank 40]	-1.84	[Rank 37]	-1.71

2-score (number of standard deviations above or below the mean)

 Group 5 less than -1.0	 Group 4 between -1.0 and -0.5	 Group 3 between -0.5 and 0.5	 Group 2 between 0.5 and 1.0
--	---	--	---

Padahal hanya di Indonesia saja ada pemerintahnya yang menyelenggarakan suatu ujian yang bersifat nasional seperti UN itu bagi para pelajarnya, mulai dari SD sampai dengan SMA. Kalau untuk SD sudah dihentikan mulai tahun ini, kenapa tidak sekalian saja untuk SMP dan SMA juga dihentikan, setidaknya mulai tahun ajaran depan?

Jadi, apa relevansinya dari keteguhan Kemendikbud untuk terus mempertahankan UN, selain hanya mengurus anggaran negara, dengan berbagai kecauannya, sampai mengorbankan jiwa siswa-siswi kita?

Seperti disebutkan di atas, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menyelenggarakan suatu ujian nasional seperti ini, tetapi ironisnya mutu pendidikannya secara internasional malah masih terus berada di posisi paling rendah. Itu artinya, selama ini UN adalah suatu kemubaziran bagi peningkatan kualitas pendidikan kita. Ratusan miliar rupiah (tahun 2014 sebesar Rp 514 miliar) terbuang sia-sia hanya untuk membawa efek dan dampak buruk seperti yang digambarkan di atas.

Keunikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang menyelenggarakan UN tersebut, membuat fenomena yang janggal juga terlihat di setiap kali ada UN.

Tidak ada negara manapun di dunia, selain di Indonesia, setiap kali ada ujian akhir sekolah, melibatkan polisi bersenjata mesin lengkap untuk mengawal soal. Mirip-mirip dengan mengantisipasi serangan teroris saja.



Tidak ada negara mana pun di dunia, selain Indonesia, yang sebelum ujian sekolah ditempuh, para siswa-siswinya, guru-gurunya, dan panitia penyelenggaranya diharuskan melakukan doa dan ikrar bersama untuk jujur

dalam menempuh UN, lengkap dengan adegan-adegan dramatisnya; ada air mata mengali, dan tangisan mendayudayu seperti di adegan sinetron-sinetron. Namun, dari tahun ke tahun, dari UN ke UN sama saja, tetap saja penuh dengan kecurangan-kecurangan, jual-beli soal dan kunci jawaban, dan sebagainya yang sejenis. Kalau Mendikbudnya bukan Muhammad Nuh, tidak mungkin bisa begini.



IKRAR UNTUK MELAKSANAKAN UJIAN NASIONAL JUJUR DAN BERPRESTASI

Kami, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, dan pejabat pengelola pendidikan, dengan ini menyatakan:

- (1) Bahwa dalam proses pembelajaran, penilaian harus dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik.
- (2) Bahwa Ujian Nasional dilakukan untuk mengukur capaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional.

Untuk itu kami berikrar:

- (1) SIAP MEMBANGUN BUDAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN AJARAN AGAMA DAN NILAI-NILAI UTAMA KARAKTER BANGSA, YAITU BERIMAN, BERTAKWA, JUJUR, BERSIH, SANTUN, CERDAS, DISIPLIN, KREATIF, KERJA KERAS, DAN BERTANGGUNG JAWAB.
- (2) SIAP MENSUKSESKAN UJIAN NASIONAL DENGAN JUJUR DAN BERPRESTASI.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan komitmen ini.

Jakarta, Januari 2012

Kami, Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Dewan Pendidikan, dan Pejabat Pengelola Pendidikan





Namun, setelah ujian akhirnya itu selesai, dan hasilnya diumumkan, terlihatlah adegan kontradiksinya. Banyak sekali pelajar, baik itu dari SMP, SMP, bahkan SD pun langsung merayakannya dengan cara-cara vandalis, antara sesama temannya saling mencorat-coret pakaian seragam masing-masing dengan spidol dan pylox, melakukan konvoi kendaraan bermotor dengan cara-cara yang melanggar hukum, mengganggu kelancaran lalu-lintas jalan raya, dan yang sekaligus berbahaya bagi dirinya sendiri, maupun pengguna jalan lainnya.

Pakaian seragam yang masih bagus-bagus semuanya dicorat-coret dengan spidol dan pylox sampai sangat kotor dan tidak mungkin bisa dipakai lagi. Sementara itu banyak pula dari teman-teman mereka, adik-adik kelasnya yang dari keluarga tak mampu hanya bisa menonton dengan nestapa. Karena untuk membeli pakaian seragam

saja orangtuanya hampir tak mampu, tetapi kakak-kakak kelasnya malah dengan enteng mencorat-coretnya. Seandainya saja mereka punya rasa simpatik dan empati tentu pakaian seragam itu bukan dicoret-coret, tetapi disumbangkan ke mereka yang membutuhkannya.





Lebih tragis lagi, hanya di Indonesia di hampir setiap kali ada ujian akhir, jatuh korban jiwa, yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung beban ketika mempersiapkan diri, mengikuti ujian, dan menerima hasilnya.

Hanya di Indonesia, meskipun semua hal-hal destruktif dari sebuah ujian akhir sekolah dengan nama Ujian Nasional (UN) itu terus terjadi, pemerintahnya tetap saja bersikukuh untuk meneruskannya meskipun tanpa ada tanda-tanda perbaikannya, dan tanpa ada dampak positifnya.



BAB VII

IMPLEMENTASI ANALISIS WACANA KRITIS VAN DJIK DALAM WACANA BERTEMA KURIKULUM 2013

Seperti halnya pada bab sebelumnya, aspek yang akan dibahas meliputi aspek teks, konteks, dan kognisi sosial. Kajian dalam aspek teks terdiri atas tema, skema, latar, detil, maksud, nominalisasi, koherensi, koherensi kondisional, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, praanggapan, grafis, dan metafora. Selanjutnya memberdayakan konteks. Konteks dalam analisis wacana kritis, diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Terakhir, menganalisis bagaimana suatu teks diproduksi. Kognisi sosial dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai hubungan lebih jauh terkait struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Perhatikan wacana bertema sertifikasi di bawah ini.

Wacana 3a

Ini Alasan Saya Pro Kurikulum 2013

Penulis: Syukri Muhammad Syukri

Sumber: Kompasiana.com

kabinet kerja sedang bekerja, kurikulum 2013 menjadi korban pertama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menginstruksikan untuk kembali ke kurikulum 2006. Terhadap sekolah yang sudah menjalankan selama tiga semester, tetap boleh menggunakan kurikulum 2013 sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang (Kompasdotcom, 5/12/2014).

Gebrakan Menteri Anies menuai pro dan kontra. Mereka yang pro kurikulum 2013 menyatakan bahwa anak-anak menjadi lebih kreatif. Sedangkan mereka yang kontra mengungkapkan bahwa guru belum siap, terutama dalam menilai hasil kerja siswa.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh, melalui sebuah stasion televisi swasta menghimbau: kalau ada sekolah yang sudah siap jangan dilarang. Beri mereka kesempatan. Kalau kembali ke KTSP, orang tua siswa harus beli buku.

Bukan mantan Mendikbud M. Nuh saja yang terkejut atas penghentian kurikulum 2013, para kepala sekolah di daerah-daerah ikut kelimpungan. Di Aceh misalnya, Harian Serambi Indonesia (9/12/2014) memberitakan

tentang puluhan ribu buku paket jadi mubazir akibat penghentian kurikulum 2013.

“Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana Rp. 40 milyar lebih untuk melatih guru,” kata Anas M Adam, Kadisdik Aceh melalui harian Serambi Indonesia tersebut.

Indonesia makin unik. Disatu sisi, Menteri PAN Yuddy Chrisnandi mengajak semua pejabat di republik ini untuk berhemat. Disisi yang lain, (mudah-mudahan tidak disadari) kebijakan Menteri Anies Baswedan menimbulkan dampak kemubaziran anggaran negara (daerah) yang amat dahsyat. Istilah ganti menteri ganti kebijakan, ternyata bukan omong kosong.

Terlepas dari semua itu, secara pribadi selaku orang tua siswa, saya pro kurikulum 2013. **Pertama**, sekolah sudah menyediakan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu dibagikan secara cuma-cuma kepada siswa. Orang tua siswa tidak direpotkan lagi membeli buku pelajaran baru diawal semester.

Kedua, akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif. Pernah suatu hari, dia menggambar denah rumah, mengukurnya dan membuat skala dalam ukuran sentimeter. Denah itu dilampirkan pada halaman buku tematik.

Ketiga, anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca. Setelah saya selidiki, rupanya dia sedang mencari berita tentang gotong royong.

Kliping berita gotong royong itu ditempel di buku tematik, kemudian isi berita itu diulas menurut versinya.

Keempat, sempat terkejut saat ditelepon anak saya yang menanyakan cara menulis artikel. Saya jelaskan secara singkat teknik menulis artikel. Rupanya, berdasarkan buku tema 5 berjudul Bangsa Sebagai Bangsa Indonesia, dia harus membuat artikel tentang seni budaya. Dia memilih menulis artikel tentang didong (seni berbalas pantun di Gayo).

Seandainya pembelajaran model ini berlanjut, bukan mustahil, anak-anak usia belia sudah menjadi penulis di Kompasiana atau blog yang lain. Pasalnya, masih banyak lulusan perguruan tinggi di tanah air yang belum percaya diri (pede) menulis gagasannya. Kenapa? Sebab, mereka tidak terlatih menulis sejak dini. Sungguh sayang apabila kurikulum 2013 harus layu sebelum berkembang.

1. Teks

Teks dalam analisis wacana kritis merupakan bentuk kesatuan antara struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Hal yang diamati dalam struktur makro adalah tema/topik, hal yang diamati dalam superstruktur adalah skema sedangkan hal yang diamati dalam struktur mikro adalah latar, detil, maksud, koherensi, koherensi kondisional, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, praanggapan, grafis, dan metafora.

a. Tema

Tema dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai suatu gambaran umum dari sebuah teks atau wacana. Tema dapat juga dikatakan gagasan pokok atau inti dari sebuah wacana. Pencarian tema dalam wacana dilakukan dengan membaca wacana secara keseluruhan. Tema dalam sebuah wacana akan didukung oleh subtema-subtema yang bersifat mendukung tema.

Tema Wacana 3a

Tema: Alasan Mendukung Kurikulum 2013

Tema umum dari wacana 3a adalah alasan mendukung kurikulum 2013. Tema ini merupakan tema umum yang diangkat oleh pembuat wacana. Penentuan tema umum akan didukung oleh subtema sebagai penegas dari tema umum tersebut. Subtema yang dipaparkan oleh pembuat wacana adalah terkait beberapa alasan pembuat wacana mengapa ia mendukung penerapan kurikulum 2013.

Alasan pertama pembuat wacana memaparkan terkait penyediaan buku terpadu kurikulum 2013. Dengan adanya penyediaan buku dari pihak sekolah pembuat wacana beranggapan akan mempermudah orang tua murid. Alasan

kedua terkait daya kreativitas yang diperoleh siswa ketika menjalankan kurikulum 2013. Daya kreativitas terlihat ketika siswa menggambar dan mengukur denah rumah dan menempelkannya dibuku tematik kurikulum 2013. Alasan ketiga terkait peningkatan semangat membaca dari siswa. Siswa yang tadinya tidak pernah membaca koran karena diberi tugas untuk membuat kliping maka mereka rajin untuk membaca. Alasan keempat terkait peningkatan keterampilan menulis dari siswa. Siswa yang tadinya tidak pernah menulis artikel harus menulisnya karena ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Pertama, sekolah sudah menyediakan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu dibagikan secara cuma-cuma kepada siswa. Orang tua siswa tidak direpotkan lagi membeli buku pelajaran baru diawal semester.

Kedua, akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif. Pernah suatu hari, dia menggambar denah rumah, mengukurnya dan membuat skala dalam ukuran sentimeter. Denah itu dilampirkan pada halaman buku tematik.

Ketiga, anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca. Setelah saya

selidiki, rupanya dia sedang mencari berita tentang gotong royong. Kliping berita gotong royong itu ditempel di buku tematik, kemudian isi berita itu diulas menurut versinya.

Keempat, sempat terkejut saat ditelepon anak saya yang menanyakan cara menulis artikel. Saya jelaskan secara singkat teknik menulis artikel. Rupanya, berdasarkan buku tema 5 berjudul Bangga Sebagai Bangsa Indonesia, dia harus membuat artikel tentang seni budaya. Dia memilih menulis artikel tentang didong (seni berbalas pantun di Gayo).

Tema	
Tema umum	Alasan Mendukung Kurikulum 2013
Subtema	Alasan pembuat wacana mengapa ia mendukung penerapan kurikulum 2013. Alasan pertama pembuat wacana memaparkan terkait penyediaan buku terpadu kurikulum 2013. Alasan kedua terkait daya kreativitas yang diperoleh siswa ketika menjalankan kurikulum 2013. Alasan ketiga terkait peningkatan semangat membaca dari siswa. Alasan keempat terkait peningkatan keterampilan menulis dari siswa.

b. Skema

Skema merupakan alur yang disusun oleh pembuat wacana sehingga wacana yang ditulisnya memunyai kesatuan arti.

Skema dapat juga dikatakan urutan dalam penyampaian ide dari pembuat wacana. Melalui skema, pembuat wacana akan memberikan tekanan bagian mana yang akan didahulukan dan bagian mana yang kemudian digunakan untuk menyembunyikan informasi penting yang tidak didukungnya. Penyembunyian informasi penting biasanya dilakukan dengan cara menuliskannya di bagian akhir sehingga terkesan kurang menonjol.

Skema Wacana 3a

Skema dalam wacana ini terbagi menjadi dua, *summary* dan *story*. *Summary* terbagi menjadi judul dan lead. Judul dalam wacana ini adalah Ini Alasan Saya Pro Kurikulum 2013. Sementara itu, lead dalam wacana ini memaparkan ringkasan terkait pengantar pemberlakuan kurikulum 2013 yang menjadi korban kabinet kerja. Dalam lead dipaparkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menginstruksikan untuk kembali ke kurikulum 2006. Sementara itu sekolah yang sudah menjalankan kurikulum 2013 selama tiga semester masih boleh menggunakan kurikulum 2013 sambil menunggu evaluasi. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Kabinet kerja sedang bekerja, kurikulum 2013 menjadi korban pertama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menginstruksikan untuk kembali ke kurikulum 2006. Terhadap sekolah yang sudah menjalankan selama tiga semester, tetap boleh menggunakan kurikulum 2013 sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang (Kompasdotcom, 5/12/2014).

Selanjutnya pemaparan *story* dalam wacana juga dibagi menjadi dua, yaitu situasi dan komentar. Situasi atau jalannya peristiwa merupakan pemaparan secara rinci terkait fenomena atau kejadian yang dipaparkan dalam wacana. Dalam hal ini pembuat wacana memaparkan hal terkait alasan mengapa ia mendukung penerapan kurikulum 2013. Alasan yang dikemukakan terdiri atas empat poin. Pertama, karena dalam penerapan kurikulum 2013 terdapat penyediaan buku yang dapat mempermudah proses pembelajaran. Kedua, dengan adanya penerapan kurikulum 2013 daya kreativitas dari siswa dapat meningkat. Ketiga, dengan penerapan kurikulum 2013 siswa menjadi rajin membaca. Keempat, dengan penerapan kurikulum 2013 siswa menjadi terbiasa untuk menulis. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Pertama, sekolah sudah menyediakan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu dibagikan secara cuma-cuma kepada siswa. Orang tua siswa tidak direpotkan lagi membeli buku pelajaran baru diawal semester.

Kedua, akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif. Pernah suatu hari, dia menggambar denah rumah, mengukurnya dan membuat skala dalam ukuran sentimeter. Denah itu dilampirkan pada halaman buku tematik.

Ketiga, anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca. Setelah saya selidiki, rupanya dia sedang mencari berita tentang gotong royong. Kliping berita gotong royong itu ditempel di buku tematik, kemudian isi berita itu diulas menurut versinya.

Keempat, sempat terkejut saat ditelepon anak saya yang menanyakan cara menulis artikel. Saya jelaskan secara singkat teknik menulis artikel. Rupanya, berdasarkan buku tema 5 berjudul Bangga Sebagai Bangsa Indonesia, dia harus membuat artikel tentang seni budaya. Dia memilih menulis artikel tentang didong (seni berbalas pantun di Gayo).

Pemaparan terakhir adalah tentang komentar yang merupakan pendapat pribadi dari pembuat wacana. Dalam wacana ini pembuat wacana memberikan komentar bahwa dengan diteruskannya kurikulum 2013, mungkin saja anak-

anak usia belia kedepannya akan menjadi penulis handal. Hal ini terjadi karena anak-anak yang melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013 akan terbiasa untuk aktif dalam menulis dan membaca. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Seandainya pembelajaran model ini berlanjut, bukan mustahil, anak-anak usia belia sudah menjadi penulis di *Kompasiana* atau blog yang lain. Palsanya, masih banyak lulusan perguruan tinggi di tanah air yang belum percaya diri (pede) menulis gagasannya. Kenapa? Sebab, mereka tidak terlatih menulis sejak dini. Sungguh sayang apabila kurikulum 2013 harus layu sebelum berkembang.

Skema		
<i>Summary</i>	Judul	Ini Alasan Saya Pro Kurikulum 2013
	Lead	Memaparkan ringkasan terkait pengantar pemberlakuan kurikulum 2013 yang menjadi korban kabinet kerja
<i>Story</i>	Situasi	Memaparkan hal terkait alasan mengapa ia mendukung penerapan kurikulum 2013. Alasan yang dikemukakan terdiri atas empat poin. Pertama, karena dalam penerapan kurikulum 2013 terdapat penyediaan buku yang dapat mempermudah proses

		pembelajaran. Kedua, dengan adanya penerapan kurikulum 2013 daya kreativitas dari siswa dapat meningkat. Ketiga, dengan penerapan kurikulum 2013 siswa menjadi rajin membaca. Keempat, dengan penerapan kurikulum 2013 siswa menjadi terbiasa untuk menulis.
	Komentar	Komentar bahwa dengan diteruskannya kurikulum 2013, mungkin saja anak-anak usia belia kedepannya akan menjadi penulis handal. Hal ini terjadi karena anak-anak yang melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013 akan terbiasa untuk aktif dalam menulis dan membaca.

c. Latar

Latar merupakan suatu penggambaran ke arah mana wacana akan dibawa oleh pembuat wacana. Latar akan memengaruhi pandangan khalayak pembaca terhadap wacana. Hal ini merupakan cerminan ideologis yang coba disajikan oleh pembuat wacana. Misalnya wacana berisi tentang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, ketika pembuat

wacana setuju dengan perbuatan mahasiswa, maka yang akan dipaparkan dalam wacana tersebut adalah keberhasilan demonstrasi mahasiswa dalam membuat perubahan.

Latar Wacana 3a

Fenomena yang dipaparkan dalam wacana 3a adalah tentang keberhasilan penerapan kurikulum 2013. Hal ini menjadi wajar dilakukan oleh pembuat wacana karena pada dasarnya pembuat wacana memang mendukung penerapan kurikulum 2013. Fenomena atau kejadian terkait dukungan pembuat wacana terhadap kurikulum 2013 dipaparkan dengan memberikan beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut menjadi sebuah informasi yang diutamakan oleh pembuat wacana. Sehingga hampir disetiap paparan informasi dalam wacana hanya menguraikan tentang keberhasilan kurikulum 2013 dan kerugian jika kurikulum 2013 dihentikan.

Latar yang merupakan cerminan ideologis pembuat wacana dibuat agar pembaca mengikuti apa yang ingin disajikan pembuat wacana. Dengan arah penulisan berupa dukungan terhadap kurikulum 2013 maka pembuat wacana berupaya menggiring opini pembaca agar pembaca hanya terfokus

pada keberhasilan penerapan kurikulum 2013. Selain itu, pembuat wacana juga memaparkan kerugian yang terjadi jika kurikulum 2013 dihentikan. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Mereka yang pro kurikulum 2013 menyatakan bahwa anak-anak menjadi lebih kreatif.

Akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif.

Anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca.

Di Aceh misalnya, Harian Serambi Indonesia (9/12/2014) memberitakan tentang puluhan ribu buku paket jadi mubazir akibat penghentian kurikulum 2013.

Hal yang Melatari Pembuat Wacana Menulis	Keberpihakan pembuat wacana terhadap kurikulum 2013
Latar	Realitas pelaksanaan kurikulum 2013. Mereka yang pro kurikulum 2013 menyatakan bahwa anak-anak menjadi lebih kreatif. Akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif. Anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca. Di Aceh misalnya, Harian Serambi Indonesia

	(9/12/2014) memberitakan tentang puluhan ribu buku paket jadi mubazir akibat penghentian kurikulum 2013.
Tanpa latar	Realitas pelaksanaan kurikulum 2013.

d. Detil

Detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh pembuat wacana. Dengan adanya detil, pembuat wacana akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dan menampilkan informasi yang sedikit jika hal itu merugikan. Detil yang panjang merupakan strategi penonjolan informasi yang dilakukan pembuat wacana untuk menciptakan citra tertentu terhadap khalayak/pembaca.

Detil Wacana 3a

Wacana 3a setidaknya-tidaknya menampilkan dua detil penting dan utama: pemaparan mengenai alasan pembuat wacana mendukung penerapan kurikulum 2013 dan pemaparan kerugian yang terjadi jika kurikulum 2013 dihentikan. Wacana 3a memberikan informasi cukup panjang dan mendetil tentang alasan pembuat wacana mengapa

mendukung penerapan kurikulum 2013. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa penerapan kurikulum 2013 sudah sangat efektif. Berikut adalah kutipan yang mendukung detail pertama ini.

Pertama, sekolah sudah menyediakan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu dibagikan secara cuma-cuma kepada siswa. Orang tua siswa tidak direpotkan lagi membeli buku pelajaran baru diawal semester.

Kedua, akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif. Pernah suatu hari, dia menggambar denah rumah, mengukurnya dan membuat skala dalam ukuran sentimeter. Denah itu dilampirkan pada halaman buku tematik.

Ketiga, anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca. Setelah saya selidiki, rupanya dia sedang mencari berita tentang gotong royong. Kliping berita gotong royong itu ditempel di buku tematik, kemudian isi berita itu diulas menurut versinya.

Keempat, sempat terkejut saat ditelepon anak saya yang menanyakan cara menulis artikel. Saya jelaskan secara singkat teknik menulis artikel. Rupanya, berdasarkan buku tema 5 berjudul Bangga Sebagai Bangsa Indonesia, dia harus membuat artikel tentang seni budaya. Dia memilih menulis artikel tentang didong (seni berbalas pantun di Gayo).

Detil kedua yang disajikan oleh pembuat wacana adalah mengenai dampak buruk yang terjadi jika penerapan kurikulum 2013 dihentikan. Pada bagian ini pembuat wacana memberikan fakta akurat berupa gambar dan pemaparan dari para kepala sekolah yang terkejut dengan kebijakan pemberhentian kurikulum 2013. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.



Di Aceh misalnya, Harian Serambi Indonesia (9/12/2014) memberitakan tentang puluhan ribu buku paket jadi mubazir akibat penghentian kurikulum 2013.

e. Maksud

Elemen maksud dalam wacana merupakan cara penyajian informasi yang dilakukan oleh pembuat wacana. Informasi yang menguntungkan diuraikan secara eksplisit atau jelas sedangkan informasi yang merugikan diuraikan secara implisit atau tersembunyi.

Maksud Wacana 3a

Penyampaian maksud dalam wacana ini terlihat pada pengungkapan secara eksplisit mengenai alasan pembuat wacana mendukung penerapan kurikulum 2013. Sementara itu, pengungkapan terkait masyarakat yang tidak mendukung penerapan kurikulum 2013 disajikan dengan sangat sedikit dan implisit. Ini merupakan strategi pembuat wacana untuk menyampaikan tujuan penulisan.

Pengungkapan secara eskplisit merupakan pengungkapan informasi yang menguntungkan bagi pembuat wacana. Informasi tersebut seperti beberapa alasan mendukung penerapan kurikulum 2013 dan kerugian yang terjadi jika penerapan kurikulum 2013 dihentikan. Hal ini merupakan informasi menguntungkan pembuat wacana. Oleh karena itu, informasi ini disajikan secara lengkap dan eksplisit. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Pertama, sekolah sudah menyediakan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu dibagikan secara cuma-cuma kepada siswa. Orang tua siswa tidak direpotkan lagi membeli buku pelajaran baru diawal semester.

Kedua, akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif. Pernah suatu hari, dia menggambar denah rumah, mengukurnya dan membuat skala dalam ukuran sentimeter. Denah itu dilampirkan pada halaman buku tematik.

Ketiga, anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca. Setelah saya selidiki, rupanya dia sedang mencari berita tentang gotong royong. Kliping berita gotong royong itu ditempel di buku tematik, kemudian isi berita itu diulas menurut versinya.

Keempat, sempat terkejut saat ditelepon anak saya yang menanyakan cara menulis artikel. Saya jelaskan secara singkat teknik menulis artikel. Rupanya, berdasarkan buku tema 5 berjudul Bangga Sebagai Bangsa Indonesia, dia harus membuat artikel tentang seni budaya. Dia memilih menulis artikel tentang didong (seni berbalas pantun di Gayo).

Sementara itu, informasi yang merugikan akan disampaikan secara implisit dan ringkas. Informasi tersebut adalah informasi mengenai komentar masyarakat yang tidak pendukung penerapan kurikulum 2013. Pemberian informasi ini hanya sekadar pelengkap agar pembuat wacana seolah-olah tidak tegas dalam memaparkan tujuan penulisan. Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Sedangkan mereka yang kontra mengungkapkan bahwa guru belum siap, terutama dalam menilai hasil kerja siswa.

f. Praanggapan

Praanggapan merupakan upaya mendukung pendapat dengan menggunakan premis yang dapat dipercaya. Praaangapan hadir dengan pernyataan yang dapat dipercaya dengan tujuan agar pernyataan tidak perlu dipertanyakan.

Praanggapan Wacana 3a

Praanggapan dalam wacana *3a* terlihat pada paragraf terakhir dari wacana. Paragraf tersebut menjelaskan anggapan dari pembuat wacana terkait kekreatifan siswa dapat meningkat jika kurikulum 2013 tetap dilaksanakan. Pembuat wacana menguraikan fenomena terkait banyaknya lulusan perguruan tinggi yang masih tidak percaya diri dalam menulis. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kebiasaan. Penerapan kurikulum 2013 lah yang akan membentuk cara belajar dengan membiasakan siswa untuk berlatih menulis. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Seandainya pembelajaran model ini berlanjut, bukan mustahil, anak-anak usia belia sudah menjadi penulis di *Kompasiana* atau blog yang lain. Palsunya, masih banyak lulusan perguruan tinggi di tanah air yang belum percaya diri (pede) menulis gagasannya. Kenapa? Sebab, mereka tidak terlatih menulis sejak dini. Sungguh sayang apabila kurikulum 2013 harus layu sebelum berkembang.

Praanggapan	Seandainya pembelajaran model ini berlanjut, bukan mustahil, anak-anak usia belia sudah menjadi penulis di <i>Kompasiana</i> atau blog yang lain. Palsunya, masih banyak lulusan perguruan tinggi di tanah air yang belum percaya diri (pede) menulis gagasannya. Kenapa? Sebab, mereka tidak terlatih menulis sejak dini. Sungguh sayang apabila kurikulum 2013 harus layu sebelum berkembang.
Tanpa Praanggapan	Sungguh sayang apabila kurikulum 2013 harus layu sebelum berkembang.

g. Nominalisasi

Nominalisasi merupakan proses perubahan kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya dilakukan dengan memberikan imbuhan 'pe-an'. Nominalisasi dapat menghilangkan subjek dalam suatu wacana. Melalui strategi ini pembuat wacana dapat menghilangkan subjek dengan

menggunakan nominalisasi jika informasi itu menguntungkan. Misalnya kata 'menembak', dalam sebuah kalimat, kata 'menembak' selalu memerlukan subjek siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Kedua hal tersebut harus ada dalam kalimat agar mempunyai arti. Sebaliknya, kata benda tidak memerlukan subjek karena ia hadir mandiri dalam sebuah kalimat. Kata 'penembakan' tidak memerlukan kehadiran subjek.

Nominalisasi Wacana 3a

Tidak ditemukan nominalisasi dalam wacana 3a

h. Peningkaran

Peningkaran merupakan cara pembuat wacana menyembunyikan apa yang ingin diungkapkannya. Pembuat wacana seolah-olah menyetujui sesuatu, padahal ia tidak setuju dengan jalan memberikan argumen atau fakta untuk penyangkalan. Peningkaran akan ditandai dengan penggunaan kata 'tetapi' atau 'namun' setelah sebuah pernyataan dibuat.

Pengingkaran Wacana 3a

Tidak ditemukan pengingkaran dalam wacana 3a baik dalam bentuk antarkalimat seperti penggunaan kata 'tetapi' maupun pengingkaran dalam bentuk paragraf seperti pemaparan pendapat pembuat wacana yang bertentangan.

i. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat akan terkait dengan penggunaan struktur bahasa oleh pembuat wacana. Penggunaan kalimat berstruktur aktif akan berbeda makna atau tujuan penulisan dengan penggunaan kalimat berstruktur pasif. Bentuk kalimat aktif akan menonjolkan seseorang sebagai subjek pernyataan sedangkan bentuk kalimat pasif akan menonjolkan peristiwa dalam pernyataan.

Bentuk Kalimat Wacana 3a

Bentuk kalimat yang digunakan dalam wacana 3a banyak menggunakan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif dimaksudkan untuk menempatkan subjek sebagai posisi sentral. Artinya, penggunaan kalimat aktif akan melihat subjek sebagai fokus pembicaraan. Sehingga pembaca akan lebih berpikir bahwa subjek kalimat merupakan hal yang

harus diperhatikan dan menjadi acuan. Berikut merupakan kutipan yang mendukung.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menginstruksikan untuk kembali ke kurikulum 2006.

Penggunaan bentuk kalimat berdasarkan kutipan di atas, merupakan salah satu cara pembuat wacana mengungkapkan bahwa penggantian kurikulum 2013 merupakan rencana yang diinstruksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan penggunaan kalimat aktif, pembuat wacana berupaya untuk menggiring pemahaman pembaca bahwa seseorang yang harus bertanggungjawab adalah Mentrei Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Penggunaan bentuk kalimat ini menjadi sesuatu yang wajar karena tujuan pemaparan dari pembuat wacana adalah seseorang yang harus bertanggungjawab, bukan hal mengenai pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum 2006. Penggunaan bentuk kalimat aktif yang lain terdapat dalam kutipan berikut.

Kebijakan Menteri Anies Baswedan menimbulkan dampak kemubaziran anggaran negara (daerah) yang amat dahsyat.

Bentuk kalimat di atas, juga merupakan bentuk kalimat aktif. Hal yang ingin difokuskan pembuat wacana adalah kebijakan menteri yang mengakibatkan kemubaziran anggaran negara. Titik fokus kalimat di atas adalah seseorang yang mengeluarkan kebijakan tersebut bukan hal mengenai kemubaziran anggaran negara. Oleh karena itu, pembuat wacana menuliskannya dalam bentuk kalimat aktif.

Bentuk Kalimat	
Aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, <i>menginstruksikan</i> untuk kembali ke kurikulum 2006. 2. Kebijakan Menteri Anies Baswedan <i>menimbulkan</i> dampak kemubaziran anggaran negara (daerah) yang amat dahsyat.
Pasif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum 2006 <i>diinstruksikan</i> oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan 2. Kemubaziran <i>ditimbulkan</i> oleh Kebijakan Menteri Anies Baswedan

j. Koherensi

Koherensi merupakan pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam sebuah teks. Pertalian atau jalinan antarkata atau kalimat dalam sebuah teks dapat terbentuk melalui

penggunaan kata hubung. Kata hubung yang digunakan dalam koherensi adalah kata hubung ‘dan’ dan kata hubung ‘akibat’. Kata hubung tersebut yang akan menentukan bagaimana dua buah kalimat yang menggambarkan fakta dihubungkan.

Koherensi Wacana 3a

Koherensi dalam wacana 3a terdapat pada kalimat ‘Puluhan paket buku jadi mubazir’ dan kalimat ‘penghematan kurikulum 2013’. Kedua kalimat ini disatukan dengan penghubung akibat. Penggunaan kata ‘akibat’ menunjukkan hubungan sebab akibat. Fakta antara kalimat satu dikaitkan dengan fakta kalimat lain. Fakta terkait puluhan buku menjadi mubazir dikaitkan dengan fakta akibat dari penghentian kurikulum 2013. Sehingga pertalian atau jalinan antar kalimat atau disebut koherensi. Berikut merupakan kutipan yang didalamnya terdapat koherensi.

Puluhan ribu buku paket jadi mubazir akibat penghentian kurikulum 2013.

Koherensi	
Kata hubung ‘akibat’	Puluhan ribu buku paket jadi mubazir akibat penghentian kurikulum 2013

k. Koherensi Kondisional

Penggunaan koherensi kondisional ditandai dengan adanya kalimat penjelas. Koherensi kondisional akan ditandai dengan penggunaan kata hubung 'yang' dan 'dimana'. Kalimat kedua akan berfungsi sebagai kalimat penjelas (anak Kalimat) sehingga ada atau tidaknya anak kalimat tersebut tidak akan memengaruhi arti kalimat.

Koherensi Kondisional Wacana 3a

Koherensi kondisional dalam wacana 3a terdapat dalam paragraf keempat. Didalamnya, pembuat wacana mengungkapkan mengenai pengadaan dana kuriulum 2013 yang disampaikan oleh Kadisdik Aceh. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan.

“Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana Rp. 40 milyar lebih untuk melatih guru,” kata Anas M Adam, Kadisdik Aceh melalui harian Serambi Indonesia tersebut.

Koherensi kondisional dalam kutipan di atas terlihat pada penggunaan kalimat penjelas. Kalimat 'Kadisdik Aceh melalui harian Serambi Indonesia tersebut' merupakan kalimat penjelas dari kalimat kata Anas M Adam. Kalimat penjelas hanya digunakn sebagai kalimat pelengkap yang

jika kehadirannya dihilangkan tidak akan berpengaruh pada makna kalimat sebelumnya. Frasa ‘Kadisdik Aceh’ menjelaskan posisi atau kedudukan dari Anas M Adam.

Koherensi Kondisional	“Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana Rp. 40 milyar lebih untuk melatih guru,” kata Anas M Adam, Kadisdik Aceh melalui harian Serambi Indonesia tersebut
Tanpa Koherensi Kondisional	“Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana Rp. 40 milyar lebih untuk melatih guru,” kata Anas M Adam.

I. Koherensi Pembeda

Koherensi pembeda berhubungan dengan bagaimana dua peristiwa atau fakta itu dibedakan. Dua buah peristiwa atau fakta akan dibuat seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan dengan menggunakan koherensi ini.

Koherensi Pembeda Wacana 3a

Koherensi pembeda dalam wacana ini memaparkan dua fenomena atau kejadian yang bertentangan. Fakta tersebut terkait permasalahan pendapat masyarakat yang pro atau

yang mendukung penerapan kurikulum 2013 dengan yang kontra atau tidak mendukung penerapan kurikulum 2013.

Berikut adalah kutipan yang mendukung pernyataan.

Gebrakan Menteri Anies menuai pro dan kontra. Mereka yang pro kurikulum 2013 menyatakan bahwa anak-anak menjadi lebih kreatif. Sedangkan mereka yang kontra mengungkapkan bahwa guru belum siap, terutama dalam menilai hasil kerja siswa.

Koherensi pembeda selanjutnya terdapat pada paragraf kelima dari wacana. Paragraf ini memaparkan dua fenomena berbeda terkait fakta yang terjadi dalam pendanaan pendidikan di Indonesia. Dalam wacana ini pembuat wacana memaparkan fakta terkait pemubaziran anggaran pendidikan jika kurikulum 2013 dihentikan. Sementara itu, di satu sisi pemerintah sedang mengajak pajabatnya untuk berhemat. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.

Indonesia makin unik. Disatu sisi, Menteri PAN Yuddy Chrisnandi mengajak semua pejabat di republik ini untuk berhemat. Disisi yang lain, (mudah-mudahan tidak disadari) kebijakan Menteri Anies Baswedan menimbulkan dampak kemubaziran anggaran negara (daerah) yang amat dahsyat.

Koherensi Pembeda	Gebrakan Menteri Anies menuai pro dan kontra. Mereka yang pro
-------------------	---

	kurikulum 2013 menyatakan bahwa anak-anak menjadi lebih kreatif. Sedangkan mereka yang kontra mengungkapkan bahwa guru belum siap, terutama dalam menilai hasil kerja siswa.
Tanpa Pembeda	Gebrakan Menteri Anies menuai pro dan kontra.
Koherensi Pembeda	Indonesia makin unik. Disatu sisi, Menteri PAN Yuddy Chrisnandi mengajak semua pejabat di republik ini untuk berhemat. Disisi yang lain, (mudah-mudahan tidak disadari) kebijakan Menteri Anies Baswedan menimbulkan dampak kemubaziran anggaran negara (daerah) yang amat dahsyat.
Tanpa Pembeda	Indonesia makin unik.

m. Kata Ganti

Kata ganti merupakan alat yang digunakan oleh pembuat wacana untuk menunjukkan dimana posisi ia dalam sebuah wacana. Dalam mengungkapkan sikap seseorang dapat menggunakan kata ganti 'saya', 'kami', atau 'kita'. Penggunaan kata ganti 'saya' atau 'kami' akan menunjukkan

sikap resmi pembuat wacana sedangkan kata ganti 'kita' akan menunjukkan sikap bersama dalam suatu komunitas.

Kata Ganti Wacana 3a

Kata ganti yang digunakan pembuat wacana dalam wacana 3a adalah kata ganti 'saya'. Kata ganti 'saya' menunjukkan bahwa setiap pandangan merupakan sikap resmi pribadi dari pembuat wacana. Pembuat wacana menempatkan diri sebagai seseorang yang bebas untuk mengungkapkan pendapat pribadinya sehingga ia menggunakan kata ganti 'saya'. Berikut merupakan contoh kutipan penggunaan kata ganti 'saya'.

Terlepas dari semua itu, secara pribadi selaku orang tua siswa, saya pro kurikulum 2013.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pembuat wacana secara tegas memaparkan sikap resmi pribadinya terhadap penerapan kurikulum 2013. Dalam pemaparannya, ia memberikan alasan-alasan logis terkait keberhasilan penerapan kurikulum 2013. Hal tersebut merupakan pengalaman pribadi yang dialaminya sehingga menjadi wajar ketika ia memaparkan sikap, ia menunjukkan sikap resmi pribadinya.

Kata ganti 'saya'	Terlepas dari semua itu, secara pribadi selaku orang tua siswa, saya pro kurikulum 2013
-------------------	---

n. Leksikon

Leksikon merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh pembuat wacana. Pilihan kata yang digunakan oleh pembuat wacana akan menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa yang sama akan dapat disajikan dengan penggunaan kata-kata yang berbeda.

Leksikon Wacana 3a

Leksikon yang digunakan pembuat wacana adalah 'kelimpungan'. Penggunaan kata tersebut menunjukkan sikap dari pembuat wacana. Berikut merupakan kutipan yang di dalamnya terdapat leksikon tersebut.

Bukan mantan Mendikbud M. Nuh saja yang terkejut atas penghentian kurikulum 2013, para kepala sekolah di daerah-daerah ikut kelimpungan. Di Aceh misalnya, *Harian Serambi Indonesia* (9/12/2014) memberitakan tentang puluhan ribu buku paket jadi mubazir akibat penghentian kurikulum 2013.

Kata 'kelimpungan' dipilih oleh pembuat wacana sebagai pilihan kata untuk mengekspresikan kegeramannya. Kata

kelimpungan dapat diartikan sebagai kebingungan yang sangat. Hal ini merupakan salah satu bentuk penolakan diberhentikannya penerapan kurikulum 2013. Oleh karena itu, akan menjadi hal yang wajar ketika pembuat wacana memilih kata yang tidak biasa untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakannya.

Leksikon	
Kelimpungan	Bukan mantan Mendikbud M. Nuh saja yang terkejut atas penghentian kurikulum 2013, para kepala sekolah di daerah-daerah ikut kelimpungan.
Kebingungan	Bukan mantan Mendikbud M. Nuh saja yang terkejut atas penghentian kurikulum 2013, para kepala sekolah di daerah-daerah ikut kebingungan.

o. Grafis

Grafis merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pembuat wacana dalam menonjolkan atau menekankan suatu pandangan. Garfis dalam wacana biasanya muncul dengan pemakaian huruf tebal, huruf miring, garis bawah, ukuran huruf lebih besar, grafik, gambar, dan tabel.

Grafis Wacana 3a

Penggunaan grafis dalam wacana ini terlihat pada penggunaan gambar dan kata bercetak tebal. Penggunaan grafis dimaksudkan sebagai upaya pembuat wacana untuk memberi penegasan terhadap hal yang disampaikannya. Selain itu, penggunaan gambar terkait fakta yang terjadi di lapangan juga merupakan cara pembuat wacana untuk memperkuat pendapatnya. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut.



Pertama, sekolah sudah menyediakan buku tematik terpadu kurikulum 2013.

Kedua, akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif.

Ketiga, anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca.

Keempat, sempat terkejut saat ditelepon anak saya yang menanyakan cara menulis artikel.

Grafis	
<p>Penggunaan huruf tebal</p>	<p>Pertama, sekolah sudah menyediakan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kedua, akhir-akhir ini anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD tiba-tiba lebih kreatif. Ketiga, anak saya yang sebelumnya malas membaca surat kabar, tiba-tiba rajin membaca. Keempat, sempat terkejut saat ditelepon anak saya yang menanyakan cara menulis artikel.</p>
<p>Gambar</p>	

p. Metafora

Metafora merupakan kiasan atau ornamen dalam sebuah kalimat. Penggunaan metafora dapat berupa penggunaan ungkapan, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, atau bahkan ungkapan yang diambil dari ayat suci.

Metafora Wacana 3a

Metafora yang terdapat dalam wacana 3a adalah penggunaan ungkapan atau istilah. Ungkapan atau istilah tersebut adalah 'layu sebelum berkembang'. Ungkapan ini dikemukakan oleh pembuat wacana sebagai ungkapan untuk menjelaskan penerapan kurikulum 2013 yang akan hancur sebelum dilaksanakan. Berikut merupakan kutipan yang didalamnya terdapat metafora.

Seandainya pembelajaran model ini berlanjut, bukan mustahil, anak-anak usia belia sudah menjadi penulis di *Kompasiana* atau blog yang lain. Pasalnya, masih banyak lulusan perguruan tinggi di tanah air yang belum percaya diri (pede) menulis gagasannya. Kenapa? Sebab, mereka tidak terlatih menulis sejak dini. Sungguh sayang apabila kurikulum 2013 harus layu sebelum berkembang.

Metafora	
Ungkapan 'layu sebelum berkembang'	Kenapa? Sebab, mereka tidak terlatih menulis sejak dini. Sungguh sayang apabila kurikulum 2013 harus <u>layu sebelum berkembang</u> .

2. Konteks

Konteks dalam analisis wacana kritis, diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa

wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis melalui konteks tertentu. Konteks terkait dengan siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dan perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak.

Terdapat beberapa konteks penting yang berpengaruh pada produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Misalnya, seseorang berbicara dalam pandangan tertentu karena ia laki-laki, atau karena ia berpendidikan. Kedua, *setting* sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Misalnya, pembicaraan di tempat kuliah berbeda dengan di jalan. *Setting*, seperti tempat itu privat atau publik, dalam suasana formal atau informal, atau pada ruang tertentu memberikan wacana tertentu pula. Berbicara di ruang kelas berbeda dengan berbicara di rumah dan juga di pasar, karena situasi sosial atau aturan yang melingkupinya berbeda, menyebabkan partisipan

komunikasi harus menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Oleh karena itu, wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya.

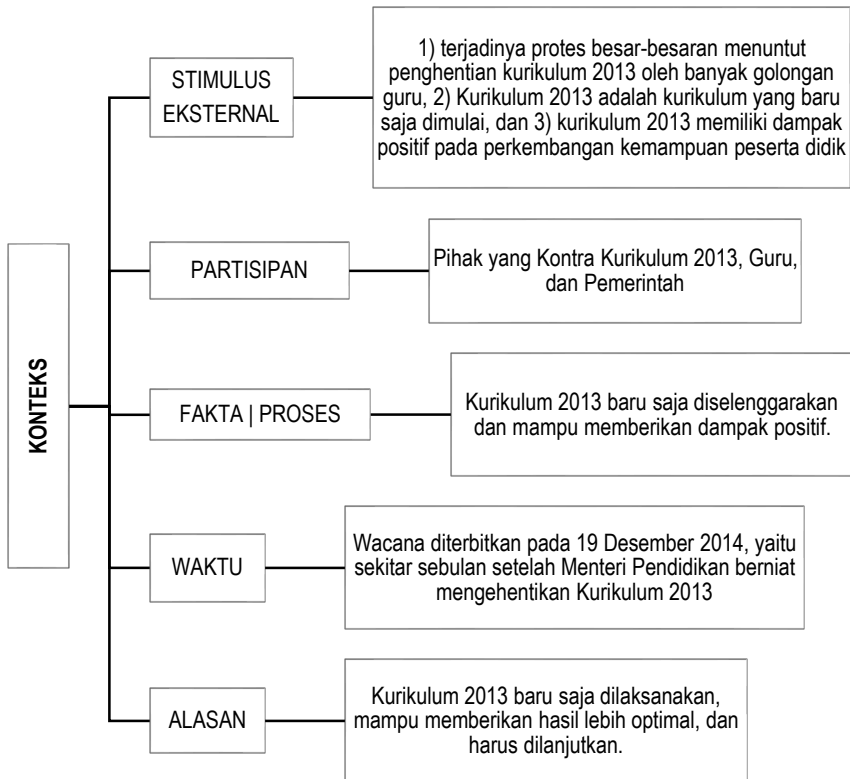
Konteks yang Melatari Wacana 3a

Wacana 3a pada dasarnya berisi tentang alasan-alasan pembuat wacana mendukung kurikulum 2013. Alasan-alasan tersebut disampaikan secara tegas dan lugas. Wacana 3a menginformasikan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan bijak dan logis kepada pembaca untuk tetap menggunakan kurikulum 2013. Salah satu alasannya pro terhadap kurikulum 2013 adalah bahwa penghentian kurikulum 2013 akan memberikan kerugian besar karena pemerintah telah mengeluarkan dana yang besar untuk memulai kurikulum 2013. Pembuat wacana banyak memberikan informasi dan pertimbangan-pertimbangan bagi pembaca untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 karena kurikulum 2013 baru saja dilaksanakan, dan terbukti memberikan dampak positif bagi kemampuan peserta didik.

Secara konteks, wacana 3a dilatarbelakangi oleh tiga kejadian atau fenomena: 1) terjadinya protes besar-besaran menuntut

penghentian kurikulum 2013 oleh banyak golongan guru, 2) Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baru saja dimulai, dan 3) kurikulum 2013 memiliki dampak positif pada perkembangan kemampuan peserta didik. Ketiga fenomena tersebut pada akhirnya memengaruhi pembuat wacana untuk memproduksi wacana *3a* yang dipublikasikannya pada situs *Kompasiana*.

Wacana *3a* dipublikasi pada tanggal 09 Desember 2014. Pada masa ini, kurikulum 2013 menjadi bahasan yang menarik oleh banyak pihak karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Anies Baswedan, mengintrusikan seluruh sekolah untuk menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Diskusi dan bahasan mengenai kurikulum 2013, pada akhirnya, menjadi perbincangan hangat pada banyak forum dan media. Hal ini tentunya memengaruhi pembuat wacana dalam memproduksi wacana *3a*. Berikut ini bagan yang menggambarkan bagaimana konteks melatarbelakangi wacana *3a* pada situs *Kompasiana*.



3. Kognisi Sosial

Kognisi sosial merupakan proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari penulis (pembuat wacana). Analisis terhadap kognisi pembuat wacana dalam proses pembentukan wacana juga melibatkan analisis kebahasaan

secara mendalam untuk membongkar relasi kuasa dan dominasi yang diproduksi pada wacana. Analisis kognisi sosial dilakukan melalui daftar pernyataan yang diajukan kepada pembuat wacana sehingga hasilnya akan lebih memperjelas bagaimana wacana diproduksi dan konteks apa yang memengaruhinya.

Kognisi sosial atau kemampuan untuk memproduksi suatu wacana terkait erat dengan struktur mental. Setiap wacana diproduksi melalui skema atau model yang memengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu objek. Dalam skema tersebut, pewacana akan melakukan seleksi dan proses informasi yang datang dari pengalaman dan sosialisasi. Dalam analisis wacana kritis, skema inilah yang akan menjadi fokus, terkait bagaimana suatu wacana diproduksi oleh pewacana.

Kognisi Sosial Wacana 3a

Narasumber wacana 3a yang berjudul “Ini Alasan Saya Pro Kurikulum 2013” pada situs *Kompasiana* adalah Muhammad Syukri. Narasumber adalah lulusan pasca sarjana IKIP Jakarta pada tahun 2006 lalu. Saat ini, narasumber bekerja sebagai PNS, dan tinggal di Al Muslim 7 Takengon. Beliau

menyampaikan bahwa Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baik karena dapat membuat anak didik menjadi lebih kreatif. Oleh karena itu, narasumber mengatakan bahwa kurikulum 2013 harus tetap dilanjutkan.

Selanjutnya, faktor yang memengaruhinya dalam memproduksi wacana 3a adalah pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar agar seluruh sekolah di Indonesia dapat melaksanakan kurikulum 2013. Narasumber mencontohkan, beberapa guru sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang tentunya menggunakan anggaran yang tidak sedikit, juga termasuk penyediaan buku tematik gratis untuk siswa. Jika kurikulum 2013 dihentikan, maka semua anggaran yang telah dikeluarkan tersebut akan sia-sia, dan orang tua siswa harus membeli buku lagi. Narasumber menilai bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang kurang pertimbangan dan dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, wacana 3a dilatarbelakangi oleh keputusan Mendikbud Anies menghentikan kurikulum 2013, padahal itu adalah kurikulum hebat, kurikulum berbasis *discovery learning*.

Waktu pemroduksian dan publikasi wacana *3a* adalah beberapa bulan ketika kurikulum 2013 baru dilaksanakan. Pada masa ini, kurikulum 2013 sedang menjadi topik hangat di Indonesia. Pro dan kontra pelaksanaan kurikulum 2013 inilah yang juga memengaruhi narasumber untuk memberikan pandangan dan menyampaikan sikap. Ditambah lagi, fakta disekitarnya menunjukkan bahwa kurikulum 2013 ternyata memberikan umpan balik yang positif pada perkembangan peserta didik. Salah satu contoh nyata yang menjadi inspirasinya untuk menulis adalah terjadinya peningkatan kreativitas dari anak kandungnya yang belajar dengan kurikulum 2013.

EVALUASI

Berdasarkan contoh analisis di atas, analisislah wacana di bawah ini!

**Bahkan Kemendikbud Pun Belum Siap dengan
Kurikulum 2013**

Penulis: Johan Wahyudi
Sumber: Kompasiana.com

Semua pihak boleh-boleh saja dan sah-sah saja mengejar ambisi agar terkesan menjadi sesuatu yang berarti. Silakan saja ambisi itu dipelihara dan lalu berusaha diwujudkan

agar khalayak memberikan penilaian baik. Namun, hendaknya ambisi itu harus berdasarkan penalaran yang matang, estimasi waktu dan anggaran yang rasional, dan mau belajar kepada sejarah. Ketika semuanya ditiadakan, sebenarnya itu hanya akan menjadi galian kuburan untuk menenggelamkannya.

Jika kecerobohan itu dilakukan secara pribadi, mungkin dampaknya hanya akan dirasakan oleh pribadi pula. Andaikan melebar, paling pihak terdekat akan turut *kecipratan* getahnya itu. Tak terlalu sulit menghapus getahnya andaikan segera saja dibasuh. Namun, sungguh petaka sistemik akan terjadi manakala kecerobohan itu dilakukan oleh lembaga besar, induk, dan membawahi sekian ribu lembaga sistem bawahan, serta puluhan (bahkan ratusan) juta warganya.

Pagi ini, saya dibuat geram setelah membaca berita di *Kompas.com* yang berjudul [Jangan Paksa Diri demi Kurikulum.2013](#). Dalam berita itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, menegaskan bahwa sekolah atau daerah tidak boleh memaksakan pelaksanaan Kurikulum 2013 secara mandiri tahun ini jika justru membebani murid atau orang tua murid, terutama dalam hal pengadaan buku. Sebelum mandiri, guru perlu dilatih dulu. Buku pun sudah harus tersedia gratis. Nuh menegaskan dua syarat utama pemberlakuan Kurikulum 2013, yaitu guru harus dilatih dan buku tersedia gratis. Beliau berkata, "**Kalau dua syarat ini tak dapat dipenuhi, jangan dipaksakan.** Saya menyambut baik ada niatan ikut melaksanakan kurikulum. Mau saja lumayan."

Banyak hal dilupakan Mendikbud berkenaan dengan pemberlakuan Kurikulum 2013, seperti minimnya pelatihan guru, keterbatasan buku, bobroknya kualitas buku, ketiadaan evaluasi, dan ketidaksiapan Kemendikbud. Melalui grup-grup keguruan yang saya ikuti di *Facebook* (karena kebetulan saya menjadi anggotanya), saya sering membaca keluhan, komentar, serta beragam informasi, bahkan pertanyaan dari teman-teman guru sehubungan dengan minimnya pelatihan guru. Bahkan, **ada informasi beberapa daerah sudah mewajibkan pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk semua sekolah (SD, SMP, dan SMA/SMK) meskipun sama sekali guru-guru belum dilatih.** Ini namanya bunuh diri massal!

Buku Kurikulum 2013 sangat spesifik, terlebih buku untuk Sekolah Dasar (SD) kelas rendah (kelas 1-3) karena hanya berlaku setahun. Ada dua jenis buku yang harus disediakan, yaitu buku pegangan murid dan guru. Kedua jenis buku itu harus tersedia secara bersama-sama. Tentu ini adalah malapetaka besar bagi sekolah-sekolah pinggiran yang miskin karena pasti akan menggerogoti uang BOS demi membeli buku Kurikulum 2013. Oleh karena itu, teramat wajar dan sangat bijaksana ketika Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak **Taufik Yudi Mulyanto**, mengatakan bahwa **DKI Jakarta secara resmi telah membatalkan rencana pelaksanaan Kurikulum 2013 secara mandiri khusus di jenjang SD dan SMP.** Beliau khawatir dana bantuan operasional sekolah (BOS) tak mencukupi sehingga dikhawatirkan sekolah memungut biaya dari murid untuk pelatihan guru dan pengadaan buku.

Kualitas bukunya pun teramat buruk. Buku bahasa Indonesia SMP Kelas 7 mengandung banyak kata-kata kotor. Khusus kasus ini, saya pernah mempublikasikannya di [Kata-kata tak Senonoh di Buku Kurikulum 2013](#). Banyak pihak meminta Mendikbud agar segera menarik buku itu karena teramat berpengaruh buruk kepada pikiran anak didik. Bagaimana Mendikbud menyikapinya? Dengan entengnya, Wakil Mendikbud Bidang Kurikulum, **Musliar Kasim**, berkata bahwa buku-buku itu tidak akan ditarik, tetapi akan direvisi saja. Namun, hingga detik ini, buku-buku itu tetap digunakan dan sama sekali tidak ada usaha untuk merevisinya!

Buruknya Kurikulum 2013 juga terlihat pada sistem evaluasi. Jika dipelajari secara saksama, Kurikulum 2013 berusaha mengubah total sistem pembelajaran di kelas dan sistem penilaian peserta didik (baca: murid) karena kurikulum itu lebih berorientasi kepada manusia karakter daripada manusia berilmu. Oleh karena itu, sistem penilaian pun mestinya menggunakan penilaian kualitatif, seperti sikap, sifat, catatan perilaku dan bukan angka-angka pencapaian pengetahuan kognitif. Lalu, **bagaimana mungkin sebuah sekolah akan menerapkan dua sistem yang berbeda sedangkan rapotnya berisi kolom-kolom yang harus diisi angka-angka?** Satu sisi Kurikulum 2013 berisi penilaian sikap (baik-buruk) dan satu sisi kolom rapot harus berwujud angka-angka.

Dari empat faktor di atas, tampak sekali bahwa Kemendikbud pun belum siap melaksanakan Kurikulum 2013. Ketidaksiapan ini pun ditegaskan lagi Komisi X DPR di mana **enam fraksi setuju dengan catatan dan tiga fraksi tidak setuju**. Juru bicara Fraksi Golkar, Otje Popong

Djundjuran, mengatakan, Kurikulum 2013 dinilai belum punya rancangan terencana dan terarah. Oleh karena itu, Kurikulum 2013 itu bukan kurikulum baru, melainkan revisi kecil Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang saat ini berlaku. Lalu, mengapa Mendikbud menyusun Kurikulum 2013 hingga mengubah semua sistem yang ada jika memang hanya berisi revisi kurikulum sebelumnya? Mestinya Mendikbud menunjukkan kelemahan KTSP sebelum meluncurkan Kurikulum 2013.

Berdasarkan telaah di atas, saya menyimpulkan bahwa mestinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bersikap *legowo* alias berbesar hati alias lapang dada alias ikhlas seraya mengakui bahwa Kurikulum 2013 memiliki banyak kekurangan dan membatalkannya. Mestinya Mendikbud berusaha meminimalisasi dampak buruk di kemudian hari daripada mempertahankan gengsi sesaat. Teramat kasat mata jika Kurikulum 2013 itu mengandung unsur proyek dan pembodohan massal. Unsur proyek dapat dilihat dari masa berlaku buku dan pembodohan massal dapat dilihat dari pengurangan kompetensi kognitif yang harus dipelajari peserta didik. Jika peserta didik (baca: murid) hanya dibentuk karakternya agar menjadi pribadi yang santun tanpa memperhatikan isi otaknya, saya menyebut upaya itu sebagai penciptaan calon-calon “pengemis” masa mendatang!

DAFTAR RUJUKAN

Darma, Yoce Aliah.2013.*Analisis Wacana Kritis*.Bandung: Yrama Widya.

Eriyanto.2008.*Analisis Wacana(Pengantar Analisis Teks Media)*.Yogyakarta: Lkis.

Eriyanto.2008.*Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*. Yogyakarta: Lkis.

Fairclough, Norman.2010. *Critical Discourse Analysis (The Critical Studi of Language)*. New York: Routledge.

Hamad, Ibnu.2013.*Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*.Jakarta: Pustaka Pelajar.

<http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/28/sertifikasi-guru-prosedur-rumit-namun-dianggap-dan-dipahami-mudah-649895.html>

<http://edukasi.kompasiana.com/2014/08/05/sisi-balik-sertifikasi-guru-terhadap-pendidikan-kaum-tertindas-667174.html>

<http://edukasi.kompasiana.com/2013/05/02/bukan-un-yang-salah-kinerja-kemendikbud-yang-perlu-diubah-556425.html>

<http://edukasi.kompasiana.com/2014/05/18/ujian-nasional-hanya-indonesia-yang-bisa-begini-tragis-653371.html>

<http://edukasi.Kompasiana.com/2014/12/09/ini-alasan-saya-pro-kurikulum-2013-696134.html>

<http://edukasi.Kompasiana.com/2013/09/19/bahkan-kemendikbud-pun-belum-siap-dengan-kurikulum-2013--591208.html><http://wikipedia.com>

Junaiyah dan Arifin, Zaenal. 2013. *Keutuhan Wacana*. Jakarta: Grasindo.

Karomani. 2008. *Analisis Wacana Berita: Mengungkapn Kontroversi Sidang Istimewa dan Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid dalam Bidikan Media Massa Kompas dan Republika*. Tangerang: Matabaca Publishing.

Rusminto, Nurlaksana Eko. 2012. *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sudibyoy, Agus.2001.*Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Lkis.

Titscher, Stefan. Dkk. Abdul Syukur Ibrahim (Ed).2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Van Dijk, Teun A. 1985. *Handbook of Discourse Analysis: Dimentions of Discourse*. London: Academic Press.

Van Dijk, Teun A.1992.*Tekt and Context (Explorations and Semantics and Pragmatics of Discorse)*. New York: Longman.

Van Dijk, Teun A. 2011. *Discorse Studies*. London: ECIY.

Wijana, I Dewa Putu dan Rohmadi, Muhammad. 2010. *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Yuwono, Untung. 2008. *Wacana*. Dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya* Vol 10 no.1 , April 2008, hlm 1 – 189.

Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori dan Implementasi

Wacana atau tulisan bernada kritis dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan dari penulisnya. Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan dan memahami keseluruhan makna dalam sebuah teks adalah dengan melakukan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah model analisis wacana yang dapat digunakan untuk menjawab apakah wacana yang diproduksi telah dipengaruhi oleh tujuan tertentu atau tidak, dan bagaimana dampak wacana tersebut terhadap masyarakat pembaca. Analisis wacana kritis adalah upaya mendeskripsikan segala fenomena yang tertuang dalam tulisan atau teks. Kegiatan pendeskripsian dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lengkap terkait fenomena masyarakat yang tertuang dalam sebuah teks. Kegiatan menganalisis diartikan sebagai kegiatan mengurai teks guna melihat apakah teks yang dihasilkan oleh pembuat teks dipengaruhi oleh kognisi dan lingkungan tertentu.

TENTANG PENULIS



Dewi Ratnaningsih, lahir di Cirebon pada 19 Desember 1986. Penulis menempuh pendidikan S-1 nya di STKIP Muhammadiyah Kotabumi (saat ini berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi) dan S-2 di Universitas Lampung. Penulis bekerja sebagai dosen yang telah mengabdikan sejak tahun 2012 pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

ISBN 978-602-60227-3-8



9 786026 022738



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Alamat Redaksi:

Gedung C Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sindangsari Kabupaten Lampung Utara

E-mail : penerbit@umko.ac.id

Website : www.umko.ac.id